

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH



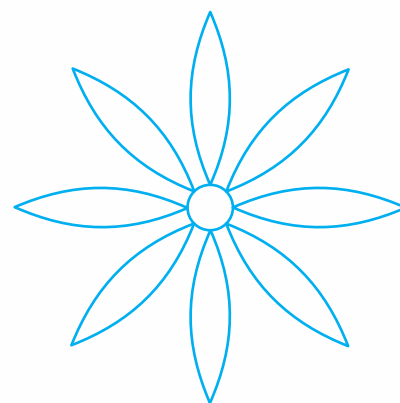
FEBRUARI 2026



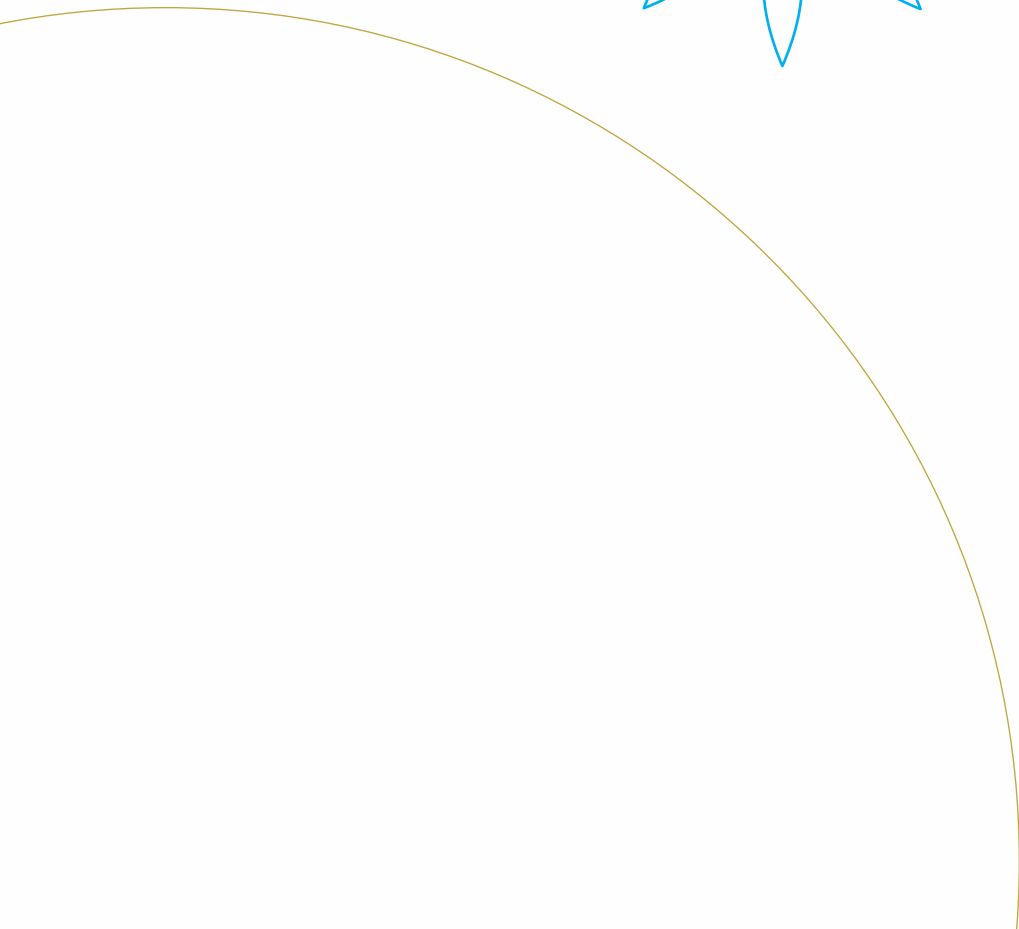
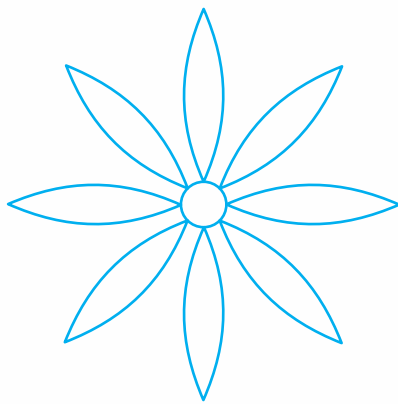
BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI JAWA TENGAH



**FEBRUARI
2026**



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya "Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Februari 2026" dapat dipublikasikan. Buku ini menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah khususnya bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan keuangan daerah, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia juga sebagai bahan informasi bagi pihak eksternal.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan buku ini. Harapan kami, hubungan kerja sama yang baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Semarang, Februari 2026
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ttd

M. Noor Nugroho

Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah
Direktur



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	x
Tabel Indikator	xii
Ringkasan Eksekutif	xvi

01

Perkembangan Ekonomi Makro Regional

1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan IV 2025	2
1.1.1. Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran	3
1.1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	13
Boks 1: KEK Industropolis Batang sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah di Tengah Tantangan Global	22
Boks 2: Transformasi Kota Solo menuju <i>Wellness City</i> sebagai Strategi Mendorong Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Jawa Tengah	24

02

Keuangan Pemerintah

2.1. APBD Provinsi Jawa Tengah	26
2.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD Provinsi Jawa Tengah	26
2.1.2. Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah	27
2.2. APBN di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	30
2.2.1. Anggaran APBN di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	30
2.2.2. Realisasi APBN di Provinsi Jawa Tengah	30

03

Perkembangan Inflasi Daerah

3.1. Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV 2025	36
3.1.1. Inflasi Berdasarkan Kelompok	37
3.2. Inflasi Kota – Kota di Provinsi Jawa Tengah	38
Boks 3 : Penguatan Regenerasi Petani Muda sebagai Strategi Transformasi Hortikultura dan Stabilitas Inflasi Pangan	40

04

Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

4.1. Perkembangan Kinerja Perbankan Jawa Tengah	46
4.1.1. Perkembangan Penyaluran Kredit	46
4.1.2. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)	48
4.2. Perkembangan Kinerja Perbankan secara Spasial	49
4.2.1. Perkembangan Penyaluran Kredit Spasial	49
4.2.2. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Spasial	50
4.3. Perkembangan Sektor Korporasi Jawa Tengah	50
4.3.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Korporasi	50
4.3.2. Perkembangan Kredit Korporasi di Jawa Tengah	51
4.3.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Korporasi di Jawa Tengah	51
4.4. Perkembangan Sektor Rumah Tangga	52
4.4.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga	52
4.4.2. Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Jawa Tengah	52
4.4.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga di Jawa Tengah	53
4.5. Perkembangan Pembiayaan UMKM di Jawa Tengah	53
4.5.1. Penyaluran Kredit UMKM di Jawa Tengah	53
4.5.2. Program Pengembangan UMKM di Jawa Tengah	54

05

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran di Jawa Tengah	58
5.1.1 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan BI-Fast	58
5.1.2 Transaksi Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS)	59
5.1.3 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	59
5.1.4 Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah	61
5.2. Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	61
5.2.1 Penyediaan Uang Rupiah	61
5.2.2 Penanganan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya	61
5.3. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing	62
5.4. Perkembangan Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif	62

06

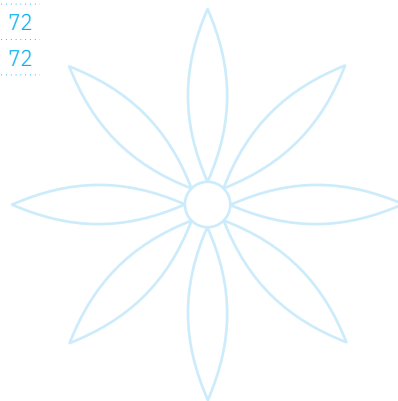
Ketenagakerjaan dan
Kesejahteraan

6.1. Ketenagakerjaan	68
6.1.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Jawa Tengah	68
6.2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan	70
6.3. Tingkat Kemiskinan	72
6.4. Pemerataan Kesejahteraan Penduduk	72

07

Prospek
Perekonomian Daerah

7.1. Kondisi Perekonomian Global dan Domestik	76
7.2. <i>Tracking</i> dan Proyeksi PDRB Jawa Tengah	77
7.2.1. <i>Tracking</i> Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2026	77
7.2.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Sisi Pengeluaran	78
7.2.3. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Sisi Lapangan Usaha	78
7.3. <i>Tracking</i> dan Proyeksi Inflasi	79
7.3.1. Inflasi Januari 2026	79
7.3.2. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan I 2026	79
7.3.3. Program Pengendalian Inflasi Daerah	80
7.3.4. Prospek Inflasi Jawa Tengah Tahun 2026	80



Daftar Grafik

01

Perkembangan Ekonomi Makro Regional

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	2	Grafik 1.26	Pertumbuhan Volume Ekspor Alas Kaki	10
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional	2	Grafik 1.27	Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	10
Grafik 1.3	Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi	2	Grafik 1.28	Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	10
Grafik 1.4	Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi	3	Grafik 1.29	Prompt Manufacturing Index Negara Mitra Dagang Ekspor Jawa Tengah	11
Grafik 1.5	Pertumbuhan Tahunan Outflow Uang Kartal dan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian	3	Grafik 1.30	Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri	11
Grafik 1.6	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	5	Grafik 1.31	Struktur Impor LN Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran	12
Grafik 1.7	Perkembangan Inflasi dan NTP	5	Grafik 1.32	Perkembangan Nilai Impor LN Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran	12
Grafik 1.8	Indeks Keyakinan Konsumen	5	Grafik 1.33	Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan	12
Grafik 1.9	Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini	5	Grafik 1.34	Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas	12
Grafik 1.10	Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	6	Grafik 1.35	Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal	12
Grafik 1.11	Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi	6	Grafik 1.36	Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah	12
Grafik 1.12	Pertumbuhan Konsumsi LNPRT	6	Grafik 1.37	Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal	12
Grafik 1.13	Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	7	Grafik 1.38	Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah	13
Grafik 1.14	Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	7	Grafik 1.39	Indeks Penjualan Riil	13
Grafik 1.15	Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	7	Grafik 1.40	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15
Grafik 1.16	Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi	8	Grafik 1.41	Curah Hujan di Jawa Tengah	15
Grafik 1.17	Pertumbuhan Kredit Investasi	8	Grafik 1.42	Perkembangan Kredit Pertanian	16
Grafik 1.18	Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi, dan Konsumsi Semen	8	Grafik 1.43	Pertumbuhan Luas Panen dan Produksi Padi di Jawa Tengah	16
Grafik 1.19	Pertumbuhan Realisasi PMA dan PMDN di Jawa Tengah	8	Grafik 1.44	Perkembangan Hasil Produksi Padi di Jawa Tengah	16
Grafik 1.20	Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri	9	Grafik 1.45	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Impor Bahan Baku Jawa Tengah	17
Grafik 1.21	Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri Jawa Tengah per Jenis Komoditas	9	Grafik 1.46	SBT Kegiatan Usaha dan Kapasitas Produksi Terpakai	17
Grafik 1.22	Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas Berdasarkan Komoditas	9	Grafik 1.47	Pertumbuhan Kredit Industri Pengolahan dan PMI Jawa Tengah	17
Grafik 1.23	Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT	10	Grafik 1.48	Perkembangan Volume Persediaan, Produksi, dan Total Pesanan Industri Pengolahan (Hasil SKDU)	17
Grafik 1.24	Pertumbuhan Volume Ekspor TPT	10	Grafik 1.49	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor dan SBT Kegiatan Usaha	18
Grafik 1.25	Pertumbuhan Nilai Ekspor Alas Kaki	10	Grafik 1.50	Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor dan Kredit Multi Guna	18
			Grafik 1.51	Komponen Pembentuk IPR Jawa Tengah	18
			Grafik 1.52	Pertumbuhan PDRB dan SBT Konstruksi	19

Grafik 1.53	Pertumbuhan Konsumsi Semen dan Kredit	19
Grafik 1.54	Konstruksi	20
Grafik 1.55	PDRB Sektor Akomodasi Mamin (yoy) dan SBT	20
Grafik 1.56	TPK Hotel Bintang Jawa Tengah	20
Grafik 1.57	PDRB Sektor Infokom (yoy) dan SBT Infokom	20
	PDRB Sektor Transportasi (yoy) dan SBT	
	Transportasi	

02

Keuangan Pemerintah

Grafik 2.1	APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2024 dan T.A. 2025	26
Grafik 2.2	Nominal Realisasi Pendapatan & Belanja Daerah Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025	27
Grafik 2.3	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pagu	27
Grafik 2.4	Realisasi Pendapatan Daerah (2022-2025)	28
Grafik 2.5	Realisasi Belanja Daerah (2022-2025)	28
Grafik 2.6	Realisasi Pendapatan Dalam Satu Periode pada Masing-Masing Triwulan	28
Grafik 2.7	Perbandingan Pos Realisasi Belanja Daerah Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025	30
Grafik 2.8	Pembagian Pos Realisasi Belanja Operasional Triwulan IV 2025	30
Grafik 2.9	Realisasi Belanja dalam Satu Periode pada Masing-Masing Triwulan	30

03

Perkembangan Inflasi Daerah

Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional	36
Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi di Kawasan Jawa	36
Grafik 3.3	Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	37
Grafik 3.4	Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	38
Grafik 3.5	Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Transportasi	38
Grafik 3.6	Inflasi Tahunan Triwulan IV 2025 Kota Pantauan di Jawa Tengah	39
Grafik 3.7	Perkembangan Inflasi Tahunan Triwulan IV 2025 Kota Pantauan di Jawa Tengah	39

04

Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Grafik 4.1	Perkembangan Indikator Perbankan Jawa Tengah	46
Grafik 4.2	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan Pulau Jawa	46
Grafik 4.3	Pangsa Penyaluran Kredit Perbankan Pulau Jawa	46
Grafik 4.4	Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Pulau Jawa	46
Grafik 4.5	Pangsa Penyaluran DPK Perbankan Pulau Jawa	46
Grafik 4.6	Pangsa Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Penggunaan	47
Grafik 4.7	Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Penggunaan	47
Grafik 4.8	Pangsa Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor Ekonomi	47
Grafik 4.9	Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor Ekonomi	47
Grafik 4.10	Perkembangan DPK Perbankan Umum Jawa Tengah	48
Grafik 4.11	Perkembangan Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai (yoy)	48
Grafik 4.12	Andil Pertumbuhan Giro Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	48
Grafik 4.13	Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Jangka Waktu (yoy)	48
Grafik 4.14	Andil Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	48
Grafik 4.15	Perkembangan Pertumbuhan Giro Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai (yoy)	49
Grafik 4.16	Andil Pertumbuhan Giro Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Jangka Waktu	49
Grafik 4.17	Pangsa Penyaluran Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tw IV 2025	49
Grafik 4.18	Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	49
Grafik 4.19	Pangsa Penghimpunan DPK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tw IV 2025	50
Grafik 4.20	Pertumbuhan Penghimpunan DPK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	50

Grafik 4.21	Komposisi Impor Jawa Tengah	51	Grafik 5.9	Penggunaan Kartu Kredit Berdasarkan Jenis Transaksi di Jawa Tengah	59
Grafik 4.22	Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor (yoy)	51	Grafik 5.10	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Jawa Tengah	59
Grafik 4.23	Perkembangan Pangsa Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor	51	Grafik 5.11	Perkembangan Nominal Transaksi Bill Pay Menggunakan Kartu Kredit di Jawa Tengah	60
Grafik 4.24	Perkembangan Pertumbuhan DPK Korporasi Berdasarkan Jenis Simpanan (yoy)	52	Grafik 5.12	Perkembangan Nominal Transaksi Belanja dan Online Menggunakan Kartu Kredit di Jawa Tengah	60
Grafik 4.25	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	52	Grafik 5.13	Perkembangan Volume Transaksi Bill Pay Menggunakan Kartu Kredit di Jawa Tengah	60
Grafik 4.26	Perkembangan Andil Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	52	Grafik 5.14	Perkembangan Outstanding Kartu Kredit di Jawa Tengah	60
Grafik 4.27	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	52	Grafik 5.15	Pangsa Penggunaan Transaksi Kartu Debit di Jawa Tengah	60
Grafik 4.28	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	53	Grafik 5.16	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Debit di Jawa Tengah	60
Grafik 4.29	Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah	53	Grafik 5.17	Perkembangan Nominal Transaksi Tunai Menggunakan Kartu Debit di Jawa Tengah	60
Grafik 4.30	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perseorangan Jawa Tengah Berdasarkan Komponennya	53	Grafik 5.18	Perkembangan Nominal Transaksi Belanja dan Online Menggunakan Kartu Debit di Jawa Tengah	60
Grafik 4.31	Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM dan Non UMKM Perbankan di Jawa Tengah	53	Grafik 5.19	Perkembangan Noninal Transaksi Interbank Menggunakan Kartu Debit di Jawa Tengah	61
Grafik 4.32	Penyaluran Kredit UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan	53	Grafik 5.20	Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah	61
Grafik 4.33	Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral	54	Grafik 5.21	Perkembangan Penukaran Uang	61
Grafik 4.34	Pertumbuhan Kredit UMKM secara Sektoral	54	Grafik 5.22	Perkembangan Temuan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya	61
Grafik 4.35	Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan	54	Grafik 5.23	Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA BB di Jateng	62
			Grafik 5.24	Perkembangan Pembelian dan Penjualan Valuta Asing melalui KUPVA BB di Jateng	62
			Grafik 5.25	Perkembangan Jumlah Merchant QRIS di Jawa Tengah	63
			Grafik 5.26	Perkembangan Transaksi QRIS di Jawa Tengah	63
			Grafik 5.27	Perkembangan QRIS di Jawa Tengah Secara Spasial	63

05

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Grafik 5.1	Perkembangan Nominal Kliring di Jawa Tengah	58
Grafik 5.2	Perkembangan Volume Kliring di Jawa Tengah	58
Grafik 5.3	Rata-Rata Nominal Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah	58
Grafik 5.4	Rata-Rata Volume Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah	58
Grafik 5.5	Perkembangan Transaksi BI-Fast di Jawa Tengah	58
Grafik 5.6	Struktur Transaksi BI-Fast di Jawa Tengah	58
Grafik 5.7	Perkembangan Nominal Transaksi Melalui RTGS di Jawa Tengah	59
Grafik 5.8	Perkembangan Volume Transaksi Melalui RTGS di Jawa Tengah	59

06

**Ketenagakerjaan dan
Kesejahteraan**

Grafik 6.1	Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat ini	70
Grafik 6.2	Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha 6 bulan yang Akan Datang	70
Grafik 6.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah	72
Grafik 6.4	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota dan Desa Jawa Tengah	72
Grafik 6.5	Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional	73
Grafik 6.6	Perbandingan Ketimpangan Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Daerah	73

07

**Prospek
Perekonomian Daerah**

Grafik 7.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	77
Grafik 7.2	Proyeksi Inflasi	80

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (% yoy)	2
Tabel 1.2.	PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	3
Tabel 1.3.	PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	3
Tabel 1.4.	Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Pengeluaran (% YOY)	4
Tabel 1.5.	Andil Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Pengeluaran (% andil; yoy)	4
Tabel 1.6.	PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)	14
Tabel 1.7.	PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)	14
Tabel 1.8.	Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha (% YOY)	15
Tabel 2.1.	Anggaran Pendapatan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	26
Tabel 2.2.	Anggaran Belanja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	27
Tabel 2.3.	Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Jawa Tengah Hingga Triwulan IV 2025 dan 2024 (Rp miliar)	29
Tabel 2.4.	Realisasi Belanja Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025	29
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Belanja	31
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Fungsi	31
Tabel 3.1.	Tabel Komoditas Utama Penyumbang Inflasi (Andil YoY)	36
Tabel 3.2.	Tabel Komoditas Utama Penyumbang Deflasi (Andil YoY)	36
Tabel 3.3.	Tabel Inflasi Tahunan Kota Jawa Tengah	37
Tabel 3.4.	Perkembangan Inflasi Tahunan Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok	37
Tabel 3.5.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kabupaten Rembang Berdasarkan Kelompok	39
Tabel 4.1.	Pengelompokkan Kredit Berdasarkan Nilai, Triwulan IV 2025	47
Tabel 6.1.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)	68
Tabel 6.2.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (juta orang)	68
Tabel 6.3.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama (juta orang)	69
Tabel 6.4.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)	69
Tabel 6.5.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)	69
Tabel 6.6.	NTP Jawa Tengah	70
Tabel 6.7.	NTP Jawa Tengah per Subsektor	71
Tabel 6.8.	Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor	71
Tabel 6.9.	Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor	71
Tabel 6.10.	Garis Kemiskinan Jawa Tengah	72
Tabel 7.1.	Indikator Perekonomian Global	76
Tabel 7.2.	Pertumbuhan Harga Komoditas Perdagangan Dunia	77



Tabel Indikator Ekonomi

Provinsi Jawa Tengah

A. PDRB & INFLASI

Indikator	2024		2024	2025				2025
	III	IV		I	II	III	IV	
Ekonomi Makro Regional *)								
Produk Domestik Regional Bruto (% yoy)	4,93	4,96	4,95	4,97	5,28	5,37	5,84	5,37
Berdasarkan Sektor								
-Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,24	6,48	1,41	15,28	1,19	-0,70	4,06	4,78
-Pertambangan dan Penggalian	4,55	0,78	2,83	-0,79	1,85	2,50	5,17	2,21
-Industri Pengolahan	2,78	2,44	3,52	0,68	4,46	5,96	5,18	4,06
-Pengadaan Listrik dan Gas	6,56	5,75	6,97	12,09	-2,41	3,40	5,14	4,42
-Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,97	2,51	2,10	-0,14	0,26	1,22	0,07	1,37
-Konstruksi	8,57	6,41	7,97	3,45	8,90	7,29	6,85	6,62
-Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor	4,37	4,31	4,16	4,06	4,56	4,45	5,26	4,63
-Transportasi dan Pergudangan	8,06	7,30	5,56	9,81	7,28	6,91	3,27	6,73
-Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,17	8,78	10,03	7,44	9,42	11,79	13,97	10,60
-Informasi dan Komunikasi	8,02	8,82	9,56	10,64	9,97	8,50	6,05	8,74
-Jasa Keuangan dan Asuransi	2,30	-0,32	2,16	0,12	4,77	2,19	16,14	5,61
-Real Estate	5,59	7,86	5,91	5,50	6,05	5,88	5,06	5,62
-Jasa Perusahaan	8,63	6,87	9,15	8,41	7,95	7,80	7,29	7,86
-Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,40	4,38	7,37	1,18	-0,48	2,75	5,62	2,25
-Jasa Pendidikan	8,64	8,87	8,53	7,56	7,33	6,89	4,02	6,50
-Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,74	8,71	7,28	6,33	5,03	5,06	3,68	5,01
-Jasa lainnya	7,36	8,79	6,82	8,36	9,86	8,64	6,56	8,15
Berdasarkan Permintaan								
-Konsumsi Rumah Tangga	5,09	5,26	5,15	4,98	4,65	4,61	4,44	4,78
-Konsumsi LNPRT	16,29	9,83	16,38	1,48	3,26	4,49	4,60	4,01
-Konsumsi Pemerintah	-0,49	-1,96	3,01	-1,04	-2,74	4,80	9,11	3,31
-PMTB	8,42	6,41	6,55	4,55	8,65	6,71	6,24	6,76
-Ekspor Luar Negeri	16,96	8,67	11,09	10,69	11,13	21,04	18,00	13,60
-Impor Luar Negeri	4,58	7,54	9,29	-6,26	0,88	8,33	4,18	-0,31
-Net Ekspor Antardaerah	-14,28	38,79	3,47	-7,28	6,93	-3,77	-12,17	-10,06

*Mulai tahun 2024 perhitungan IHK menggunakan SBH 2022
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Indikator	2024		2024	2025				2025
	III	IV		I	II	III	IV	
Ekspor								
- Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	2.773	2.904	10.971	2.913	2.767	3.312	3.416	12.407
- Volume Ekspor Non Migas (Juta Ton)	810	856	3.254	1.000	817	1.030	1.151	3.997
Impor								
- Nilai Impor Non Migas (USD Juta)	2.584	2.669	9.810	2.302	2.678	2.759	2.987	10.727
- Volume Impor Non Migas (Juta Ton)	1.475	1.650	6.278	1.382	1.467	1.630	1.648	6.126
Indeks Harga Konsumen								
Provinsi Jawa Tengah	105,98	107,07	107,07	107,26	108,47	108,79	109,98	109,98
Kota Purwokerto	105,14	106,16	106,16	106,60	107,49	107,79	108,93	108,93
Kabupaten Wonosobo	107,80	109,00	109,00	109,73	110,37	110,47	111,88	111,88
Kabupaten Wonogiri	106,38	107,90	107,90	107,63	109,11	109,14	110,62	110,62
Kabupaten Rembang	109,00	110,43	110,43	110,48	111,79	112,15	113,16	113,16
Kota Surakarta	106,29	107,07	107,07	107,31	108,53	108,79	110,06	110,06
Kota Semarang	105,12	106,09	106,09	106,18	107,59	107,98	109,10	109,10
Kota Tegal	106,61	107,57	107,57	107,60	108,83	109,56	110,61	110,61
Kota Kudus	105,93	107,08	107,08	107,19	108,60	108,77	109,95	109,95
Kota Cilacap	105,70	106,78	106,78	107,18	108,05	108,67	109,76	109,76
Laju Inflasi Tahunan (% , yoy)								
Provinsi Jawa Tengah	1,57	1,67	1,67	0,75	2,20	2,65	2,72	2,72
Kota Purwokerto	1,28	1,51	1,51	0,80	2,00	2,52	2,61	2,61
Kabupaten Wonosobo	1,54	1,52	1,52	0,94	1,92	2,48	2,64	2,64
Kabupaten Wonogiri	1,78	1,77	1,77	0,24	2,30	2,59	2,52	2,52
Kabupaten Rembang	1,39	1,54	1,54	1,03	2,67	2,89	2,47	2,47
Kota Surakarta	1,69	1,50	1,50	0,76	2,04	2,35	2,79	2,79
Kota Semarang	1,53	1,69	1,69	0,70	2,18	2,72	2,84	2,84
Kota Tegal	2,03	2,19	2,19	0,70	2,22	2,77	2,83	2,83
Kota Kudus	1,61	1,71	1,71	0,77	2,36	2,68	2,68	2,68
Kota Cilacap	1,74	1,82	1,82	1,05	2,18	2,81	2,79	2,79

*Mulai tahun 2024 perhitungan IHK menggunakan SBH 2022
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

B. Perbankan dan Sistem Pembayaran

Indikator	2024				2024	2025				2025
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Perbankan **)	402,94	422,53	425,09	425,11	425,11	420,79	429,14	434,82	434,70	434,70
- Giro	58,41	62,73	62,15	58,01	58,01	58,83	63,97	69,95	68,48	68,48
- Tabungan	225,30	229,18	229,64	234,96	234,96	240,56	241,67	243,04	252,45	252,45
- Deposito	119,23	130,62	133,30	132,13	132,13	121,39	123,49	121,83	113,76	113,76
Kredit (Rp Triliun)	377,46	377,88	385,19	387,69	387,69	388,26	384,76	384,99	384,01	384,01
- Modal Kerja	204,94	203,69	207,13	204,23	204,23	203,87	198,98	197,14	190,64	190,64
- Investasi	67,41	67,43	68,97	68,4	68,4	71,93	72,47	72,85	76,41	76,41
- Konsumsi	105,11	106,77	109,08	111,55	111,55	112,46	113,77	114,99	116,96	116,96
Loan to Deposit ratio (%)	93,68	89,43	89,03	89,02	89,02	92,27	89,66	88,54	88,34	88,34
NPL Gross (%)	3,33	3,07	3,17	3,2	3,2	3,18	3,56	3,35	4,26	4,26

**Data Perbankan merupakan data bank umum yang ada di Jawa Tengah (Lokasi Bank Pelapor)







Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif



Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

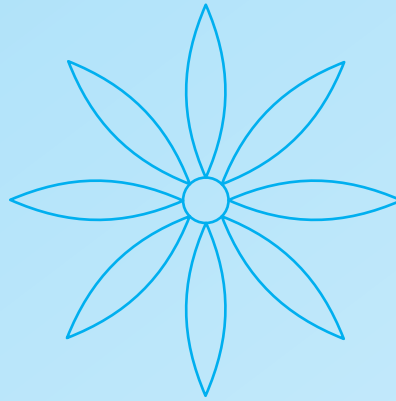


Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 sebesar 5,84% (yoy), meningkat dibanding triwulan lalu sebesar 5,38% (yoy). Konsumsi Rumah Tangga (RT) menjadi sumber pertumbuhan utama di sisi pengeluaran dan Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan menjadi sumber pertumbuhan utama di sisi lapangan usaha. Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tw IV 2025 ini lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar 5,39% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. Kinerja konsumsi rumah tangga tumbuh positif meskipun melambat didukung oleh mobilitas dan aktivitas ekonomi selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sementara itu, kinerja investasi didukung oleh peningkatan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta peningkatan kredit investasi.

Sementara dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan terutama berasal dari LU Industri Pengolahan yang tetap tumbuh kuat pada periode laporan. Industri Pengolahan tumbuh kuat sejalan dengan kontribusi industri manufaktur yang masih besar. Sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha lainnya adalah Konstruksi, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin), serta Pertanian. LU Konstruksi tumbuh positif sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan preservasi infrastruktur jalan provinsi. Sementara itu, LU Perdagangan tumbuh meningkat sebesar 5,26% (yoy) sejalan dengan permintaan masyarakat yang didorong oleh diskon akhir tahun di sejumlah pusat perbelanjaan. LU Penyediaan Akmamin tumbuh meningkat sebesar 13,97% (yoy) sejalan dengan peningkatan aktivitas pariwisata di Jawa Tengah, terutama setelah penambahan rute penerbangan internasional Bandara Ahmad Yani ke Singapura pada triwulan IV 2025. LU Pertanian juga tumbuh meningkat sebesar 4,06% sejalan dengan peningkatan kredit pertanian dan panen raya komoditas hortikultura di wilayah sentra produksi. Selain itu, LU Jasa Keuangan tumbuh hingga 16,14% (yoy), paling tinggi dibandingkan LU lainnya pada periode laporan sejalan dengan peningkatan aktivitas bank umum dan pendapatan asuransi.





Keuangan Pemerintah



Kinerja keuangan daerah Jawa Tengah baik pada serapan APBD dan APBN masih mengalami kontraksi pada triwulan IV 2025. Hal ini sejalan dengan pemberlakuan beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), PMK Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Realisasi pendapatan daerah hingga triwulan IV 2025 mencapai Rp23,76 triliun atau setara 96,38% dari pagu anggaran. Realisasi ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan oleh penurunan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah mengalami penurunan terutama pada komponen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini seiring dengan implementasi kebijakan Opsen PKB dan penyesuaian prioritas pengeluaran masyarakat yang lebih mengutamakan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder.

Pada sisi belanja, realisasi tercatat sebesar Rp23,87 triliun atau 94,61% dari total pagu anggaran. Realisasi ini juga lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Rendahnya serapan belanja disebabkan oleh realisasi belanja modal yang terkontraksi karena keterlambatan proses lelang sehingga baru dilaksanakan pada semester kedua tahun 2025. Dengan demikian, proses implementasi program di lapangan menjadi terhambat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengejar ketertinggalan realisasi belanja maupun *output* fisik pada sisa waktu di tahun 2025. Selain itu, Belanja Transfer turut mengalami kontraksi antara lain dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dan kabupaten telah menerima bantuan dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, dari sisi APBN, realisasi terpantau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total realisasi belanja mencapai Rp105,60 triliun atau 96,38% dari pagu anggaran. Hal ini terutama disebabkan oleh realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang terkontraksi seiring dengan penyesuaian alokasi yang lebih rendah untuk Dana Alokasi Khusus Fisik pada triwulan laporan.

Inflasi Daerah



Inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan inflasi terjadi pada hampir seluruh kabupaten/kota pantauan inflasi di Jawa Tengah, kecuali Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Rembang. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Semarang, sementara inflasi terendah terjadi di Kabupaten Rembang.

Inflasi pada periode laporan terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terutama komoditas cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beras. Peningkatan harga cabai rawit dan cabai merah disebabkan oleh penurunan produksi akibat cuaca ekstrem, sedangkan kenaikan harga daging ayam ras dan beras disebabkan oleh peningkatan permintaan sejalan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih masif. Lebih lanjut, peningkatan harga komoditas terjadi sejalan dengan permintaan yang meningkat selama periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Inflasi juga disumbang oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya seiring dengan ketegangan geopolitik dan pelonggaran kebijakan moneter di sejumlah negara yang meningkatkan harga emas global.

Perkembangan UMKM dan Stabilitas Sistem Keuangan



Penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah mengalami kontraksi lebih dalam. Kredit perbankan pada triwulan IV 2025 sebesar Rp384,01 triliun, atau terkontraksi 0,95% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 0,05% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, kontraksi pertumbuhan kredit didorong oleh kontraksi kredit modal kerja.

Penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi masih terkontraksi. Kredit perbankan Jawa Tengah untuk korporasi pada triwulan IV 2025 mencapai Rp79,45 triliun atau terkontraksi 4,87% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 2,30% (yoy). Secara sektoral, kontraksi kredit korporasi berasal dari kontraksi LU Industri Pengolahan dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Kredit konsumsi RT menyumbang 30,46% dari total kredit perbankan di Jawa Tengah. Kredit konsumsi RT tumbuh sebesar 4,74% (yoy) pada triwulan IV 2025, melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2025 sebesar 5,42% (yoy). Meskipun kredit konsumsi RT secara keseluruhan melambat, namun Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor tumbuh lebih cepat.

Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2025 terkontraksi. Kredit UMKM pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi sebesar 2,68% (yoy), lebih dalam daripada kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,28% (yoy). Kontraksi tersebut disebabkan kontraksi Kredit Modal Kerja UMKM.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



SKNBI mengalami perbaikan ditunjukkan oleh kontraksi yang semakin membaik, sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Sementara itu, transaksi RTGS tumbuh positif, mencerminkan peningkatan aktivitas pembayaran bernilai besar.

Penggunaan instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) menunjukkan kinerja solid, ditunjukkan oleh pertumbuhan transaksi kartu kredit yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh peningkatan transaksi belanja dan online, serta pembayaran tagihan. Sementara penggunaan kartu debit mencatat akselerasi terutama pada transaksi tunai yang merefleksikan tingginya kebutuhan transaksi masyarakat.

Dari sisi uang kartal, setoran dan tarikan bank menunjukkan *net outflow* yang dipengaruhi peningkatan kebutuhan likuiditas rumah tangga pada periode liburan HBKN Natal dan Tahun baru. **Digitalisasi terus menguat melalui perluasan *merchant* dan ekosistem QRIS yang mencapai lebih dari 2,2 juta *merchant*.** Pertumbuhan volume transaksi juga meningkat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi pada HBKN Natal dan Tahun Baru.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



Kinerja ketenagakerjaan di Jawa Tengah membaik dibandingkan tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah menurun dari 4,78% pada Agustus 2024 menjadi 4,66% pada Agustus 2025 seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian, industri, dan perdagangan.

Indeks penghasilan sedikit meningkat dari 108,48 pada triwulan III 2025 menjadi 109,46 pada triwulan IV 2025 dan masih berada pada level optimis (>100). Sedangkan, indeks ketersediaan lapangan kerja pada triwulan IV 2025 berada pada level 95,78 meningkat 14,01% dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di level 81,77.

Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 meningkat dibandingkan September 2025, tercermin dari kenaikan Indeks yang diterima petani (It) dan indeks yang dibayar petani (Ib), masing-masing mengalami peningkatan sebesar 2,01% dan 1,37%.

Prospek Perekonomian Daerah



Secara keseluruhan tahun, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh kuat dengan kisaran pertumbuhan sebesar 5,1 - 5,9% (yoy) terutama didukung oleh kinerja LU Pertanian. Kinerja LU Pertanian diperkirakan meningkat sejalan dengan target swasembada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan target produksi padi GKG yang meningkat sekitar 11,7% dari tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2026 pada sisi pengeluaran diperkirakan bersumber dari permintaan domestik yang tetap kuat, terutama pada sisi konsumsi domestik yang turut mendorong sektor perdagangan dan didukung dengan investasi yang lebih baik. Konsumsi domestik tumbuh didukung oleh keberlanjutan stimulus yang diberikan oleh Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat tetap kuat serta didukung oleh kenaikan upah dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.

Inflasi di tahun 2026 diperkirakan masih terjadi namun dengan *magnitude* yang lebih rendah dibandingkan tahun 2025 dan tetap akan berada pada sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Potensi peningkatan risiko inflasi bersumber dari komoditas emas perhiasan seiring dengan peningkatan harga emas global. Peningkatan permintaan aset *safe haven* oleh investor seiring dengan ketidakpastian global mendorong peningkatan harga emas dunia. Selain itu, beberapa harga komoditas pangan diperkirakan mencapai tingkat harga keseimbangan yang baru seiring dengan kenaikan harga produksi (harga pupuk dan harga pakan) dan harga pembelian gabah kering giling di tingkat petani. Lebih lanjut, realisasi program MBG yang lebih masif juga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi ke depan. Namun demikian, inflasi lebih tinggi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diproyeksikan tertahan seiring dengan efektivitas program swasembada pangan di Jawa Tengah.



Perkembangan Ekonomi Makro Regional

Ekonomi Jawa Tengah terakselerasi pada triwulan IV 2025 didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap kuat.



Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,84% (yoy), meningkat dibanding triwulan lalu sebesar 5,38% (yoy), serta lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,39% (yoy).



Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga merupakan sumber pertumbuhan utama ekonomi pada triwulan IV 2025. Pertumbuhan positif Konsumsi Rumah Tangga sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) berada pada level optimis (>100), yaitu sebesar 117,56, 103,16 dan 131,95.



Dari sisi lapangan usaha (LU), sumber pertumbuhan terbesar PDRB triwulan IV 2025 berasal dari industri pengolahan sejalan dengan permintaan domestik yang masih kuat seiring dengan momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta kontribusi industri manufaktur yang masih kuat.

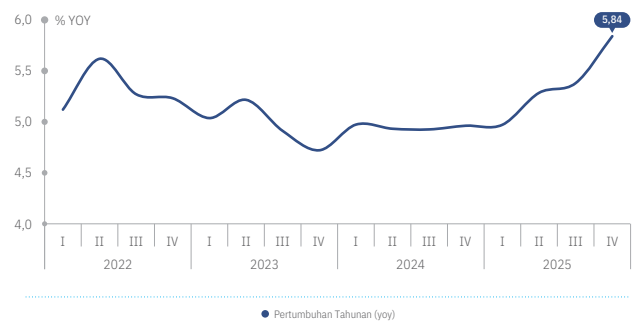
1.1 Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan IV 2025¹

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 sebesar 5,84% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,38% (yoy). Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,39% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi. Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh kinerja LU industri pengolahan dan LU konstruksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah secara triwulanan tumbuh sebesar 0,90% (qta) pada triwulan IV 2025, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulanan pada triwulan III 2025 sebesar 1,13% (qta).

Ekonomi Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,69% terhadap perekonomian Jawa. Jawa Tengah masih menjadi provinsi penyumbang keempat terbesar dalam perekonomian Kawasan Jawa, setelah DKI Jakarta (29,99%), Jawa Timur (25,64%), dan Jawa Barat (23,25%). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa sebesar 5,80% (yoy).

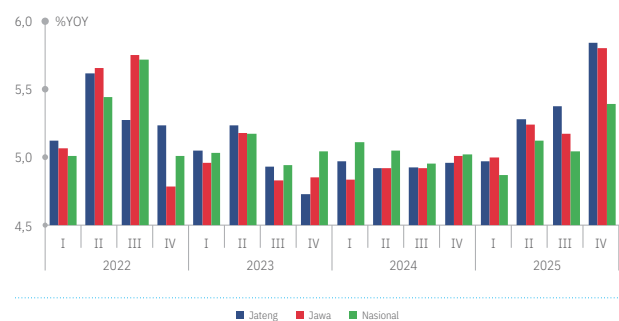
Aktivitas ekonomi Jawa Tengah yang terakselerasi pada triwulan IV 2025 bersumber dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu, pembiayaan perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih terbatas. Hal ini tercermin dari penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 yang mengalami kontraksi pertumbuhan terutama disebabkan oleh perlambatan kredit konsumsi dan penurunan kredit modal kerja. Kredit perbankan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 terkontraksi sebesar 0,95% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 0,05% (yoy). Demikian juga dengan kredit konsumsi yang melambat sebesar 4,74% (yoy) pada triwulan IV 2025, dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,42% (yoy). Penyaluran kredit konsumsi yang melemah terjadi karena aktivitas masyarakat pada libur panjang nasional di triwulan laporan secara umum tidak seramai periode yang sama tahun sebelumnya. Kredit modal kerja mengalami kontraksi sebesar 7,59% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 4,82% (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit modal kerja sejalan dengan perlambatan LU Konstruksi serta Industri Pengolahan.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah



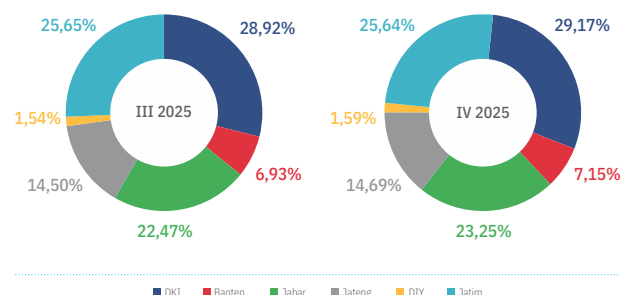
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi



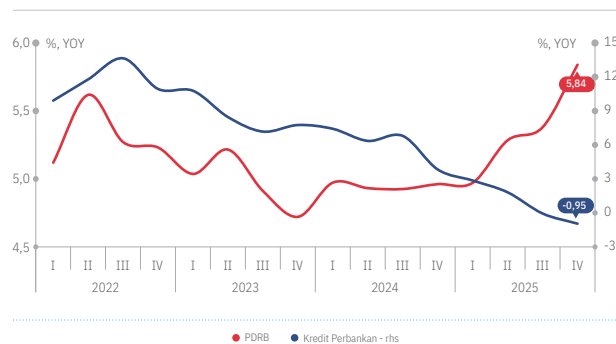
Sumber: BPS, diolah

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (% yoy)

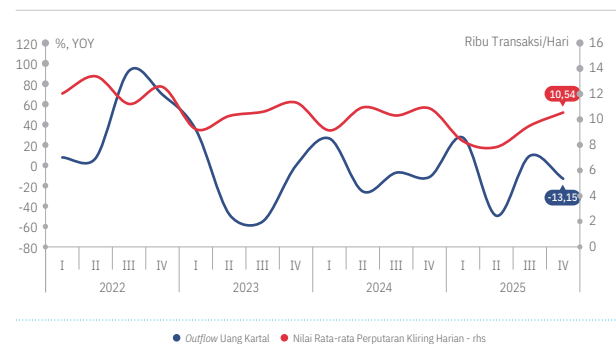
Provinsi	III 2025	IV 2025
DKI Jakarta	4,96	5,72
Banten	5,29	5,64
Jabar	5,20	5,85
Jateng	5,37	5,83
DIY	5,40	5,94
Jatim	5,22	5,85
Jawa	5,17	5,80

Sumber: BPS, diolah

1. Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah diambil dari Berita Resmi Statistik (BRS) Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dengan menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008 yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Tengah. Apabila terdapat perbedaan angka pertumbuhan tahunan yang tertera pada BRS periode saat ini dengan perhitungan ADHK periode sebelumnya, yang menjadi acuan dalam penulisan LPP adalah angka PDRB ADHK berdasarkan BRS pada saat periode terkini.

Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan *Outflow* Uang Kartal, dan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Berdasarkan sisi pengeluaran, mayoritas komponen utama PDRB menunjukkan pertumbuhan positif, yaitu Konsumsi Rumah Tangga (RT), Konsumsi Lembaga Nonprofit (LNPR), Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Ekspor Luar Negeri. Sementara itu, komponen PDRB sisi pengeluaran yang mengalami kontraksi adalah net ekspor antardaerah. Sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang terbesar pada triwulan IV 2025 adalah konsumsi rumah tangga dan investasi

dengan andil masing-masing sebesar 2,64% dan 1,93% serta pertumbuhan masing-masing sebesar 4,44% (yoy) dan 6,24% (yoy). Konsumsi RT tumbuh positif pada triwulan laporan meskipun melambat. Pertumbuhan positif Konsumsi RT ditopang oleh mobilisasi dan belanja masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Namun demikian, pengeluaran masyarakat pada triwulan laporan tidak sekuat pengeluaran pada triwulan dan tahun sebelumnya.

Tabel 1.2. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

Komponen Pengeluaran	2024*	2025**				2025**
		I	II	III	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	1.114.046	285.635	297.137	297.448	301.679	1.183.198
Konsumsi LNPR	25.220	6.389	6.626	6.726	6.802	26.545
Konsumsi Pemerintah	113.530	20.702	28.485	26.578	43.174	118.957
Investasi	555.015	136.420	145.220	155.004	162.735	600.731
Perubahan Inventori	12.415	3.860	4.020	4.121	(1.058)	10.934
Ekspor Luar Negeri	178.707	50.040	48.064	56.224	58.616	212.921
Impor Luar Negeri	251.775	57.746	66.170	70.987	73.336	268.238
Net Ekspor Antardaerah	70.618	27.651	19.938	15.362	(1.772)	58.140
PDRB	1.817.776	472.954	483.321	490.480	496.840	1.943.188

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah**Tabel 1.3.** PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

Komponen Pengeluaran	2024*	2025**				2025**
		I	II	III	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	685.307	175.254	180.514	180.601	181.695	718.064
Konsumsi LNPR	13.517	3.459	3.496	3.529	3.573	14.058
Konsumsi Pemerintah	64.870	11.743	16.030	15.002	24.241	67.015
Investasi	336.453	82.037	87.157	93.557	96.463	359.214
Perubahan Inventori	8.704	2.677	2.738	2.795	(717)	7.493
Ekspor Luar Negeri	117.268	31.152	30.140	35.367	36.554	133.212
Impor Luar Negeri	181.875	39.510	44.544	47.846	49.417	181.318
Net Ekspor Antardaerah	112.755	31.343	28.262	24.218	17.587	101.409
PDRB	1.156.999	298.153	303.794	307.222	309.980	1.219.149

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.4. Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Pengeluaran (% , YOY)

Komponen Pengeluaran	2024*	2025**				2025**
		I	II	III	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	5,15%	5,04%	4,83%	4,82%	4,44%	4,78%
Konsumsi LNPRT	16,13%	2,86%	3,86%	4,69%	4,60%	4,01%
Konsumsi Pemerintah	3,01%	-1,04%	-2,74%	4,86%	9,11%	3,31%
Investasi	6,55%	4,55%	8,65%	7,57%	6,24%	6,76%
Perubahan Inventori	-30,54%	-17,28%	-16,09%	-15,32%	-34,56%	-13,92%
Ekspor Luar Negeri	13,30%	9,68%	8,74%	17,23%	18,00%	13,60%
Impor Luar Negeri	14,37%	-8,24%	-1,85%	4,01%	4,18%	-0,31%
Net Ekspor Antardaerah	9,07%	-10,33%	-7,80%	-10,71%	-12,17%	-10,06%
P D R B	4,95%	4,96%	5,30%	5,38%	5,84%	5,37%

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.5. Andil Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Pengeluaran (% andil; yoy)

Komponen Pengeluaran	2024*	2025**				2025**
		I	II	III	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	3,05%	3,12%	2,88%	2,85%	2,64%	2,83%
Konsumsi LNPRT	0,17%	0,11%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%
Konsumsi Pemerintah	0,17%	-0,16%	-0,16%	0,24%	0,69%	0,19%
Investasi	1,88%	1,96%	2,40%	2,26%	1,93%	1,97%
Perubahan Inventori	-0,35%	-1,53%	-0,18%	-0,17%	0,13%	-0,10%
Ekspor Luar Negeri	1,25%	0,87%	0,84%	1,78%	1,90%	1,38%
Impor Luar Negeri	2,07%	1,10%	-0,29%	0,63%	0,68%	-0,05%
Net Ekspor Antardaerah	0,85%	1,69%	-0,83%	-1,00%	-0,83%	-0,98%

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Di sisi lain, kinerja investasi pada triwulan IV 2025 masih tetap tumbuh kuat didukung oleh peningkatan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Walaupun demikian, pertumbuhan investasi pada triwulan IV 2025 sebesar 6,24% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 7,57% (yoy). Lebih lanjut, pertumbuhan konsumsi pemerintah tumbuh menguat hingga 9,11% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,86% (yoy). Sementara itu, Pertumbuhan konsumsi LNPRT melambat dari sebesar 4,69% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 4,60% (yoy) pada triwulan laporan. Di sisi lain, kinerja ekspor luar negeri meningkat sejalan dengan kenaikan ekspor nonmigas. Sementara itu, net ekspor antar daerah mengalami kontraksi sebesar 12,17% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan III 2025 yang juga mengalami kontraksi sebesar 10,71% (yoy).

1.1.1.1. Pengeluaran Konsumsi

Secara agregat, pertumbuhan konsumsi domestik Jawa Tengah meningkat pada triwulan IV 2025 dibandingkan triwulan III 2025. Peningkatan pertumbuhan permintaan domestik ditopang oleh kinerja konsumsi pemerintah yang

meningkat di tengah pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat. Konsumsi pemerintah tumbuh hingga 9,11% (yoy) pada triwulan IV 2025, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,86% (yoy). Sementara itu, Konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 4,44% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,82% (yoy). Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 4,60% (yoy) pada triwulan IV 2025, juga melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,69% (yoy).

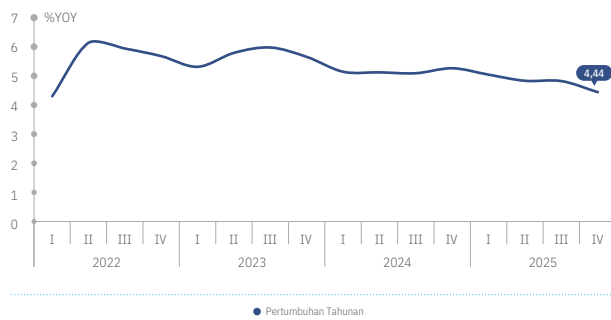
Konsumsi Rumah Tangga

Kinerja Triwulan IV 2025

Konsumsi rumah tangga sebagai komponen perekonomian terbesar tumbuh positif pada triwulan IV 2025. Pertumbuhan positif konsumsi rumah tangga didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap kuat meskipun pertumbuhannya tidak setinggi triwulan sebelumnya. Konsumsi masyarakat tetap kuat terutama pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selain itu, Pemerintah meluncurkan Program Diskon Tiket Transportasi Nasional pada periode libur Nataru dengan masa perjalanan 22 Desember 2025–10 Januari 2026 (khusus angkutan laut 17 Desember

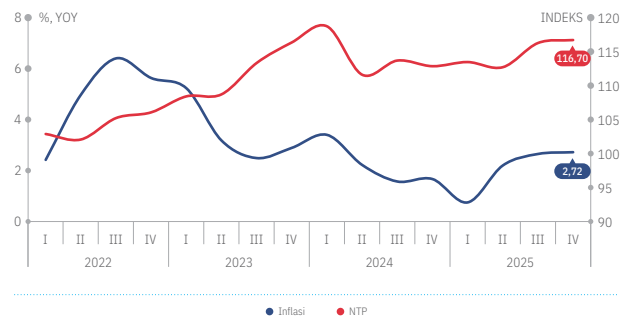
2. Kontributor utama perekonomian Jawa Tengah dari sisi permintaan adalah konsumsi RT (pangsa 60,72% pada triwulan IV 2025), PMTB atau investasi (pangsa 32,75% pada triwulan IV 2025), impor luar negeri (pangsa 14,76% pada triwulan IV 2025), ekspor luar negeri (pangsa 11,80% pada triwulan IV 2025) dan konsumsi pemerintah (pangsa 8,69% pada triwulan IV 2025).

Grafik 1.6 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga



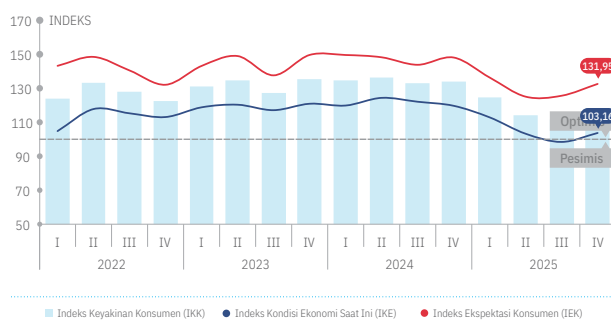
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.7 Perkembangan Inflasi dan NTP



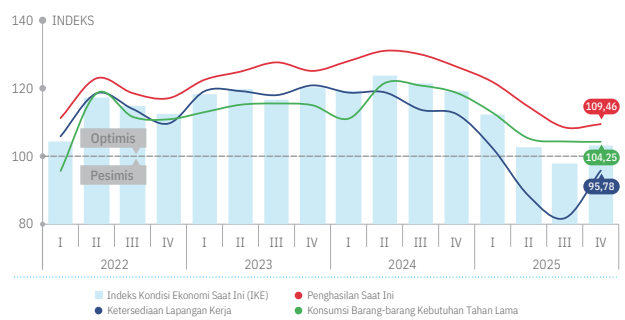
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.8 Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.9 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini



Sumber: Bank Indonesia, diolah

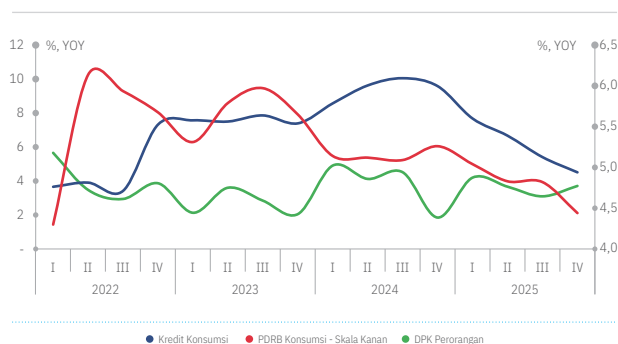
2025–10 Januari 2026). Kebijakan ini mencakup diskon 30% tiket kereta ekonomi oleh PT KAI bagi 1,51 juta penumpang, diskon 20% tarif dasar kapal kelas ekonomi oleh PT PELNI bagi 405,9 ribu penumpang, pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan oleh PT ASDP bagi sekitar 2,34 juta penumpang, serta diskon tiket pesawat 13–14% untuk sekitar 3,59 juta penumpang. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong mobilitas dan aktivitas ekonomi selama periode liburan. Belanja masyarakat yang masih kuat tercermin pada Indeks Penjualan Riil (IPR) di Jawa Tengah triwulan IV 2025 yang mencapai 71,48 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 69,18. Peningkatan IPR tersebut ditopang oleh penjualan komoditas makanan minuman dan perlengkapan rumah tangga.

Selain itu, hasil Survei Konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan peningkatan tingkat keyakinan konsumen dan tetap berada pada level optimis. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan IV 2025 mencapai 117,56 dan berada pada level optimis (>100), meningkat dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 110,92. Peningkatan indeks tersebut sejalan dengan peningkatan indeks komponen IKK, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) sebesar 103,16 serta Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 131,95. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi ke depan membaik. Beberapa hal yang mendasari optimisme konsumen adalah tingkat penghasilan saat ini dan konsumsi

barang kebutuhan tahan lama yang masih berada pada level optimis³. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang tetap kuat didorong oleh pengeluaran masyarakat yang didukung dengan berbagai insentif dari Pemerintah serta peningkatan konsumsi pada momentum (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Selain Program Diskon Tiket Transportasi Nasional, Pemerintah turut memberikan berbagai program untuk mendorong konsumsi masyarakat. Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi bertajuk skema 8+4+5 pada triwulan IV 2025 dengan total anggaran sekitar Rp16,23 triliun untuk menjaga daya beli, mempercepat pemulihan ekonomi, dan memperluas lapangan kerja. Paket ini terdiri dari 8 program akselerasi pada 2025, 4 program lanjutan pada 2026, serta 5 program penyerapan tenaga kerja. Pada triwulan IV 2025, program akselerasi mencakup antara lain perluasan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata dan padat karya, program magang bagi *fresh graduate*, bantuan pangan beras, serta program padat karya dan subsidi iuran jaminan sosial bagi pekerja transportasi daring. Selain itu, pemerintah juga mendorong dukungan sektor usaha melalui fasilitas pembiayaan perumahan BPJS Ketenagakerjaan, deregulasi perizinan usaha, serta pengembangan ekonomi perkotaan dan *gigaeconomy*.

3. Indeks penghasilan saat ini, indeks ketersediaan lapangan kerja, dan konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama dinyatakan optimis jika nilainya >100. Pada triwulan IV 2025, indeks penghasilan saat ini sebesar 109,46, indeks ketersediaan lapangan kerja sebesar 95,78, dan indeks konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama sebesar 104,25.

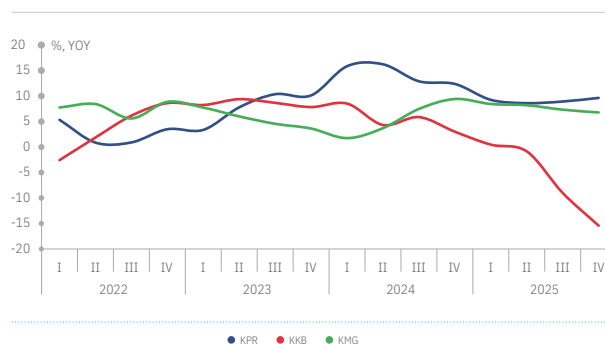
Grafik 1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Kinerja konsumsi rumah tangga yang melambat tercermin pada perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi, terutama perlambatan pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Multi Guna (KMG). Kredit konsumsi tumbuh sebesar 4,51% (yoy) pada triwulan IV 2025, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,41% (yoy). KKB pada triwulan laporan terkontraksi lebih dalam sebesar 15,44% (yoy), melanjutkan kontraksi sebesar 9,02% (yoy) pada triwulan III 2025. KMG tumbuh 6,77% (yoy) pada triwulan IV 2025, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,33% (yoy). Sementara, KPR pada triwulan IV 2025 tumbuh meningkat sebesar 9,63% (yoy), dibandingkan pertumbuhan pada triwulan III 2025 sebesar 8,92% (yoy).

Kinerja tahun 2025

Konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah pada tahun 2025 tetap tumbuh cukup tinggi sebesar 4,78% (yoy), meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,15% (yoy). Kondisi ini mencerminkan daya beli masyarakat relatif masih terjaga, meskipun laju peningkatannya tidak sekuat periode sebelumnya seiring dengan normalisasi aktivitas ekonomi dan meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam berbelanja. Konsumsi rumah tangga tetap ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat, aktivitas perdagangan dan jasa, serta berbagai momentum musiman seperti Ramadan, Idulfitri, dan libur akhir tahun. Selain itu, berbagai program stimulus pemerintah seperti bantuan sosial dan bantuan pangan, insentif pajak, serta berbagai program perlindungan sosial turut menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2025 turut memberikan tambahan pendapatan bagi pekerja formal sehingga menopang konsumsi. Namun demikian, beberapa sektor industri juga menghadapi tantangan pada proses produksi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga menahan laju pertumbuhan konsumsi masyarakat.

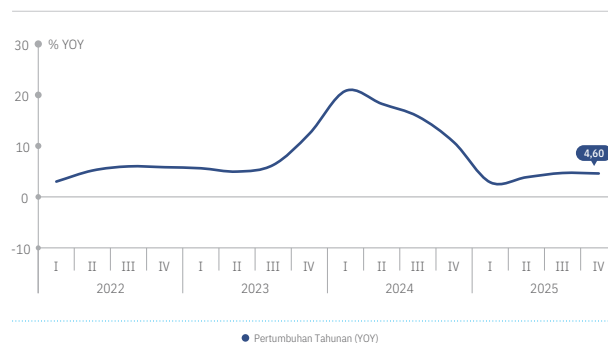
Grafik 1.11 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Konsumsi Lembaga NonProfit (LNPR)

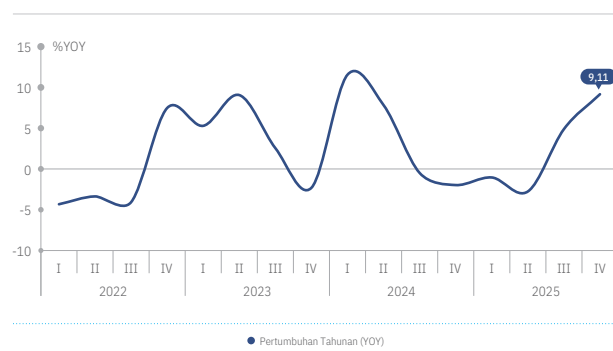
Kinerja Triwulan IV 2025

Konsumsi Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) pada triwulan IV 2025 tumbuh melambat. Konsumsi LNPR pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 4,60% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,69% (yoy). Aktivitas konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 tetap ditopang oleh berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat. Sejumlah agenda besar seperti rangkaian peringatan Hari Santri yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama di berbagai wilayah Jawa Tengah pada Oktober 2025, serta kegiatan Milad dan program “Bulan Ber-Muhammadiyah” yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah pada November–Desember 2025, turut mendorong aktivitas belanja lembaga untuk penyelenggaraan acara, konsumsi, logistik, dan dukungan operasional. Berbagai kegiatan tersebut juga melibatkan partisipasi masyarakat luas melalui kegiatan sosial, bazar UMKM, layanan kesehatan, serta kegiatan pendidikan dan dakwah. Namun demikian, peningkatan aktivitas tersebut relatif terbatas dibandingkan periode sebelumnya sehingga pertumbuhan konsumsi LNPR tercatat melambat. Hal ini sejalan dengan normalisasi kegiatan lembaga sosial keagamaan setelah tingginya aktivitas pada periode sebelumnya.

Grafik 1.12 Pertumbuhan Konsumsi LNPR

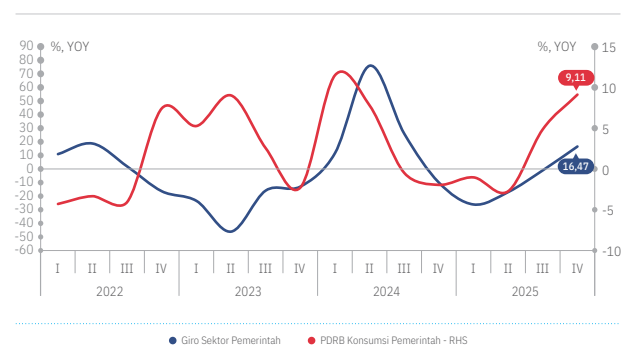
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.13 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.15 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



Sumber: Laporan Bank Umum, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Kinerja tahun 2025

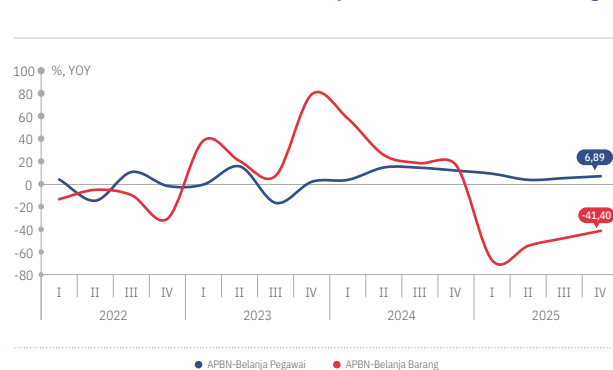
Kinerja konsumsi LNPR 2025 tumbuh sebesar 4,01% (yoy), melambat dibandingkan periode sebelumnya (16,24%; yoy). Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh faktor base effect, mengingat pada tahun sebelumnya aktivitas LNPR meningkat signifikan seiring dengan tingginya kegiatan sosial dan politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah 2024. Berbagai kegiatan kampanye, sosialisasi, mobilisasi relawan, serta aktivitas organisasi masyarakat dan lembaga sosial pada periode tersebut mendorong peningkatan pengeluaran lembaga nonprofit. Sementara itu, pada tahun 2025 aktivitas politik relatif lebih terbatas sehingga belanja lembaga nonprofit kembali normal. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan konsumsi LNPR tetap positif, namun tidak setinggi periode sebelumnya.

Konsumsi Pemerintah

Kinerja Triwulan IV 2025

Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 9,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,86% (yoy). Hal ini sejalan dengan penyaluran berbagai stimulus fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah pada triwulan IV 2025. Selain itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah yang tinggi juga didukung oleh capaian realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Grafik 1.14 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

di Provinsi Jawa Tengah hingga triwulan IV 2025 yang masih tinggi. Total realisasi belanja mencapai Rp105,60 triliun atau 96,38% dari pagu anggaran. Walaupun demikian, capaian tersebut lebih rendah dari tingkat penyerapan belanja pada triwulan IV 2024 yang mencapai 97,19% dari pagu. Hal ini mencerminkan adanya efisiensi dalam penyerapan anggaran.

Berdasarkan jenis belanja, belanja operasional mencatatkan realisasi sebesar Rp30,55 triliun atau 95,40% dari pagu. Belanja operasional tersebut didominasi oleh belanja pegawai dengan realisasi mencapai Rp18,20 triliun dan belanja barang dan jasa dengan realisasi mencapai Rp12,21 triliun. Lebih lanjut, realisasi belanja modal juga masih tinggi dengan realisasi mencapai Rp5,79 triliun atau 80,67% dari pagu. Sementara itu, belanja transfer mencatatkan realisasi sebesar Rp69,26 triliun atau 98,43% dari pagu. Walaupun persentase realisasi belanja APBN masih tinggi, realisasi pada triwulan IV 2025 secara nominal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan penurunan pagu anggaran belanja APBN pada tahun 2025.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 juga tetap kuat. Capaian realisasi belanja APBD Provinsi Jawa Tengah hingga triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp23,87 triliun atau 94,61% dari pagu. Capaian tersebut terutama ditopang oleh belanja operasi dengan realisasi sebesar Rp15,48 triliun atau 95,96% dari pagu dan belanja transfer dengan realisasi mencapai Rp6,58 triliun atau 93,11%.

Kinerja tahun 2025

Kinerja konsumsi pemerintah pada tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 3,31% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,01% (yoy). Peningkatan konsumsi pemerintah di tengah pagu anggaran pemerintah yang relatif lebih rendah mengindikasikan perbaikan efektivitas dan percepatan realisasi belanja pemerintah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah terutama didorong oleh pelaksanaan

berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), operasional Koperasi Desa Merah Putih, serta pengembangan Sekolah Rakyat yang meningkatkan belanja barang dan jasa pemerintah untuk mendukung layanan publik. Implementasi berbagai program tersebut mendorong akselerasi aktivitas belanja pemerintah, sehingga menopang pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 2025.

1.1.1.2. Investasi

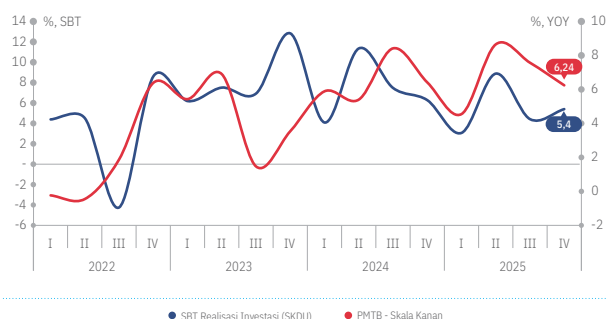
Kinerja Triwulan IV 2025

Kinerja investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 6,24% (yoy) pada triwulan IV 2025, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,57% (yoy). Perlambatan pertumbuhan investasi sejalan dengan perlambatan pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Konstruksi dari 7,11% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 6,85% (yoy) pada triwulan IV 2025. Walaupun melambat, kinerja investasi tetap kuat didorong oleh realisasi investasi di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai Rp22,37 triliun atau tumbuh 51,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi investasi pada triwulan III 2025 yang sebesar Rp22,55 triliun atau tumbuh 14,10% (yoy). Kinerja investasi yang tetap kuat terlihat pada hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) realisasi investasi, indikator SKDU, meningkat

dari 4,42% pada triwulan III 2025 menjadi 5,40% pada triwulan laporan. Dari sisi pembiayaan, kredit investasi berdasarkan lokasi proyek di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan. Kredit investasi pada triwulan laporan mengalami peningkatan dari terkontraksi sebesar 2,27% (yoy) pada triwulan III 2025, menjadi tumbuh sebesar 4,25% (yoy) pada triwulan IV 2025. Bank Indonesia terus bekerja sama dengan perbankan untuk mendorong realisasi kredit dalam rangka mendukung pembiayaan dan aktivitas dunia usaha.

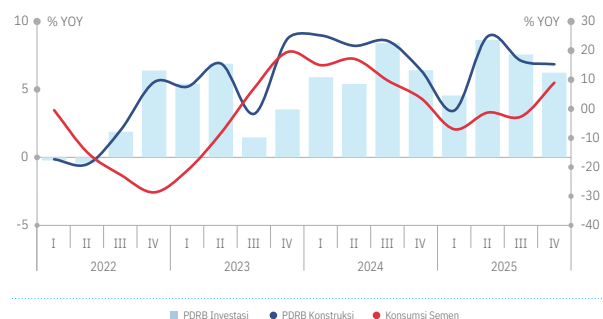
Realisasi investasi pada triwulan IV 2025 didominasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp14,00 triliun dengan pangsa 63%. Sementara itu, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp8,37 triliun. Lima daerah yang menjadi lokasi tertinggi PMA pada triwulan IV 2025 adalah Kabupaten Kendal (nilai investasi Rp5,85 triliun), Kabupaten Batang (Rp1,63 triliun), Kabupaten Demak (Rp1,29 triliun), Kabupaten Pekalongan (Rp0,78 triliun), dan Kabupaten Tegal (Rp0,62 triliun). Sektor usaha yang mencatatkan realisasi investasi PMA tertinggi pada triwulan IV 2025 adalah sektor industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam; industri barang dari kulit dan alas kaki; industri karet dan plastik; industri tekstil; dan industri lainnya. Hal ini seiring dengan perkembangan pesat kawasan industri di Jawa Tengah. Saat ini terdapat 2 (dua) kawasan ekonomi khusus (Kawasan Ekonomi Khusus Kendal Industrial

Grafik 1.16 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi



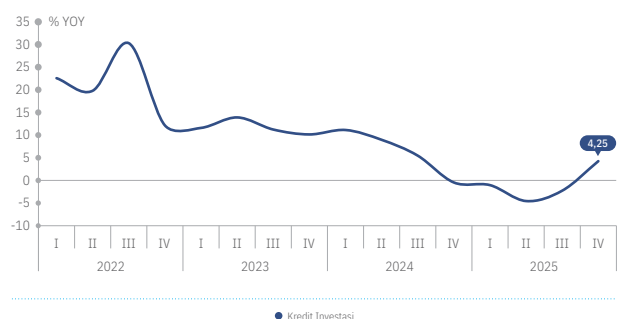
Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.18 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi, dan Konsumsi Semen



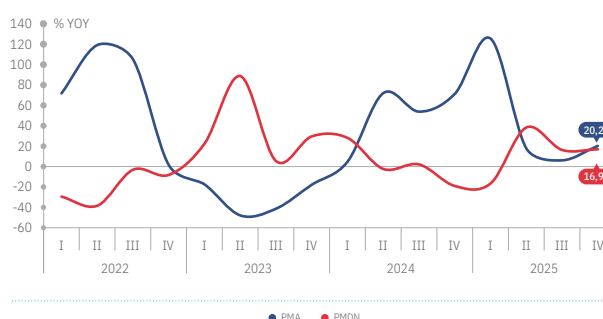
Sumber: ASI, BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.17 Pertumbuhan Kredit Investasi



Sumber: Laporan Bank Umum

Grafik 1.19 Pertumbuhan Realisasi PMA dan PMDN di Jawa Tengah



Sumber: BKPM

Park dan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Batang) dan 4 (empat) kawasan industri (Batang Industrial Park, Wijayakusuma Industrial Park, Jatengland Industrial Park Sayung, dan BSB Industrial Park) yang telah beroperasi dan masih dipromosikan di Jawa Tengah. Dari sisi PMDN, realisasi investasi mayoritas mengalir pada Kota Semarang (nilai investasi Rp1,85 triliun), Kabupaten Semarang (Rp1,07 triliun), Kabupaten Cilacap (Rp0,64 triliun), Kabupaten Kendal (Rp0,55 triliun), dan Kabupaten Batang (Rp0,43 triliun). Sementara itu, sektor usaha dengan realisasi investasi tertinggi pmdn pada triwulan laporan adalah sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran; industri makanan; listrik, gas dan air; konstruksi; dan industri tekstil.

Kinerja tahun 2025

Kinerja investasi pada 2025 tumbuh 6,76% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,55% (yoy). Pertumbuhan kinerja investasi terjadi baik pada investasi Pemerintah maupun swasta. Secara keseluruhan, investasi didominasi oleh PMA sebesar Rp50,86 triliun (pangsa 57,47%), sedangkan PMDN sebesar Rp37,64 triliun (pangsa 42,53%). Hongkong menjadi negara dengan realisasi investasi tertinggi di Jawa Tengah dengan realisasi investasi mencapai Rp12,92 triliun, disusul oleh Singapura (Rp11,43 triliun), Tiongkok (Rp10,13 triliun), Korea Selatan (Rp4,96 triliun), dan Samoa Barat (Rp2,96 triliun). Ketersediaan kawasan industri, kawasan peruntukan industri, serta tenaga kerja dengan upah yang kompetitif menjadi beberapa faktor penarik realisasi investasi di Jawa Tengah, khususnya investasi swasta.

1.1.1.3. Ekspor dan Impor Luar Negeri

Neraca perdagangan Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mengalami defisit sebesar US\$494,62 juta, lebih rendah dibandingkan defisit triwulan sebelumnya sebesar US\$586,15 juta. Defisit neraca perdagangan pada triwulan laporan disebabkan oleh defisit sektor migas sebesar US\$1.419,44 juta. Sementara, sektor non migas mengalami surplus pada triwulan IV 2025 sebesar US\$924,82 juta, lebih rendah dibandingkan surplus triwulan sebelumnya sebesar US\$980,28 juta.

1.1.1.3.1. Ekspor Luar Negeri

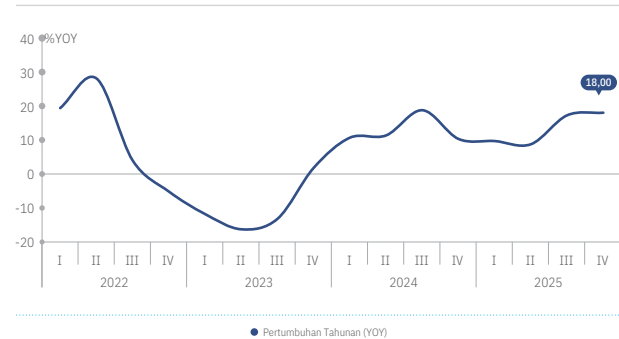
Kinerja tahun 2025

Ekspor luar negeri Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 18,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 17,23% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekspor didukung oleh peningkatan ekspor sub sektor alas kaki, bahan makanan, serta perbaikan ekspor sub sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Walaupun demikian,

ekspor sub sektor TPT masih mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya karena ada penurunan permintaan akibat tarif impor Amerika Serikat.

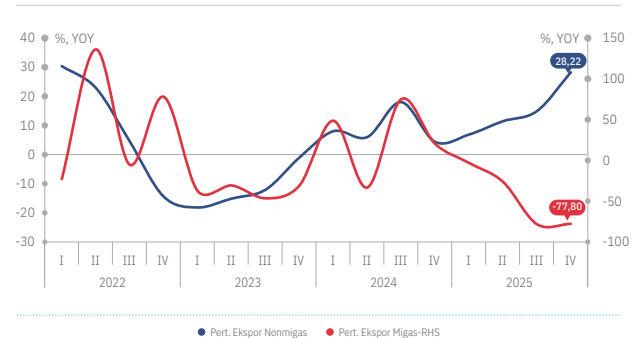
Ekspor luar negeri non migas Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 didominasi oleh komoditas tekstil dan produk tekstil (TPT)⁴ dengan pangsa mencapai 30,19%, alas kaki (pangsa 14,11%), serta mebel dan kayu olahan⁵ (pangsa 13,59%). Komposisi ini relatif persisten selama beberapa tahun terakhir.

Grafik 1.20 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri



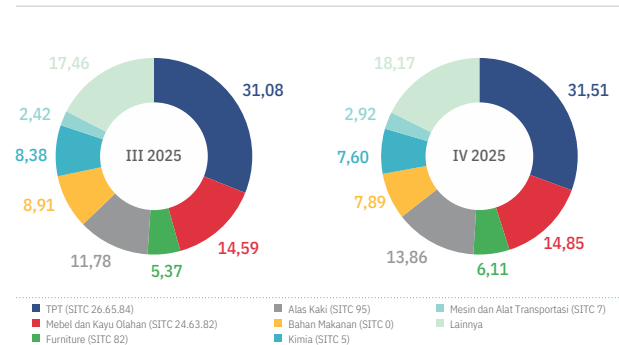
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.21 Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri Jawa Tengah per Jenis Komoditas



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.22 Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas Berdasarkan Komoditas



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

4. Komoditas tekstil dan produk tekstil terdiri dari SITC kode 26, 65, dan 84

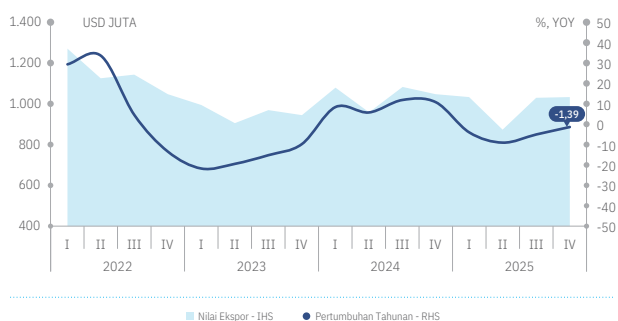
5. Komoditas mebel dan kayu olahan terdiri dari SITC 26, 63, dan 82

Sebagai komoditas ekspor dengan nilai pangsa terbesar di Jawa Tengah, pertumbuhan nominal ekspor TPT pada triwulan IV 2025 berkontraksi sebesar 1,39% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 5,05% (yoy). Sementara itu, ekspor mebel dan kayu olahan pada triwulan IV 2025 berkontraksi sebesar 0,64% (yoy) setelah tumbuh positif sebesar 3,59% (yoy). Di sisi lain, ekspor alas kaki tumbuh lebih tinggi dari 21,20% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi sebesar 22,10% (yoy) pada triwulan laporan.

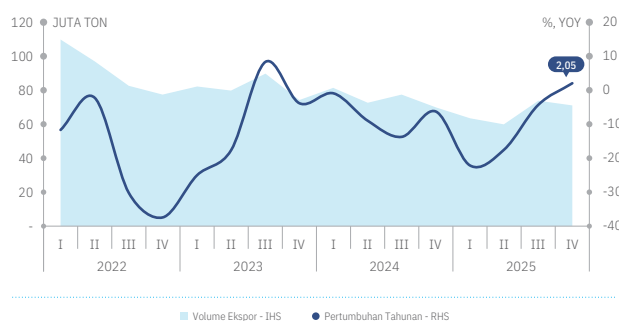
Berdasarkan mitra dagang utama, negara tujuan ekspor Jawa Tengah untuk ekspor nonmigas masih didominasi oleh Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Asean, dan Tiongkok dengan pangsa pada triwulan III 2025 masing-masing sebesar 46,80%,

11,63%, 7,73%, 6,63%, dan 6,00%. Mayoritas kinerja ekspor ke negara tujuan tumbuh melambat kecuali kinerja ekspor ke Jepang dan Tiongkok. Penjualan ekspor ke Jepang tumbuh meningkat dari 4,97% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 14,27% (yoy) pada triwulan IV 2025. Sementara itu, penjualan ekspor ke Tiongkok pada triwulan laporan mengalami perbaikan walaupun tetap berkontraksi sebesar 2,76% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan III 2025 yang berkontraksi 25,05% (yoy). Di sisi lain, kinerja penjualan ekspor ke negara tujuan lainnya, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan ASEAN mengalami perlambatan. Kinerja ekspor ke Amerika Serikat pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 36,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 46,25% (yoy). Kinerja ekspor ke Amerika Serikat yang tetap tumbuh positif sejalan dengan

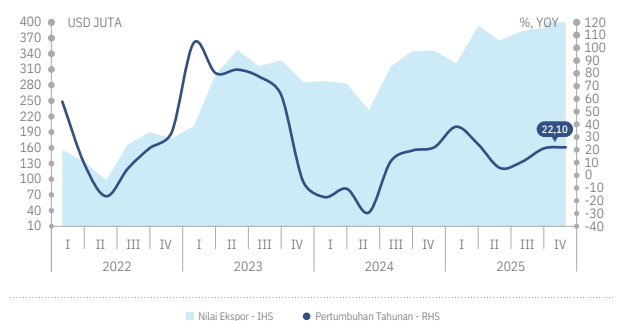
Grafik 1.23 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT



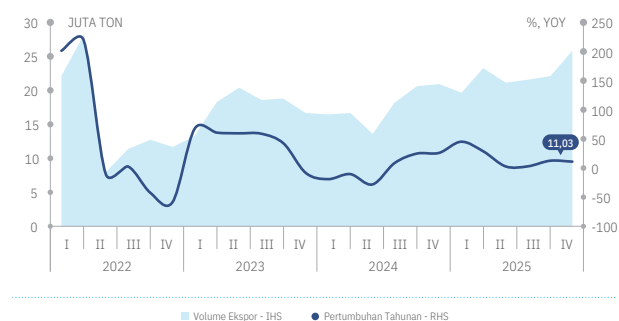
Grafik 1.24 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT



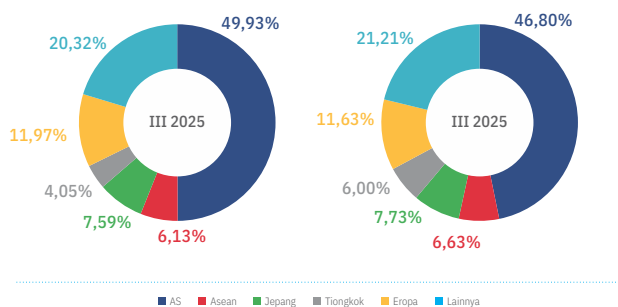
Grafik 1.25 Pertumbuhan Nilai Ekspor Alas Kaki



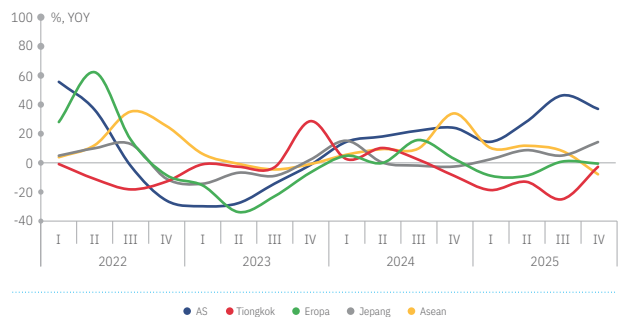
Grafik 1.26 Pertumbuhan Volume Ekspor Alas Kaki

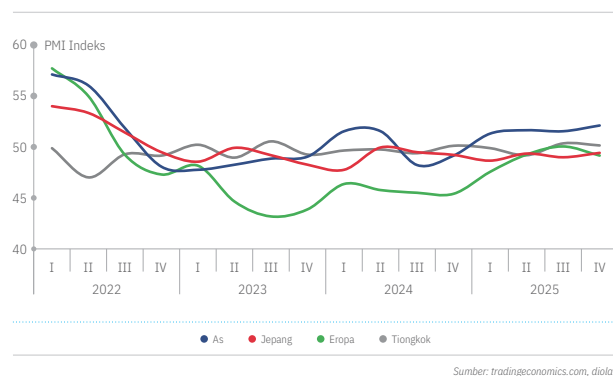


Grafik 1.27 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan



Grafik 1.28 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan



Grafik 1.29 *Prompt Manufacturing Index Negara Mitra Dagang Ekspor Jawa Tengah*

peningkatan penjualan ekspor sub sektor alas kaki, mebel dan kayu olahan, serta TPT. Kinerja ekspor ke Eropa terkontraksi pada triwulan IV 2025 sebesar 0,56% (yoy), setelah tumbuh positif sebesar 0,81% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Penjualan ekspor ke ASEAN pada triwulan laporan terkontraksi sebesar 7,92% (yoy), setelah tumbuh positif 8,17% (yoy) pada triwulan III 2025. Kinerja ekspor yang meningkat didorong oleh membaiknya permintaan dari sejumlah negara mitra dagang utama Jawa Tengah, khususnya Jepang dan Tiongkok. Selain itu, permintaan yang tetap kuat dari Amerika Serikat dan Eropa turut menopang kinerja ekspor tersebut. Kondisi ini tercermin dari *Prompt Manufacturing Index* (PMI) negara mitra dagang utama Jawa Tengah yang mayoritas berada pada zona ekspansif (>50). Hal tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas manufaktur di sejumlah negara tujuan ekspor masih tetap kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global yang relatif tinggi.

Kinerja tahun 2025

Secara keseluruhan tahun 2025, kinerja ekspor luar negeri meningkat sebesar 13,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,70% (yoy). Peningkatan kinerja ekspor terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor komoditas mesin dan alat transportasi, kimia, dan bahan makanan. Pada tahun 2025, ekspor mesin dan alat transportasi tumbuh sebesar 83,90% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 20,07% (yoy). Sementara itu, komoditas kimia juga meningkat pada tahun 2025 dengan tumbuh sebesar 126,68% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,37% (yoy). Di sisi lain, komoditas bahan maskanan juga mengalami peningkatan dengan tumbuh sebesar 14,39% (yoy), setelah mengalami kontraksi sebesar 1,97% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, kinerja ekspor luar negeri utamanya ditopang oleh ekspor ke Amerika Serikat dengan pangsa mencapai 47,54% (yoy), diikuti Eropa (12,74%), Jepang (7,94%), Asean (6,49%), dan Tiongkok (5,02%). Permintaan ekspor ke Amerika Serikat meningkat di tengah kebijakan tarif resiprokal yang

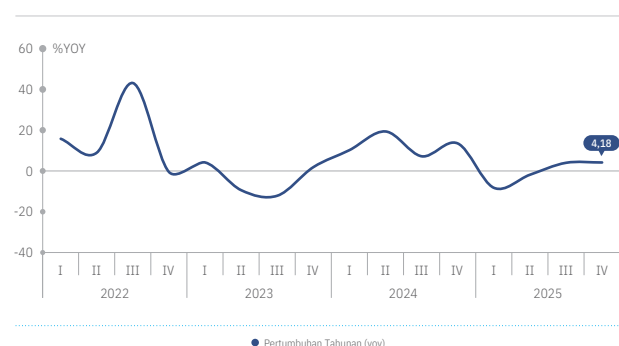
diterapkan Amerika Serikat. Ekspor ke Amerika Serikat tumbuh sebesar 31,48% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,56% (yoy).

1.1.1.3.2. Impor Luar Negeri

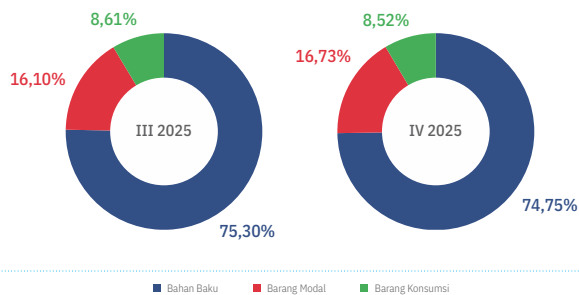
Impor luar negeri pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan impor non migas.

Impor luar negeri pada triwulan IV 2025 tumbuh positif sebesar 4,18% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,01% (yoy). Peningkatan pertumbuhan impor sejalan dengan peningkatan permintaan ekspor di tengah periode musim dingin triwulan IV 2025. Hal ini menunjukkan bahwa impor yang dilakukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi komoditas ekspor. Peningkatan impor juga sejalan dengan pertumbuhan impor non migas yang meningkat pada triwulan IV 2025 sebesar 47,60% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,82% (yoy). Sementara, impor migas mengalami penurunan dan masih mengalami kontraksi sebesar 4,60% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 3,09% (yoy).

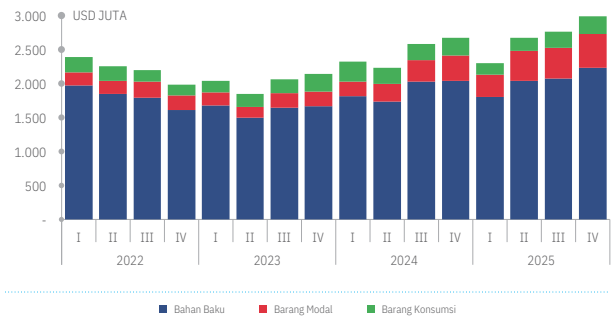
Impor non migas yang meningkat ditopang oleh impor bahan baku yang meningkat. Peningkatan pertumbuhan impor bahan baku sejalan dengan kinerja industri pengolahan yang tetap kuat. Impor bahan baku tumbuh sebesar 9,20% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,29% (yoy). Sementara itu, impor barang modal pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 36,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 41,05% (yoy). Lebih lanjut, impor barang modal pada triwulan laporan melambat sejalan dengan perlambatan kinerja investasi di Jawa Tengah. Di sisi lain, impor barang konsumsi pada triwulan laporan mengalami kontraksi sebesar 1,44% (yoy), setelah tumbuh positif sebesar 0,80% (yoy) pada triwulan III 2025.

Grafik 1.30 *Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri*

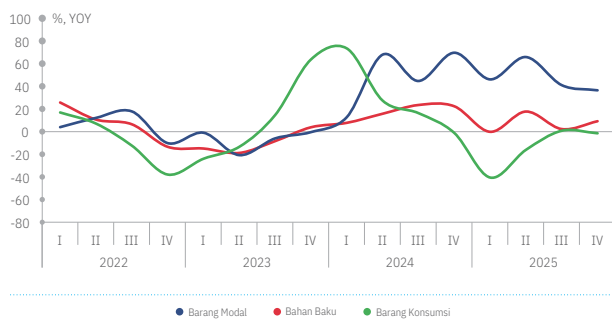
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.31 Struktur Impor LN Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran

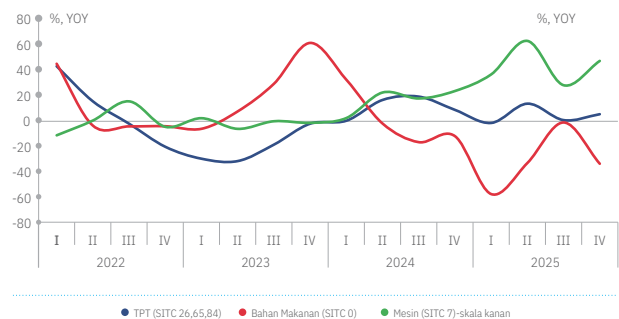
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.32 Perkembangan Nilai Impor LN Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran

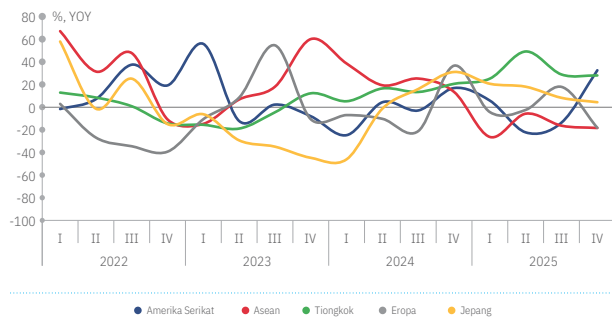
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.33 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

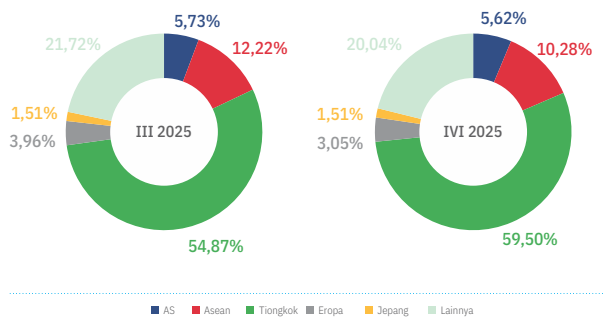
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.34 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

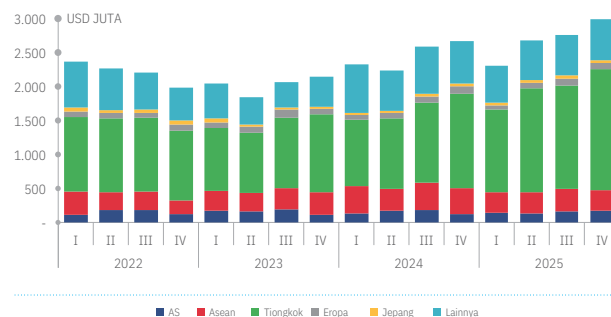
Grafik 1.35 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.36 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Berdasarkan negara asal, impor non migas Jawa Tengah terutama berasal dari Tiongkok (pangsa 59,50% dari total impor), ASEAN (10,28%), Amerika Serikat (5,62%), Eropa (3,05%), dan Jepang (1,51%). Kinerja impor negara mitra dagang utama Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mayoritas mengalami perlambatan. Hanya impor dari Amerika Serikat yang meningkat pada triwulan laporan sebesar 32,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang mengalami kontraksi sebesar 13,49% (yoy).

Grafik 1.37 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asa

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Kinerja tahun 2025

Secara keseluruhan tahun 2025, kinerja impor luar negeri terkontraksi sebesar 0,31% (yoy) pada tahun 2025, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh positif sebesar 12,44% (yoy). Penurunan pada impor disebabkan oleh kontraksi impor barang konsumsi sebesar 15,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 25,00% (yoy). Selain itu, penurunan impor juga didorong oleh melambatnya kinerja impor bahan baku yang tumbuh sebesar 7,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 17,38% (yoy), serta impor barang modal yang tumbuh sebesar 46,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 48,17% (yoy). Hal tersebut terjadi seiring dengan pelambatan kinerja sektor konstruksi di Jawa Tengah yang membutuhkan alat dan bahan baku impor.

1.1.1.4. Net Ekspor Antardaerah

Kinerja Triwulan IV 2025

Net ekspor antardaerah pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi sebesar 12,77% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 10,71% (yoy). Kontraksi disebabkan oleh peningkatan kebutuhan baku industri di Jawa Tengah, khususnya untuk memenuhi permintaan ekspor luar negeri. Hal ini sejalan dengan peningkatan kinerja ekspor luar negeri Jawa Tengah yang tumbuh hingga 18,00% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih tinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 17,23% (yoy). Kendati demikian, permintaan domestik dari daerah di Pulau Jawa masih kuat yang tercermin dari peningkatan konsumsi rumah tangga pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa.

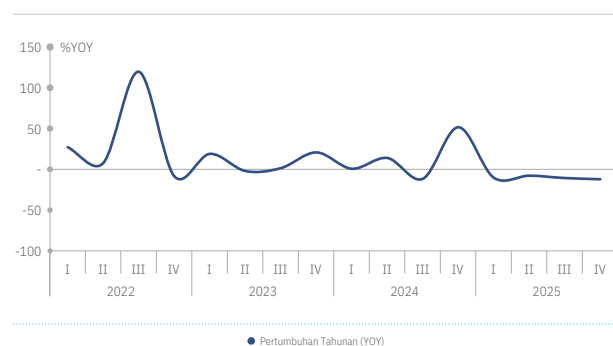
Kinerja tahun 2025

Kinerja net ekspor antardaerah pada 2025 terkontraksi sebesar 10,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,84% (yoy). Kontraksi didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku industri di Jawa Tengah, khususnya untuk memenuhi permintaan ekspor luar negeri. Hal ini sejalan dengan peningkatan kinerja ekspor luar negeri Jawa Tengah yang meningkat sebesar 13,60% (yoy) pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,70% (yoy). Kendati demikian, permintaan domestik dari daerah di Pulau Jawa masih kuat yang tercermin dari peningkatan konsumsi rumah tangga pada seluruh provinsi di Pulau Jawa selama tahun 2025.

1.1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

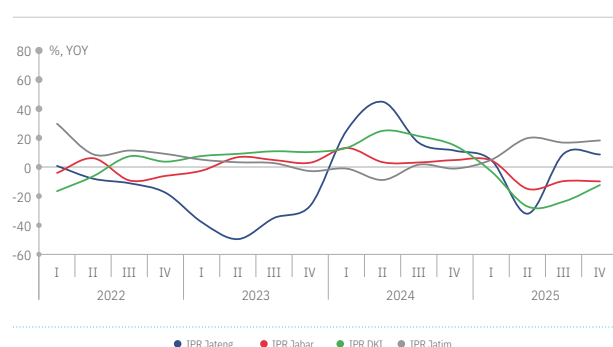
Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh pertumbuhan LU Perdagangan, LU Penyediaan Akmamin, dan LU Pertanian. LU Perdagangan tumbuh meningkat sebesar 5,26% (yoy) pada periode laporan sejalan dengan permintaan masyarakat pada momentum Nataru yang didorong oleh diskon dan promo besar-besaran. Selain itu, LU Penyediaan Akmamin tumbuh meningkat sebesar 13,97% (yoy) sejalan dengan peningkatan aktivitas pariwisata di Jawa Tengah, terutama setelah pembukaan rute penerbangan internasional Bandara Ahmad Yani ke Kuala Lumpur dan penambahan rute ke Singapura. LU Pertanian juga tercatat tumbuh meningkat sebesar 4,06% (yoy) setelah sebelumnya terkontraksi pada triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan kredit pertanian dan panen raya komoditas hortikultura di sejumlah wilayah sentra produksi. Sementara itu, LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 5,18% (yoy) sejalan dengan kontribusi industri manufaktur yang masih besar dan LU Konstruksi tumbuh sebesar 6,85% (yoy) sejalan dengan percepatan pembangunan serta preservasi infrastruktur jalan provinsi pada periode laporan.

Grafik 1. 38 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1. 39 Indeks Penjualan Riil



Sumber: Bank Indonesia, dialah

Tabel 1.6. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

Lapangan Usaha	2024*	2025**				2025**
		I	II	III	IV	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,39	15,13	1,17	-0,56	4,06	4,78
Pertambangan dan Penggalian	2,83	-0,79	1,85	2,50	5,17	2,21
Industri Pengolahan	3,52	0,68	4,46	5,97	5,18	4,06
Pengadaan Listrik dan Gas	6,96	11,98	-2,31	3,46	5,14	4,42
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,28	1,02	2,16	2,25	0,07	1,37
Konstruksi	7,97	3,45	8,90	7,11	6,85	6,62
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,15	4,03	4,64	4,56	5,26	4,63
Transportasi dan Pergudangan	5,56	9,78	7,36	6,91	3,27	6,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,03	7,52	9,19	11,59	13,97	10,60
Informasi dan Komunikasi	9,56	10,64	9,97	8,50	6,05	8,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,16	0,12	4,77	2,19	16,14	5,61
Real Estate	5,91	5,50	6,05	5,88	5,06	5,62
Jasa Perusahaan	9,15	8,41	7,95	7,80	7,29	7,86
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,53	1,18	-0,48	2,91	5,62	2,25
Jasa Pendidikan	8,53	7,68	7,44	7,01	4,02	6,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,28	6,33	5,03	5,06	3,68	5,01
Jasa lainnya	6,82	8,36	9,86	7,96	6,56	8,15
Produk Domestik Regional Bruto	4,95	4,96	5,30	5,38	5,84	5,37

*Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.7. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

Lapangan Usaha	2024*	2025**				2025**
		I	II	III	IV	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	133.163	37.380	35.903	34.568	31.680	139.530
Pertambangan dan Penggalian	21.833	5.237	5.522	5.823	5.733	22.315
Industri Pengolahan	373.838	95.056	96.799	98.456	98.716	389.027
Pengadaan Listrik dan Gas	1.388	360	341	371	377	1.449
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	801	200	204	204	204	812
Konstruksi	124.442	29.709	32.014	34.494	36.458	132.674
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	167.931	43.109	43.693	44.067	44.832	175.700
Transportasi dan Pergudangan	48.053	12.141	13.110	12.951	13.083	51.285
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46.670	12.293	12.761	12.903	13.660	51.617
Informasi dan Komunikasi	77.416	20.801	20.885	21.029	21.466	84.182
Jasa Keuangan dan Asuransi	28.900	7.426	7.560	7.588	7.945	30.519
Real Estate	22.764	5.849	5.958	6.068	6.167	24.043
Jasa Perusahaan	4.742	1.261	1.276	1.284	1.293	5.115
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	27.897	7.182	7.268	6.796	7.279	28.526
Jasa Pendidikan	45.530	11.939	12.087	12.187	12.279	48.492
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.022	2.837	2.887	2.903	2.947	11.574
Jasa lainnya	20.610	5.374	5.525	5.528	5.862	22.289
Produk Domestik Regional Bruto	1.156.999	298.153	303.794	307.222	309.980	1.219.149

*Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.8. Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha (% , YOY)

Lapangan Usaha	2024*	2025**				2025**
		I	II	III	IV	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,39	15,13	1,17	-0,56	4,06	4,78
Pertambangan dan Penggalian	2,83	-0,79	1,85	2,50	5,17	2,21
Industri Pengolahan	3,52	0,68	4,46	5,97	5,18	4,06
Pengadaan Listrik dan Gas	6,96	11,98	-2,31	3,46	5,14	4,42
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,28	1,02	2,16	2,25	0,07	1,37
Konstruksi	7,97	3,45	8,90	7,11	6,85	6,62
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,15	4,03	4,64	4,56	5,26	4,63
Transportasi dan Pergudangan	5,56	9,78	7,36	6,91	3,27	6,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,03	7,52	9,19	11,59	13,97	10,60
Informasi dan Komunikasi	9,56	10,64	9,97	8,50	6,05	8,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,16	0,12	4,77	2,19	16,14	5,61
Real Estate	5,91	5,50	6,05	5,88	5,06	5,62
Jasa Perusahaan	9,15	8,41	7,95	7,80	7,29	7,86
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,53	1,18	-0,48	2,91	5,62	2,25
Jasa Pendidikan	8,53	7,68	7,44	7,01	4,02	6,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,28	6,33	5,03	5,06	3,68	5,01
Jasa lainnya	6,82	8,36	9,86	7,96	6,56	8,15
Produk Domestik Regional Bruto	4,95	4,96	5,30	5,38	5,84	5,37

*Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

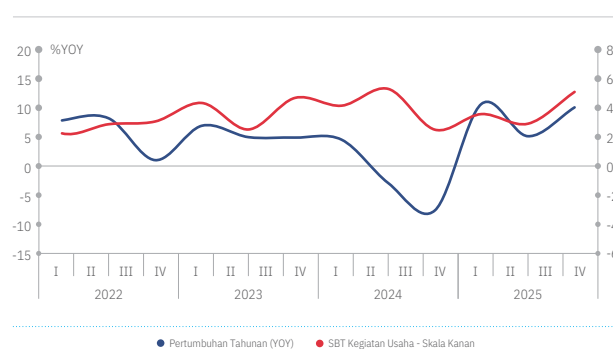
1.1.2.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja Triwulan IV 2025

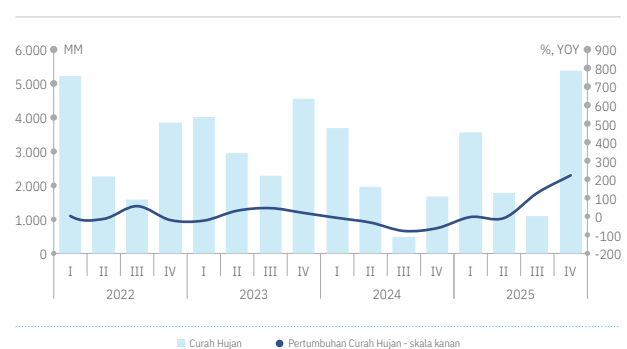
Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meningkat pada triwulan IV 2025 sejalan dengan peningkatan luas tanam padi dan panen raya komoditas hortikultura didukung oleh cuaca yang kondusif. LU Pertanian tumbuh sebesar 4,06% (yoy) pada triwulan IV 2025, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,56% (yoy). Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan luas tanam padi dan didukung dengan cuaca yang kondusif. Peningkatan kinerja LU Pertanian juga didorong oleh panen raya komoditas hortikultura terutama cabai dan bawang merah di sejumlah wilayah sentra produksi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Sejumlah daerah mencatatkan panen cabai yang

cukup luas, yakni di Temanggung, Banjarnegara, dan Magelang. Panen komoditas bawang merah juga meluas di wilayah sentra produksi, seperti di Brebes dan Demak.

Peningkatan luas tanam menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kinerja LU Pertanian. Data Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan luas tanam padi sebesar 8,92% (yoy) pada triwulan IV 2025 atau sebesar 699,28 ribu Ha. Luas tanam padi tersebut lebih tinggi dari luas tanam secara historis rata-rata pada triwulan IV yaitu sebesar 655,53 Ha. Pertumbuhan luas tanam pada periode laporan juga disebabkan oleh kondisi cuaca yang relatif lebih

Grafik 1.40 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sumber: BPS dan BI Provinsi Jawa Tengah

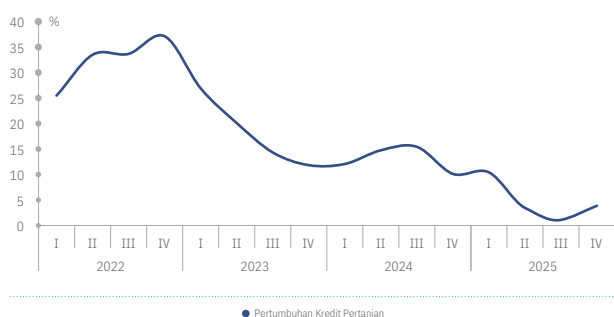
Grafik 1.41 Curah Hujan Di Jawa Tengah

Sumber: BMKG, diolah

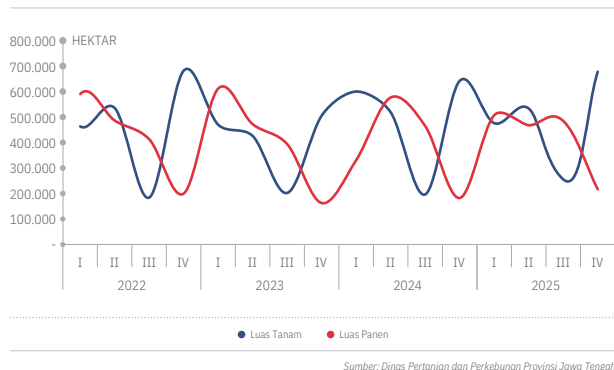
kondusif dibanding tahun sebelumnya serta didukung oleh upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi dampak bencana alam.

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia turut mencerminkan peningkatan kinerja LU Pertanian. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) SKDU LU Pertanian meningkat dari 1,48% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 3,67% (yoy) pada triwulan laporan.

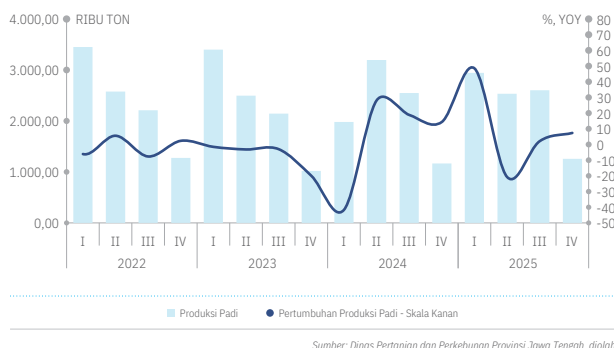
Grafik 1. 42 Perkembangan Kredit Pertanian



Grafik 1. 43 Pertumbuhan Luas Panen dan Produksi Padi di Jawa Tengah



Grafik 1. 44 Perkembangan Hasil Produksi Padi di Jawa Tengah



Penyaluran kredit pada LU Pertanian juga tercatat meningkat pada triwulan IV 2025. Kredit LU Pertanian berdasarkan lokasi proyek⁶ tumbuh meningkat dari 1,04% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 3,42% (yoy) pada triwulan IV 2025. Peningkatan kebutuhan sarana prasarana produksi di tengah peningkatan luas tanam padi menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan kredit LU Pertanian yang masih tinggi.

Kinerja tahun 2025

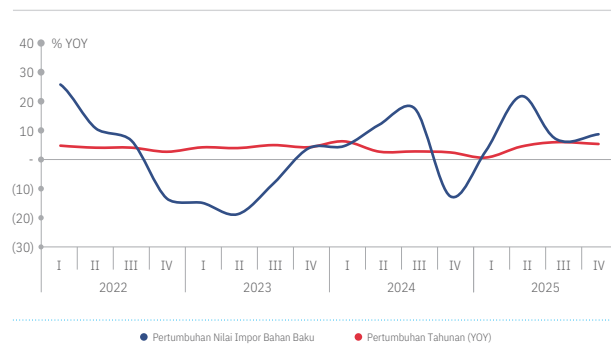
Secara keseluruhan tahun, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2025 meningkat, didukung dengan target luas tanam yang meningkat dan peningkatan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung program swasembada pangan. LU Pertanian tumbuh sebesar 4,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 3,39% (yoy). Peningkatan LU Pertanian ini sejalan dengan peningkatan luas panen padi pada tahun 2025 sebesar 7,73% (yoy) dari tahun 2024. Selain itu, produksi padi Gabah Kering Giling (GKG) juga meningkat sekitar 4,64% (yoy) pada tahun 2025. Secara tahunan curah hujan tercatat meningkat cukup tinggi pada tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya sehingga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah sentra produksi, namun demikian dampak negatifnya dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik sehingga tidak mengganggu produksi secara signifikan. Hal ini tercermin dari capaian produksi tanaman pangan Jawa Tengah yang melebihi target pemerintah pusat serta menempatkan Jawa Tengah sebagai tiga besar kontributor padi nasional, kontributor jagung terbesar kedua nasional, dan kontributor kedelai terbesar nasional.

1.1.2.2. Industri Pengolahan

Kinerja Triwulan IV 2025

LU Industri Pengolahan Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 tumbuh positif meskipun melambat, seiring dengan permintaan domestik yang tetap kuat. LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 5,18% (yoy) pada triwulan IV 2025 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,97% (yoy). Perlambatan pertumbuhan sejalan dengan penurunan aktivitas usaha industri pengolahan yang disebabkan *front loading* persiapan menyambut akhir tahun yang sudah dilakukan pada triwulan III 2025. Sementara itu, pertumbuhan positif ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat terutama pada momen libur Natal dan Tahun Baru sejalan dengan peningkatan konsumsi dan mobilitas masyarakat, serta persiapan produksi untuk Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri pada awal tahun 2026.

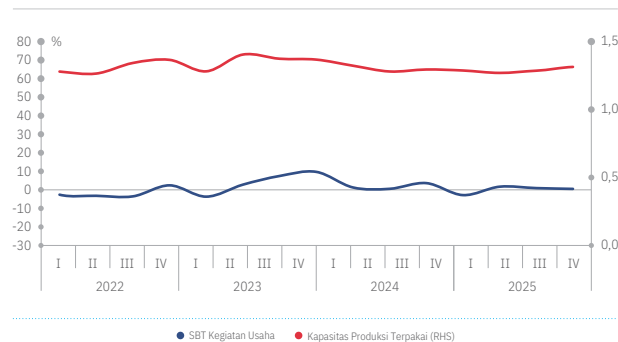
6. Data kredit yang digunakan berdasarkan lokasi proyek dengan tujuan untuk memperhitungkan output seluruh proyek yang diberikan kredit tidak terbatas pada lokasi banknya saja

Grafik 1.45 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Impor Bahan Baku Jawa Tengah

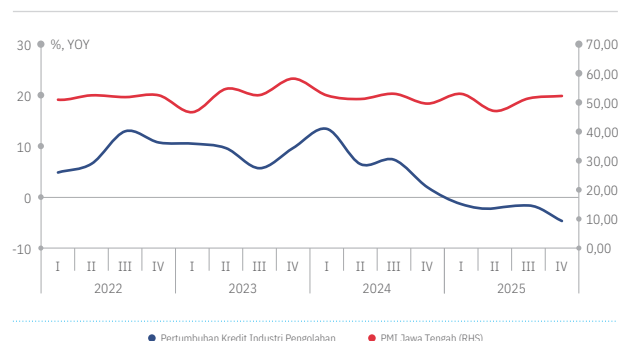
Sumber: BPS dan BI Provinsi Jawa Tengah

Hasil survei Bank Indonesia menunjukkan tantangan pada kegiatan usaha industri di Jawa Tengah pada periode laporan. Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), SBT kegiatan usaha industri pengolahan tumbuh melambat dari 0,51% pada triwulan III 2025 menjadi terkontraksi 0,69% (yoy) pada triwulan laporan. Indikator lainnya seperti kredit industri pengolahan lokasi proyek juga menunjukkan kontraksi sebesar 2,04%(yoy) pada triwulan III 2025 menjadi terkontraksi lebih dalam sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan laporan.

Namun demikian, kinerja industri manufaktur diharapkan tetap kuat didukung oleh permintaan domestik maupun ekspor yang terjaga. Sejalan dengan hal tersebut, *Prompt Manufacturing Index* (PMI) hasil SKDU Bank Indonesia juga

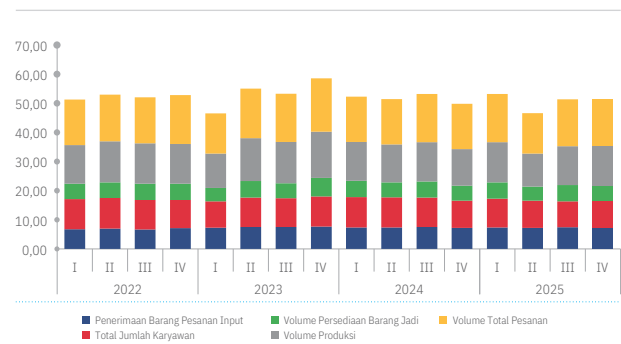
Grafik 1.46 SBT Kegiatan Usaha dan Kapasitas Produksi Terpakai

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.47 Pertumbuhan Kredit Industri Pengolahan dan PMI Jawa Tengah

Sumber: Bank Indonesia

7. PMI <50,00 dikategorikan masih dalam fase kontraksi, sedangkan PMI >50,00 termasuk fase ekspansi

Grafik 1.48 Perkembangan Volume Persediaan, Produksi, dan Total Pesanan Industri Pengolahan (Hasil SKDU)

masih meningkat meskipun terbatas pada level ekspansi⁷. PMI Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 52,01, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 51,36. PMI yang lebih tinggi menunjukkan kegiatan produksi yang mulai meningkat. Komponen pembentuk PMI Jawa Tengah pada triwulan laporan yang tercatat meningkat adalah total jumlah karyawan dan volume total pesanan, sedangkan komponen penerimaan barang pesanan input dan volume persediaan barang jadi menurun serta komponen volume produksi yang relatif sama dibanding triwulan sebelumnya. Sementara itu, impor bahan baku mengalami peningkatan pertumbuhan dari 2,29% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 9,20% (yoy) pada triwulan laporan. Kebutuhan bahan baku yang meningkat mengindikasikan mulai meningkatnya aktivitas produksi.

Kinerja LU Industri Pengolahan juga masih didukung permintaan domestik terkonfirmasi dari hasil liaison Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan penjualan domestik. *Likert Scale* (LS) penjualan domestik meningkat dari terkontraksi sebesar 0,34 pada triwulan III 2025 menjadi 0,40 pada triwulan laporan terutama pada LU Industri Pengolahan.

Kinerja tahun 2025

Secara keseluruhan tahun 2025, kinerja LU Industri Pengolahan meningkat disebabkan oleh permintaan ekspor dan domestik yang tetap kuat di tengah penerapan tarif resiproskal Amerika Serikat (AS). Kinerja Industri Pengolahan pada tahun 2025 tumbuh 4,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan kinerja tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,52%(yoy). Peningkatan tersebut ditopang oleh daya beli masyarakat yang tetap kuat seiring dengan sejumlah stimulus fiskal yang dialokasikan oleh Pemerintah dan peningkatan permintaan ekspor dari negara mitra dagang seiring dengan tingkat inflasi global yang terkendali. Peningkatan pertumbuhan juga didorong oleh peningkatan konektivitas antarwilayah seiring percepatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2025 yang menghubungkan Jawa Tengah dengan provinsi lain sehingga dapat meningkatkan efisiensi.

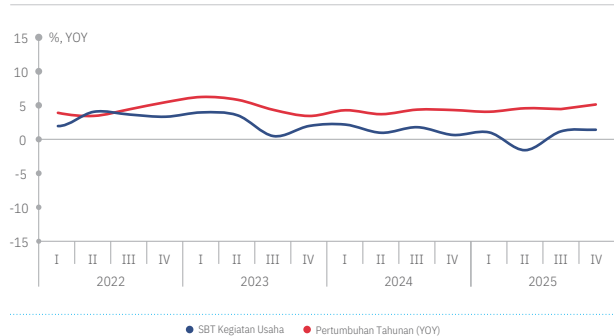
1.1.2.3. Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

Kinerja Triwulan IV 2025

Kinerja LU Perdagangan Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 tumbuh meningkat didorong oleh peningkatan penjualan yang tercermin pada Indeks Penjualan Riil (IPR) dan peningkatan kredit perdagangan. Kinerja LU Perdagangan tumbuh meningkat pada triwulan IV 2025 sebesar 5,26% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III 2025 sebesar 4,56% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan penjualan yang tercermin pada IPR Jawa Tengah yang tercatat meningkat dari 68,78 pada triwulan III 2025 menjadi sebesar 71,48 pada triwulan laporan. Peningkatan IPR terjadi pada mayoritas kelompok kecuali kategori peralatan informasi dan komunikasi serta sandang. Peningkatan kinerja sektor perdagangan juga didorong oleh pertumbuhan kredit perdagangan, dari terkontraksi sebesar 4,00% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi terkontraksi sebesar 2,42% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Multi Guna (KMG) pada triwulan laporan tercatat melambat yang mengindikasikan adanya perilaku kredit masyarakat serta sikap kehati-hatian-harian masyarakat dalam melakukan konsumsi barang tahan lama (*durable goods*) dan lebih mengutamakan konsumsi barang kebutuhan sehari-hari (*non-durable goods*).

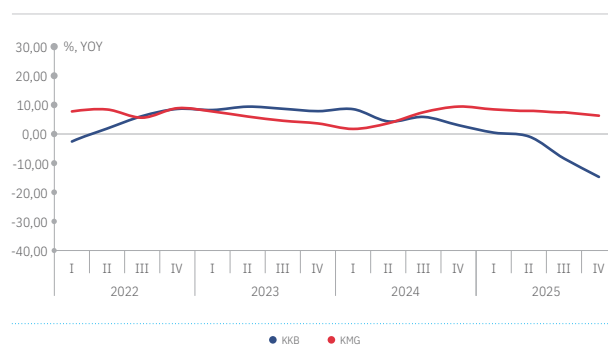
Peningkatan kinerja LU Perdagangan tercermin pada SBT kegiatan usaha dan penjualan domestik yang meningkat pada triwulan laporan. SBT kegiatan usaha perdagangan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,00% (yoy), meningkat dibandingkan SBT triwulan sebelumnya sebesar 1,17% (yoy). Selain itu, berdasarkan hasil *liaison* Bank Indonesia, LS penjualan domestik sektor perdagangan juga tercatat meningkat dari terkontraksi sebesar 0,80 pada triwulan III 2025 menjadi 0,42 pada triwulan laporan. Peningkatan penjualan pada triwulan laporan didorong oleh daya beli masyarakat yang kuat pada HBKN Natal dan libur panjang serta diskon besar-besaran dari ritel modern.

Grafik 1. 49 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor dan SBT Kegiatan Usaha



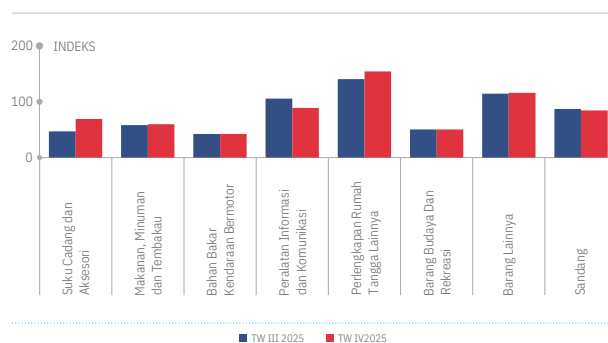
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1. 50 Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor dan Kredit Multi Guna



Sumber: BI Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.51 Komponen Pembentuk IPR Jawa Tengah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, diolah

Peningkatan LU Perdagangan ditopang oleh peningkatan IPR pada seluruh kelompok kecuali kelompok peralatan informasi dan komunikasi serta sandang. IPR kelompok bahan bakar kendaraan bermotor mengalami peningkatan penjualan tertinggi dari 41,91 pada triwulan III 2025 menjadi 45,53 pada triwulan laporan. IPR kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mencatatkan peningkatan penjualan tertinggi dari 59,38 pada triwulan III 2025 menjadi 62,54 pada triwulan laporan. Kelompok dengan peningkatan penjualan terendah adalah suku cadang dan aksesoris dari sebesar 55,83 pada triwulan III 2025 menjadi 56,49 pada triwulan laporan. Sementara itu, kelompok peralatan informasi dan komunikasi serta sandang mencatatkan penurunan penjualan pada triwulan laporan.

Kinerja tahun 2025

Secara keseluruhan tahun 2025, kinerja LU Perdagangan meningkat, terutama didorong oleh kenaikan pendapatan dan sejumlah stimulus fiskal yang diberikan oleh Pemerintah. LU Perdagangan tumbuh sebesar 4,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 4,15% (yoy). Kinerja LU Perdagangan yang meningkat sejalan dengan Konsumsi RT yang membaik didorong oleh kenaikan pendapatan, antara lain kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah sebesar 6,5%, kenaikan gaji guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan

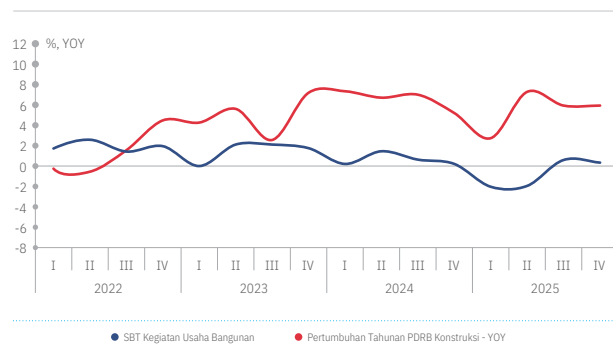
Polri serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sudah dianggarkan dalam RAPBN 2025. Selain itu, konsumsi RT masyarakat pada tahun 2025 juga tetap kuat tercermin dari hasil SK yang tetap berada pada level optimis (>100) dan didorong oleh sejumlah stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung daya beli masyarakat.

1.1.2.3. Konstruksi

Kinerja Triwulan IV 2025

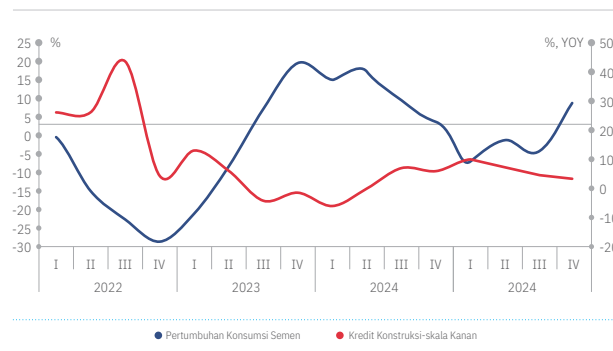
Kinerja LU Konstruksi pada triwulan IV 2025 tetap tumbuh kuat seiring dengan penyelesaian proyek strategis di Jawa Tengah. LU Konstruksi tumbuh positif meskipun melambat, dari 7,11% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 6,85% (yoy) pada triwulan IV 2025. Perlambatan pertumbuhan tersebut sejalan dengan penurunan SBT kegiatan usaha LU Konstruksi dari 0,59% pada triwulan III 2025 menjadi 0,40% pada triwulan laporan. Percepatan penyelesaian proyek telah dilakukan pada triwulan III 2025 sehingga kegiatan usaha konstruksi tidak begitu masif pada triwulan laporan. Dari sisi perbankan, realisasi kredit konstruksi juga tercatat melambat pada triwulan laporan sejalan dengan penurunan aktivitas usaha konstruksi. Kredit konstruksi berdasarkan lokasi proyek tumbuh melambat dari 4,32% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 3,62% (yoy) pada triwulan IV 2025. Namun demikian, kinerja LU Konstruksi yang tetap kuat didukung oleh penjualan domestik yang masih terjaga. Hal ini

Grafik 1. 52 Pertumbuhan PDRB dan SBT Konstruksi



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1. 53 Pertumbuhan Konsumsi Semen dan Kredit Konstruksi



Sumber : Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

tercermin dari hasil *liaison* yang menunjukkan LS penjualan domestik mengalami perbaikan dari terkontraksi sebesar 2,50 pada triwulan III 2025 menjadi 0,00 pada triwulan laporan. Selain itu, pertumbuhan konsumsi semen juga mengalami perbaikan dari terkontraksi sebesar 2,67% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 8,96% (yoy) pada triwulan laporan.

Kinerja tahun 2025

Secara keseluruhan tahun 2025, LU Konstruksi melambat dibanding tahun sebelumnya seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran yang berimbas pada proyek pembangunan infrastruktur pemerintah. LU Konstruksi tumbuh sebesar 6,62% (yoy), melambat dibandingkan pada tahun 2024 yang tumbuh sebesar 7,97% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pada Kementerian/Lembaga termasuk anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dipangkas cukup besar pada tahun 2025. Anggaran Kementerian PU dipangkas sebesar Rp 81,38 Triliun dari pagu total Rp 110,95 Triliun atau sekitar 73% menjadi Rp29,57 Triliun pada tahun 2025. Hal ini mengakibatkan penyesuaian proyek strategis pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah. Selain itu, adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp127,9 Miliar berdampak pada sektor infrastruktur, khususnya proyek yang didanai APBN. Kinerja LU Konstruksi tetap tumbuh positif didorong oleh investasi yang masuk ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) serta kebijakan relaksasi Loan to Value (LTV) hingga 31 Desember 2025 yang memungkinkan masyarakat membeli properti dengan uang muka 0% berlaku untuk semua jenis properti.

1.1.2.5. Lapangan Usaha Lainnya

LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) tumbuh meningkat pada triwulan laporan. LU Akmamin pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 13,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 11,59% (yoy). Percepatan pertumbuhan didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat yang lebih masif pada momentum libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, peningkatan kinerja LU Akmamin juga didorong oleh peningkatan aktivitas pariwisata di Jawa Tengah, terutama pasca penambahan rute penerbangan internasional Bandara Ahmad Yani ke Singapura pada triwulan IV 2025. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Jawa Tengah juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 44,67% pada triwulan III 2025 menjadi 49,17% pada triwulan laporan. Selain itu, berbagai event dan festival yang diselenggarakan di Jawa Tengah juga menarik lebih banyak wisatawan dan dapat mendorong kinerja Akmamin. Jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) tercatat menunjukkan tren positif dengan kenaikan 2,11% (yoy) dibandingkan periode libur Nataru 2024.

LU Informasi dan Komunikasi (Infokom) menunjukkan perlambatan pertumbuhan pada triwulan IV 2025. LU Infokom tumbuh positif sebesar 6,05% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 8,50% (yoy). Hal tersebut juga tercermin pada perlambatan SBT Infokom, dari 0,63% pada triwulan III 2025 menjadi 0,42% pada triwulan laporan. Kinerja LU Infokom yang melambat disebabkan oleh alokasi belanja pemerintah untuk teknologi informasi, server, dan proyek digital yang masih tertahan seiring dengan fokus anggaran untuk program lainnya, terutama penanganan bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah pada akhir 2025. Perlambatan kinerja LU Infokom ini juga sejalan dengan perlambatan Konsumsi RT pada triwulan laporan yang dapat berdampak pada permintaan terhadap layanan telekomunikasi premium maupun jasa digital.

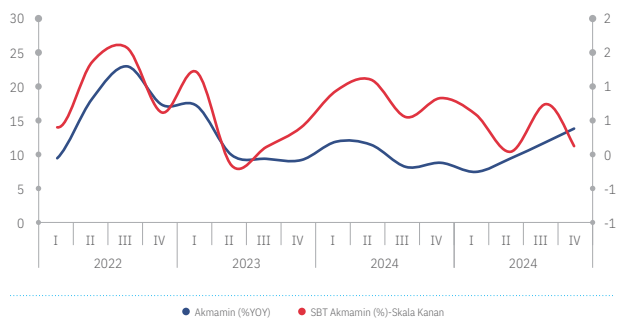
LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud) juga tumbuh melambat meskipun tetap positif pada triwulan IV 2025. LU Transgud tumbuh sebesar 3,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,91% (yoy). Perlambatan kinerja LU Transgud sejalan dengan terjadinya bencana alam pada sejumlah wilayah di Jawa Tengah sehingga dapat berdampak pada mobilitas transportasi dan logistik. Meskipun tumbuh melambat, momentum HBKN Natal dan Tahun Baru yang berlangsung pada akhir triwulan IV 2025 dapat

mendorong peningkatan kebutuhan transportasi, pengiriman barang, dan aktivitas pergudangan pada akhir tahun.

Lebih lanjut, kinerja LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pada triwulan IV 2025 juga tumbuh melambat. LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pada triwulan laporan tumbuh sebesar 3,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 5,06% (yoy). Perlambatan LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sejalan dengan kurangnya fokus konsumsi masyarakat pada aspek kesehatan menjelang akhir tahun. Alokasi konsumsi lebih banyak dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rekreasi/hiburan. Selain itu, **LU Jasa Pendidikan juga tumbuh melambat pada triwulan laporan.** LU Jasa Pendidikan pada triwulan laporan tumbuh sebesar 4,02% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,01% (yoy).

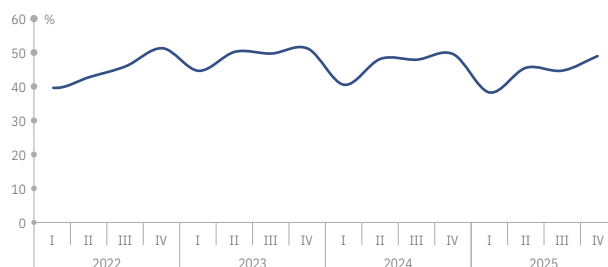
Sementara itu, kinerja LU Jasa Keuangan dan Asuransi mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV 2025. LU Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh meningkat sebesar 16,14% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,19% (yoy). Pertumbuhan LU Jasa Keuangan dan Asuransi yang tertinggi pada periode laporan ini sejalan dengan peningkatan output bank umum sebesar 4,58% dan peningkatan pendapatan asuransi sebesar 42,4%.

Grafik 1. 54 PDRB Sektor Akomodasi Mamin (yoy) dan SBT



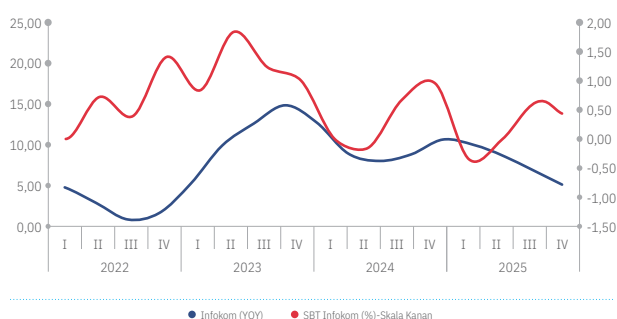
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1. 55 TPK Hotel Bintang Jawa Tengah



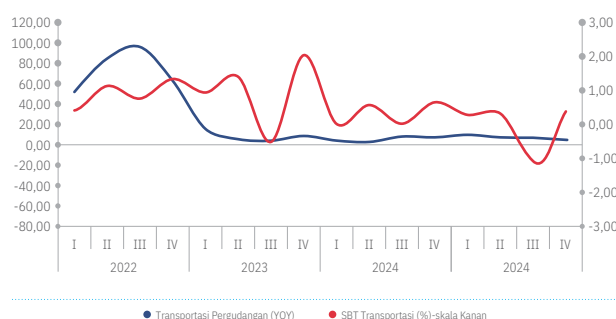
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1. 56 PDRB Sektor Infokom (yoy) dan SBT Infokom



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1. 57 PDRB Sektor Transportasi (yoy) dan SBT Transportasi



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Kinerja Tahun 2025 - Lapangan Usaha Lainnya

Secara umum, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2025 dari tahun 2024, dibandingkan LU lainnya. LU Penyediaan Akomamin tumbuh sebesar 10,60% (yoy) pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 10,03% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan jumlah wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Jawa Tengah sepanjang tahun 2025 masing-masing sebesar 22% (yoy) dan 28% (yoy) dibandingkan tahun 2024. Destinasi wisata di Jawa Tengah yang menjadi pilihan utama para wisnus dan wisman antara lain Masjid Syeikh Zayed Surakarta, Kota Lama Semarang, Kawasan Candi Prambanan Klaten, Kawasan Candi Borobudur Magelang, dan Kawasan Dataran Tinggi Dieng Banjarnegara.

BOKS 1

KEK Industropolis Batang sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah di Tengah Tantangan Global

Ketahanan Investasi Jawa Tengah di untuk Penguatan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia pada 2025 menghadapi tekanan global yang kompleks, mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur yang mengganggu rantai pasok energi dan pangan, hingga meningkatnya proteksionisme dagang negara maju berbasis isu lingkungan. Fragmentasi perdagangan dan arus modal global turut mempersempit ruang gerak negara berkembang. Di sisi domestik, tantangan struktural masih terlihat pada terbatasnya daya beli masyarakat, lemahnya daya saing industri manufaktur padat karya, serta meningkatnya risiko iklim akibat fenomena El Nino dan La Nina yang mengancam ketahanan pangan dan stabilitas inflasi. Di tengah tekanan tersebut, kinerja investasi nasional menunjukkan ketahanan yang kuat. Realisasi investasi sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target nasional dan tumbuh 12,7% (yoy). Realisasi investasi ini menyerap hingga 2,71 juta tenaga kerja dengan komposisi investasi PMA 46,6% dan PMDN 53,4%. Persebaran investasi relatif seimbang antara luar Pulau Jawa (51,3%) dan Pulau Jawa (48,7%) (BKPM, 2026).

Sejalan dengan capaian nasional yang positif, Provinsi Jawa Tengah mencatat kinerja investasi tertinggi sepanjang sejarah dengan realisasi Rp88,50 triliun pada 2025, meningkat 28,88% dibanding tahun sebelumnya. Nilai tersebut terdiri atas sebesar PMA Rp50,86 triliun dan PMDN sebesar Rp37,64 triliun, dengan total 105.078 proyek serta penyerapan tenaga kerja 418.138 orang. Investasi didominasi sektor industri pengolahan seperti alas kaki, mesin dan elektronik, karet dan plastik, tekstil, serta kawasan industri dan perkantoran. Investasi Usaha Mikro

dan Kecil (UMK) mencapai Rp22,14 triliun dan tumbuh 12%, menunjukkan karakter pertumbuhan yang semakin inklusif (DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, 2026).

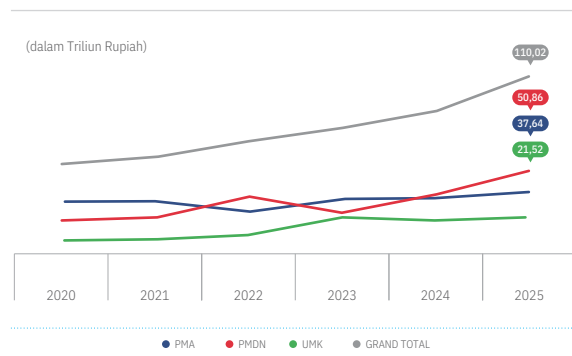
Secara umum, pertumbuhan investasi daerah merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi karena berpotensi meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi regional. Peningkatan arus modal yang terarah juga menjadi prasyarat terciptanya transformasi ekonomi dari sektor tradisional menuju sektor industri dan jasa bernilai tambah tinggi. Kabupaten Batang menjadi salah satu kontributor utama investasi di Jawa Tengah dengan estimasi realisasi Rp7 triliun pada 2025, melampaui target RPJMD sebesar Rp6 triliun. Investasi tersebut didominasi oleh PMA sebesar Rp5,14 triliun dan PMDN Rp1,86 triliun serta menyerap 25.633 tenaga kerja. Lima sektor terbesar meliputi industri logam dasar dan barang logam, perumahan dan kawasan industri, industri alas kaki, industri lainnya, serta listrik, gas, dan air. Sementara itu, sektor usaha mikro meskipun bernilai lebih kecil, menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 12.682 orang. Hingga 2025 tercatat terdapat 688 usaha besar yang beroperasi (DPMPSTSP Kabupaten Batang, 2026).

Kinerja investasi Kabupaten Batang tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan pengembangan kawasan industri terintegrasi sebagai instrumen utama percepatan investasi dan industrialisasi daerah. Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang berkembang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang berfungsi sebagai pusat konsentrasi industri manufaktur dan infrastruktur strategis. Oleh karena itu, analisis terhadap dinamika dan perkembangan kawasan ini berperan dalam meningkatkan pemahaman arah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dan kontribusinya terhadap perekonomian Jawa Tengah secara lebih komprehensif.

Akselerasi Investasi Kawasan Industri Strategis Sebagai Katalis Transformasi Struktural dan Daya Saing Regional

Dalam persaingan global untuk menarik *Foreign Direct Investment* (FDI), kawasan industri terintegrasi menjadi instrumen utama negara-negara Asia dalam memperkuat

Grafik 1. Realisasi Investasi Jawa Tengah Tahun 2020-2025



BOKS 1

basis manufaktur dan rantai pasok global. Indonesia merespons dinamika tersebut melalui pengembangan KITB yang ditetapkan sebagai KEK Industropolis Batang pada Maret 2025 melalui PP No. 12 Tahun 2025 serta diperkuat dengan Perpres No. 106 Tahun 2022 tentang percepatan investasi. Penetapan ini menjadikan KITB sebagai simpul baru pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mengintegrasikan produksi, logistik, hunian tenaga kerja, dan kawasan komersial. Secara ekonomi, KEK Industropolis Batang berperan sebagai katalis transformasi struktural dari ekonomi berbasis primer menuju ekonomi berbasis manufaktur dan jasa yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Kawasan investasi terpadu mendorong aglomerasi industri yang menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi produksi, serta mempercepat transfer teknologi dan keterampilan tenaga kerja. Bagi Jawa Tengah, kawasan ini memperkuat daya saing industri nasional sekaligus mengurangi ketimpangan spasial antarwilayah.

KITB mencatat realisasi investasi Rp23 triliun dengan 39 tenant industri, 28 *tenant* komersial dan 18 *tenant* Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) serta total serapan tenaga kerja mencapai 18.390 orang hingga 2025. Penetapan sebagai KEK dengan luas 2.886,87 hektare memberikan fasilitas fiskal dan nonfiskal serta percepatan perizinan. Dari 44 program strategis percepatan investasi, sebanyak 28 kegiatan telah diselesaikan meliputi pembangunan jalan kawasan, air bersih, pengolahan limbah, jaringan listrik, dan hunian pekerja, sehingga kawasan berada pada kondisi relatif siap investasi (*ready to offer*) (Kemenko Perekonomian, 2026). Keberadaan KEK Industropolis Batang memberikan efek limpahan ekonomi bagi Kabupaten Batang dan Jawa Tengah. Infrastruktur kawasan mendorong tumbuhnya sektor pendukung seperti transportasi, pergudangan, jasa konstruksi, perdagangan, dan perumahan. Dengan demikian, kawasan tidak hanya menjadi pusat produksi industri, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal yang memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kajian UNDIP MAJU (2024) menunjukkan kontribusi KEK Industropolis Batang terhadap PDRB Kabupaten Batang dapat mencapai 28,58% dan terhadap Jawa Tengah sebesar 0,49% saat beroperasi penuh. Potensi investasi kawasan diproyeksikan mencapai Rp136 triliun mencakup pengembangan *Two Countries Twin Parks*, *data center*, *dry port*, *TOD*, *waterfront city*, hunian pekerja, serta kawasan pariwisata. Proyek-proyek ini memperkuat struktur ekonomi

daerah melalui penciptaan nilai tambah dan integrasi dalam rantai pasok global. Secara nasional, KEK Industropolis Batang mendukung agenda hilirisasi industri, penguatan ekspor manufaktur, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Kawasan ini juga menjadi alternatif lokasi investasi selain Jabodetabek sehingga mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi tekanan urbanisasi.

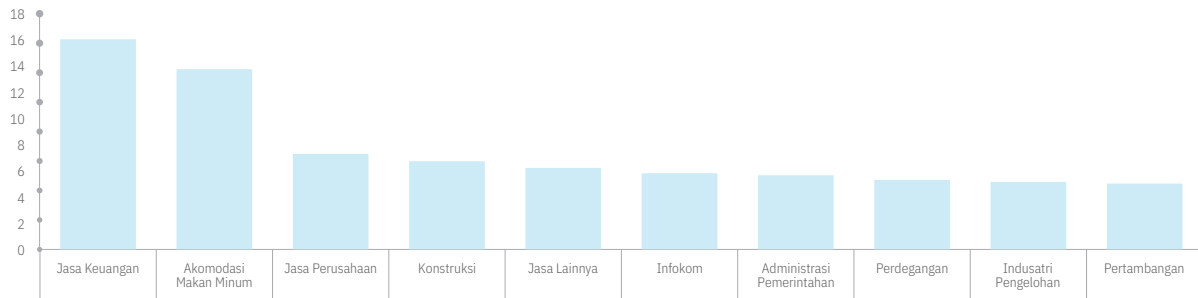
Penguatan Peran KEK Industropolis Batang dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

KEK Industropolis Batang telah berperan sebagai penggerak baru perekonomian Jawa Tengah melalui peningkatan investasi, pertumbuhan industri global, penguatan infrastruktur kawasan, serta penciptaan lapangan kerja. Dalam rangka meningkatkan kinerja ekonomi Jawa Tengah secara berkelanjutan, maka diperlukan penguatan kebijakan yang terkoordinasi. Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur fase kedua meliputi jalur kereta logistik, dry port, jaringan listrik, normalisasi sungai, dan air baku sebagai prioritas strategis peningkatan daya saing kawasan. Kedua, penetapan wilayah usaha ketenagalistrikan khusus serta penguatan pasokan energi berkelanjutan untuk mendukung industri berteknologi tinggi dan *data center*. Ketiga, penguatan integrasi KEK dengan UMKM, vokasi tenaga kerja, dan industri pendukung agar manfaat investasi menyebar luas dan inklusif. Dengan implementasi kebijakan tersebut secara konsisten, KEK Industropolis Batang diharapkan berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional yang berdaya saing global dan menjadi pilar utama penguatan ekonomi Jawa Tengah dalam jangka menengah dan panjang.

BOKS 2

Transformasi Kota Solo menuju *Wellness City* sebagai Strategi Mendorong Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Jawa Tengah

Grafik 1. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Tw IV 2025 Menurut Lapangan Usaha (%yoy)



Perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan IV 2025 menunjukkan akselerasi yang kuat, dengan pertumbuhan mencapai 5,84% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan laporan lebih tinggi dibandingkan Triwulan III 2025 sebesar 5,38% (yoy) dan lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 5,39% (yoy) (Grafik I). Percepatan tersebut didorong oleh penguatan permintaan domestik serta meningkatnya aktivitas sektor unggulan daerah seperti lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum (akmamin) sebagai representasi kegiatan pariwisata. Kinerja sektor akmamin terindikasi meningkat sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat, bertambahnya kunjungan wisatawan, serta intensifikasi penyelenggaraan event daerah. Kondisi tersebut menegaskan peran pariwisata sebagai salah satu sumber utama penguatan struktur ekonomi Jawa Tengah.

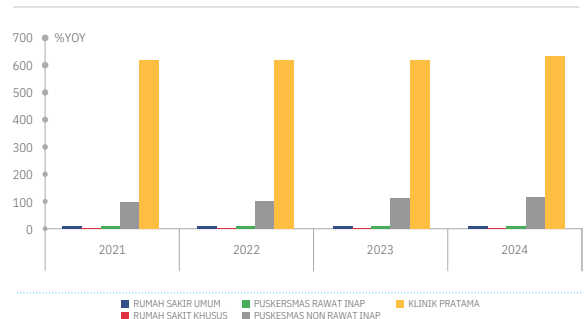
Surakarta Menawarkan Pariwisata Dengan Konsep Baru *Wellness Tourism*

Salah satu bentuk pariwisata yang menjadi tren global saat ini adalah pariwisata berbasis *wellness*. Ekonomi berbasis kesehatan (*wellness economy*) terus berkembang dengan nilai ekonomi global mencapai USD 6,32 triliun dan diperkirakan tumbuh rata-rata 7,44% per tahun hingga mencapai USD 9,68 triliun pada 2029 (*Global Wellness Institue*). Dalam konteks regional, Indonesia tercatat sebagai ekonomi *wellness* terbesar di Asia Tenggara dengan nilai mencapai USD 56,4 miliar pada 2023 serta termasuk negara dengan pertumbuhan tercepat di kawasan Asia Pasifik. Perkembangan tersebut membuka peluang strategis bagi penguatan *quality tourism* melalui pariwisata kesehatan (*wellness tourism*) sehingga diharapkan mendorong peningkatan wisatawan dengan lama tinggal lebih panjang

dan tingkat pengeluaran lebih tinggi (*high-spending travelers*) sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. *Wellness tourism* juga memiliki karakteristik permintaan yang cenderung inelastis terhadap pendapatan dan relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh fluktuasi siklus ekonomi.

Potensi *wellness tourism* di Indonesia terwujud melalui transformasi Kota Surakarta sebagai *wellness city* yang tercermin dalam pergeseran struktur ekonomi menuju sektor jasa bernilai tambah tinggi. Konsep *wellness city* di Surakarta tidak terbatas pada layanan kesehatan kuratif, namun mencakup pengembangan ekosistem promotif dan preventif seperti medical tourism, spa dan herbal, sport tourism, ruang terbuka hijau, serta integrasi dengan ekonomi kreatif dan budaya. Penguatan ekosistem tersebut berimplikasi pada munculnya *multiplier effect* yang luas, antara lain melalui peningkatan aktivitas UMKM herbal, perdagangan farmasi, sektor akomodasi, serta industri kuliner berbasis kesehatan. Dengan demikian, pengembangan *wellness city* berkontribusi pada diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional



Sumber: BPS Surakarta (2025)

BOKS 2

Kesiapan Surakarta sebagai *wellness city* telah dibangun secara bertahap dalam lima tahun terakhir melalui penguatan sektor kesehatan dan jasa pendukungnya. Data BPS menunjukkan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, klinik spesialis, pusat rehabilitasi, serta layanan kebugaran pada periode 2021–2024 yang mengindikasikan ekspansi *supply side* yang responsif terhadap peningkatan permintaan layanan kesehatan (Grafik 2). Penguatan infrastruktur tersebut turut diperkuat dengan peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia (RS KEI) di Solo Technopark (hibah senilai Rp417,3 Miliar dari Uni Emirat Arab) sebagai fasilitas kesehatan berstandar modern, yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas layanan kesehatan regional sekaligus mendukung *positioning* Surakarta sebagai pusat *wellness* berbasis layanan medis.

Ekspansi sektor kesehatan di Kota Surakarta turut berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja formal serta penguatan kualitas SDM di sektor jasa kesehatan. Peningkatan kebutuhan tenaga medis, paramedis, tenaga kefarmasian, serta tenaga pendukung layanan kesehatan mendorong pertumbuhan subsektor yang bersifat padat karya terampil, sehingga berimplikasi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja formal dengan tingkat pendapatan yang relatif lebih baik. Jumlah tenaga kesehatan di Surakarta meningkat konsisten dari 8.947 orang pada 2021 menjadi 10.130 orang pada 2024, atau tumbuh sekitar 13,2% dalam tiga tahun terakhir (Grafik 3). Dari sisi komposisi, perawat tetap menjadi kelompok terbesar dengan jumlah meningkat konsisten dari 4.657 orang pada 2021 menjadi 4.920 orang pada 2024, atau tumbuh sekitar 5,6% selama periode tersebut. Perkembangan signifikan juga terjadi pada tenaga kefarmasian yang naik dari 1.196 orang menjadi 1.514 orang pada periode yang sama, atau tumbuh sekitar 26,6%, sejalan

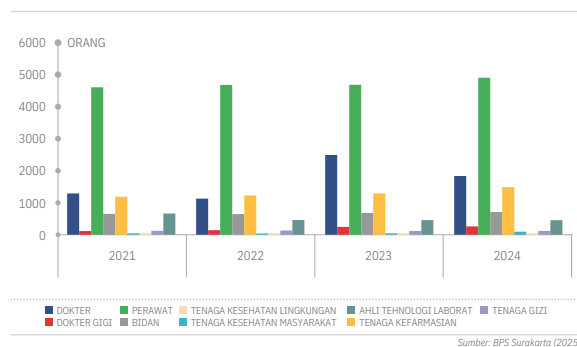
dengan berkembangnya jaringan apotek modern, klinik, serta aktivitas distribusi farmasi sebagai bagian dari rantai nilai sektor kesehatan. Selain itu, jumlah dokter juga mengalami peningkatan yang mencerminkan penguatan kapasitas layanan medis spesialis dan penunjang. Tren kenaikan tenaga kesehatan tersebut mengindikasikan bahwa transformasi Surakarta menuju *wellness city* tidak hanya ditopang oleh pembangunan infrastruktur layanan kesehatan, tetapi juga oleh penguatan kapasitas SDM sebagai fondasi utama pengembangan ekonomi jasa kesehatan yang berkelanjutan.

Solo Terpilih Menjadi Tuan Rumah *Wonderful Indonesia Wellness Festival* pada November 2025

Festival Nasional *Wonderful Indonesia Wellness Festival* diselenggarakan sepanjang November 2025 dan dipusatkan di Kota Solo, dengan rangkaian kegiatan yang tersebar di sejumlah lokasi ikonik. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda strategis dalam mendorong penguatan pariwisata berbasis kesehatan (*wellness tourism*) dan budaya tradisional Indonesia. Festival ini mengusung konsep integrasi antara kesehatan, kebugaran, serta kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas yang ditampilkan antara lain praktik jamu tradisional, terapi pijat dan relaksasi, yoga, meditasi, hingga pertunjukan seni budaya yang merepresentasikan kekayaan tradisi Nusantara. Konsep tersebut tidak hanya menonjolkan aspek kesehatan fisik, tetapi juga keseimbangan mental dan spiritual yang menjadi bagian dari filosofi budaya Indonesia. Pemilihan Solo sebagai lokasi utama penyelenggaraan didasarkan pada kekuatan identitas budaya dan sejarahnya yang masih terjaga. Kawasan Laweyan, yang dikenal sebagai sentra batik tertua di Indonesia, menghadirkan pengalaman wisata berbasis heritage dan kerajinan tradisional. Sementara itu, Taman Balekambang menjadi ruang terbuka hijau yang mendukung aktivitas kebugaran dan rekreasi keluarga dalam suasana alami.

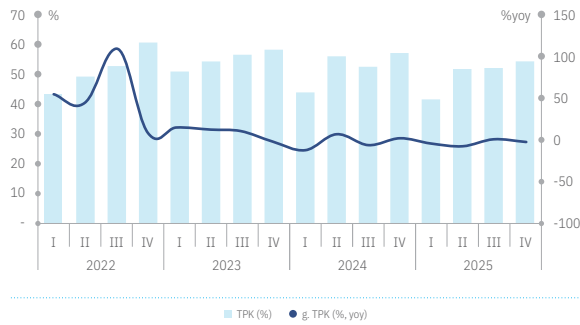
Selama satu bulan pelaksanaan, kegiatan *Wonderful Indonesia Wellness Festival* mencatatkan capaian yang signifikan dengan jumlah kunjungan lebih dari 3.700 orang selama penyelenggaraan. Dampak ekonomi yang dihasilkan bersifat *multiplier*, terutama pada sektor transportasi, akomodasi, kuliner, serta penjualan produk lokal. Secara langsung, kegiatan ini memberikan manfaat kepada sekitar 750 pekerja *wellness*, 140 pekerja seni, 900 tenaga *event organizer*, serta kurang lebih 100 pelaku UMKM yang terlibat dalam rangkaian acara. Dalam rentang periode tersebut,

Grafik 1.3 Perkembangan Jumlah Tenaga Pelayanan Kesehatan di Surakarta Periode 2021–2024



BOKS 2

Grafik 4. Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Kota Surakarta



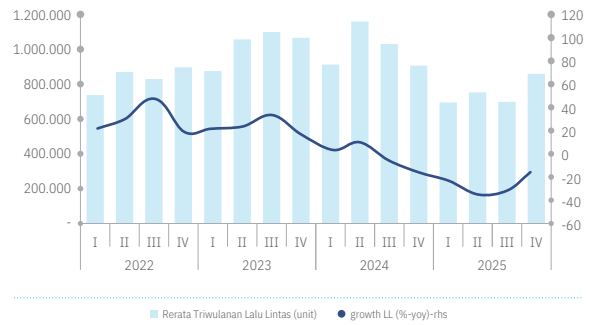
indikator pendukung seperti Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Kota Surakarta dan laju mobilitas juga mengalami peningkatan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada periode triwulan IV 2026 menunjukkan pertumbuhan walaupun berada dalam trend perlambatan, dari rata-rata TPK di triwulan III 2025 sebesar 50,35% menjadi sebesar 54,44% (mtm) pada triwulan IV 2025 (Grafik 4). Selanjutnya, tingkat mobilitas lalu lintas jalan tol di Solo Raya juga menunjukkan pertumbuhan yang berarti pada periode ini dengan lalu lintas sebanyak 749.305 unit kendaraan (Grafik 5.) Capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan periode triwulan III 2025 dengan lalu lintas sebanyak 685.540 kendaraan.

Dukungan Bank Indonesia Solo dalam Meningkatkan Kesiapan Solo sebagai *Wellness City*

Sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung penguatan *wellness economy* di Surakarta, Bank Indonesia mendorong pengembangan ekosistem UMKM berbasis produk kesehatan dan herbal sebagai bagian dari rantai nilai ekonomi *wellness tourism*. Intervensi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, namun juga pada penguatan daya saing, standarisasi mutu, perluasan akses pasar, serta peningkatan branding produk. Strategi ini selaras dengan upaya mendorong nilai tambah sektor kesehatan berbasis kearifan lokal sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah melalui UMKM yang resilien dan berorientasi ekspor.

Pada produk jamu dan herbal, Bank Indonesia juga membina UMKM lokal untuk meningkatkan kualitas dan kinerja melalui program UMKM *onboarding* yang mencakup kurasi produk, penguatan manajemen usaha, serta pendampingan legalitas

Grafik 5. Perkembangan Lalu Lintas Tol Solo Raya



dan sertifikasi. Dukungan melalui fasilitasi pelaksanaan *foodlab* turut memastikan standar kualitas dan keamanan pangan, sehingga produk mampu memenuhi persyaratan pasar yang lebih luas. Selain itu, fasilitasi keikutsertaan dalam berbagai pameran memperluas eksposur pasar dan memperkuat positioning jamu sebagai bagian integral dari konsep kesehatan holistik Surakarta. Upaya ini tidak hanya meningkatkan omzet pelaku usaha, tetapi juga memperkuat identitas kota sebagai pusat produk herbal tradisional yang modern dan berdaya saing.

Dari sisi sistem pembayaran, Bank Indonesia Solo turut memperkuat kesiapan Surakarta sebagai *wellness city* melalui perluasan akseptansi pembayaran digital di sentra ekonomi herbal, salah satunya melalui kegiatan edukasi dan *onboarding* QRIS kepada 100 pedagang Pasar Jamu Nguter pada 4 November 2026. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan pelaku usaha tradisional, tetapi juga mendorong modernisasi transaksi pada ekosistem jamu sebagai bagian dari industri *wellness* lokal. Implementasi QRIS mempercepat proses pembayaran, meningkatkan transparansi pencatatan transaksi, serta memperluas potensi pasar dengan menjangkau konsumen non-tunai, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara. Langkah tersebut memperkuat integrasi antara pengembangan UMKM herbal dan transformasi digital sistem pembayaran, sehingga mendukung terciptanya ekosistem *wellness* yang lebih efisien, akuntabel, dan berdaya saing tinggi.





Keuangan Pemerintah

Kinerja APBD dan APBN Provinsi Jawa Tengah hingga triwulan IV 2025 secara umum mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.



Realisasi pendapatan hingga akhir triwulan IV 2025 mencapai Rp23,76 triliun atau setara 96,38% dari pagu anggaran. Realisasi ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh realisasi PAD dan Pendapatan Transfer mengalami penurunan masing-masing sebesar 15,17% (yoy) dan 0,87% (yoy). Meskipun demikian, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mencatatkan pertumbuhan positif, dengan peningkatan nominal realisasi sebesar 520,54% (yoy).



Realisasi belanja daerah hingga triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp23,87 triliun atau 94,61% dari total pagu anggaran. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pemberlakuan PMK Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN. Perubahan regulasi ini mengakibatkan proses lelang baru dapat dilaksanakan pada semester kedua tahun 2025. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengakselerasi realisasi belanja modal beserta output fisiknya pada sisa tahun 2025.



Capaian realisasi APBN hingga triwulan IV 2025 lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024. Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) menunjukkan capaian realisasi yang lebih tinggi dibandingkan belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Namun demikian, realisasi TKD masih terkontraksi apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan penyesuaian yang lebih rendah untuk Dana Alokasi Khusus Fisik.

2.1. APBD Provinsi Jawa Tengah

2.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD Provinsi Jawa Tengah

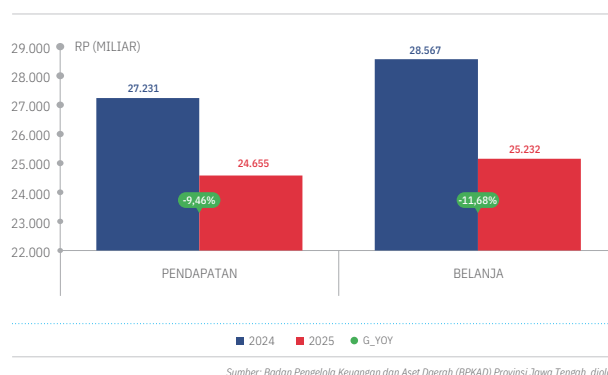
APBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 menurun dibandingkan tahun 2024 baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Kondisi ini mencerminkan upaya Pemerintah Provinsi dalam mengelola keuangan daerah secara lebih efisien dan adaptif terhadap tantangan fiskal yang ada. Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp24,65 triliun, turun 9,46% (yoy) dan belanja daerah direncanakan sebesar Rp25,23 triliun atau turun sebesar 11,68% (yoy).

Penurunan pada sisi pendapatan terutama disebabkan oleh proyeksi penurunan pajak daerah sebagai dampak dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkirakan penerimaan pajak daerah tahun 2025 turun dibandingkan tahun 2024, terutama akibat penurunan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 33,08% dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 22,50%.

Pada sisi belanja, penurunan pagu anggaran juga turut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi ini mendorong optimalisasi penggunaan anggaran belanja negara dan daerah sebagai bentuk respons terhadap penyesuaian fiskal nasional.

Kontraksi pendapatan daerah turut dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggaran PAD pada tahun 2025 turun 15,57% (yoy), dari Rp18,59 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp15,69 triliun pada tahun 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beberapa komponen

Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2024 dan T.A. 2025



utama yaitu anggaran Pajak Daerah yang turun tajam sebesar 19,47% (yoy) dan Lain-Lain PAD yang sah dengan penurunan sebesar 1,90% (yoy). Di sisi lain, Retribusi Daerah naik 5,94% dari Rp2,05 triliun menjadi Rp2,17 triliun serta anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditetapkan tumbuh positif sebesar 0,35% (yoy), mencerminkan kinerja BUMD yang diperkirakan masih tumbuh positif.

Anggaran belanja Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan arahan efisiensi belanja dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penurunan ini terutama bersumber dari kontraksi Belanja Transfer sebesar 30,71% (yoy), disebabkan oleh penurunan Belanja Bagi Hasil sebesar 36,97% (yoy) serta penurunan Belanja Bantuan Keuangan sebesar 16,21% (yoy). Selain itu, pagu Belanja Operasi 2025 juga sedikit menurun dari Rp16,55 triliun menjadi Rp16,13 triliun karena pengurangan alokasi pada Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Namun demikian, beberapa komponen belanja mengalami peningkatan signifikan. Belanja Subsidi tumbuh tinggi sebesar 786,64% (yoy), mencerminkan adanya penguatan alokasi pada program-program kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Komponen Pendapatan Daerah	Rp Miliar			% Perubahan
	2024	2025	Perubahan	
PAD	18.594	15.699	(2.895)	-15,57%
- Pajak Daerah	15.471	12.459	(3.012)	-19,47%
- Retribusi Daerah	2.051	2.173	122	5,94%
- Hasil Pengelolaan Kekay. Daerah Yg Dipisahkan	688	690	2	0,35%
- Lain-Lain PAD Yang Sah	385	377	(7)	-1,90%
PENDAPATAN TRANSFER	8.611	8.792	181	2,10%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	26	163	138	537,61%
- Hibah	26	26	(0)	-0,34%
- Dana Peny. dan Otonomi Khusus	-	-	-	-
- Pendapatan Lainnya	-	138	138	100,00%
JUMLAH PENDAPATAN	27.231	24.655	(2.5766)	-9,46%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, diolah (data unaudited)

Tabel 2.2. Anggaran Belanja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Komponen Belanja Daerah	Rp Miliar			% Perubahan
	2024	2025	Perubahan	
BELANJA OPERASI	16.552	16.132	(421)	-2,54%
- Belanja Pegawai	7.216	7.439	223	3,09%
- Belanja Barang dan Jasa	6.486	6.555	69	1,07%
- Belanja Subsidi	1	12	11	786,64%
- Belanja Hibah	2.804	2.093	(711)	-25,36%
- Belanja Bantuan Sosial	45	33	(13)	-28,26%
BELANJA MODAL	1.777	1.998	221	12,43%
- Belanja Modal tanah	13	14	1	10,16%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	882	690	(192)	-21,79%
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	421	298	(123)	-29,32%
- Belanja Modal Jalan, irigasi, dan Jaringan	374	868	494	131,89%
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	87	127	40	45,95%
BELANJA TIDAK TERDUGA	24,6	25,0	0,4	1,48%
- Belanja Tidak terduga	24,6	25,0	0,4	1,48%
BELANJA TRANSFER	10.213	7.077	(3.136)	-30,71%
- Belanja Bagi hasil	7.131	4.495	(2.636)	-36,97%
- Belanja Bantuan keuangan	3.082	2.582	(500)	-16,21%
JUMLAH BELANJA	28.567	25.232	(3.335)	-11,68%

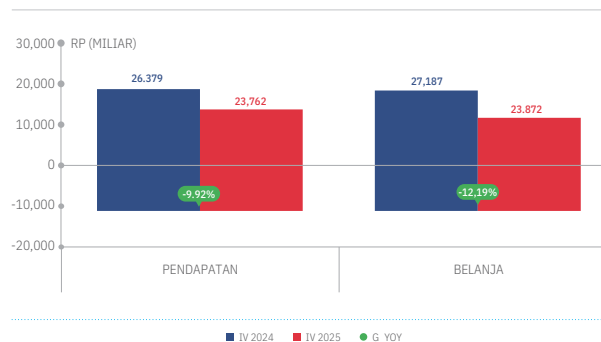
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, diolah (data unaudited)

Sementara itu, Belanja Modal justru tumbuh positif pada tahun 2025 di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Belanja Modal meningkat sebesar 12,43% (yoy), terutama didorong oleh kenaikan tajam pada belanja jalan, irigasi, dan jaringan yang tumbuh sebesar 131,89% (yoy). Sementara itu, Belanja Tidak Terduga tumbuh 1,48% (yoy) atau secara nominal sebesar Rp400 miliar.

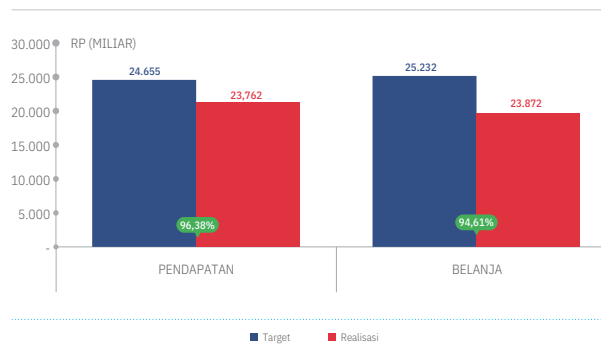
2.1.2. Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Jawa Tengah hingga triwulan IV 2025 menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan tercatat sebesar Rp23,76 triliun, turun 9,92% (yoy) dari Rp26,73 triliun pada triwulan IV 2024. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp23,87 triliun atau berkontraksi 12,19% (yoy). Perkembangan realisasi ini menyebabkan defisit sebesar Rp110 miliar pada APBD Provinsi Jawa Tengah di triwulan IV 2025.

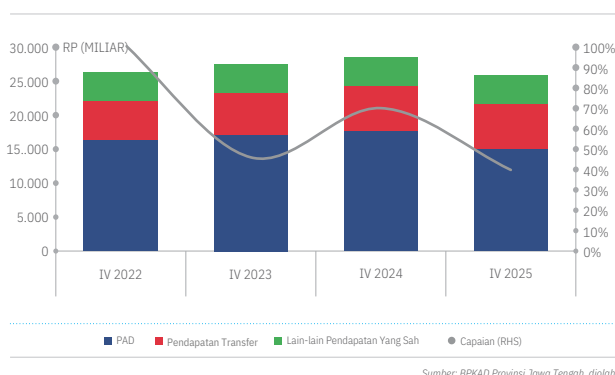
Realisasi anggaran pendapatan Provinsi Jawa Tengah hingga triwulan IV 2025 tercatat sebesar 96,38% dari total pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan persentase tahun lalu. Secara nominal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer mengalami moderasi dibandingkan triwulan IV 2024, tetapi terdapat kenaikan pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Struktur pendapatan daerah ditopang kuat

Grafik 2.2 Nominal Realisasi Pendapatan & Belanja Daerah Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV2025

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pagu

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, diolah

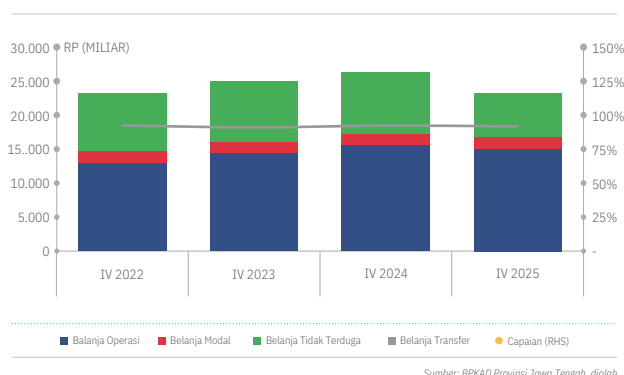
Grafik 2.4 Realisasi Pendapatan Daerah (2022-2025)

oleh PAD, dengan realisasi Rp14,97 triliun. Komponen lainnya yang juga berkontribusi cukup besar adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp8,62 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp163 miliar.

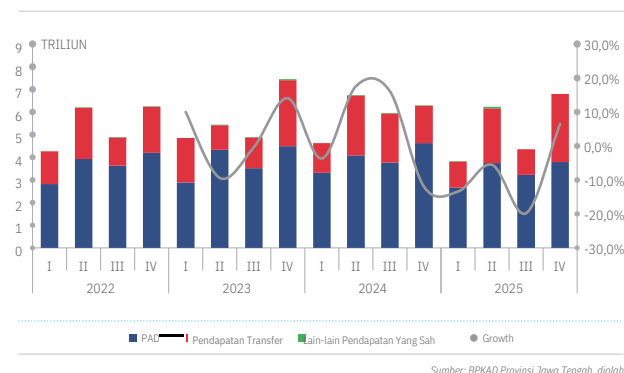
Sejalan dengan realisasi pendapatan, belanja APBD Provinsi Jawa Tengah hingga triwulan IV 2025 juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja tercatat sebesar Rp23,87 triliun atau 94,61% dari total pagu belanja, lebih rendah dibandingkan capaian pada triwulan IV pada tahun 2022 dan 2024 yang realisasinya di atas 95% dari total pagu. Penurunan ini mencerminkan pola penyerapan yang lebih hati-hati, dengan ruang akselerasi yang besar pada akhir tahun untuk mendorong pembangunan dan aktivitas ekonomi. Dari sisi komposisi, belanja daerah masih didominasi oleh Belanja Operasi dan Belanja Transfer, yang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan dukungan fiskal bagi daerah.

2.1.3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Hingga akhir triwulan IV 2025, realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp23,76 triliun atau setara 96,38% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Secara rinci, capaian dimaksud ditopang oleh realisasi Pendapatan Transfer yang mencapai 98,10% dari pagu; realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 95,37% dari pagu, dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 100,18% dari pagu. Apabila dibandingkan secara nominal dengan periode yang sama tahun sebelumnya, hanya komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mencatatkan pertumbuhan positif, dengan peningkatan nominal realisasi sebesar 520,54% (yoy). Kondisi ini serupa dengan realisasi pada triwulan III 2025. Sebaliknya, realisasi PAD dan Pendapatan Transfer mengalami penurunan masing-masing sebesar 15,17% (yoy) dan 0,87% (yoy). Namun demikian, capaian realisasi PAD pada triwulan laporan lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 95,37% dari pagu berbanding dengan 94,92% dari pagu.

Grafik 2.5 Realisasi Belanja Daerah (2022-2025)

Lebih rinci pada komponen PAD, realisasi Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah mengalami kontraksi, sedangkan nominal realisasi Retribusi Daerah mengalami kenaikan. Pajak Daerah yang mengalami kontraksi disebabkan oleh belum optimalnya kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB secara tepat waktu. Hal ini ditandai dengan masih tingginya tingkat piutang atau tunggakan PKB. Selain itu, target penjualan kendaraan bermotor tidak tercapai dan masyarakat beralih ke kendaraan listrik yang bebas BBNKB. Terlebih lagi, Pajak Rokok dipengaruhi oleh capaian kinerja penerimaan cukai rokok oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-49/PK/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 Tentang Proporsi Dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2025, konsumen beralih dari rokok golongan 1 (mahal) ke rokok golongan 2 atau 3 yang memiliki tarif cukai lebih rendah dan kenaikan harga jual eceran (HJE) yang tinggi akibat kenaikan tarif cukai menyebabkan penurunan volume produksi, terutama pada produsen besar. Nominal realisasi retribusi tumbuh 15,29% (yoy) dari Rp2,31 triliun pada triwulan IV 2024 menjadi Rp2,67 triliun pada triwulan IV 2025, didorong oleh kenaikan pendapatan layanan rumah sakit daerah pasca peningkatan kapasitas pelayanan pasien pada RS BLUD. Total pendapatan pemerintah yang terkumpul pada periode Oktober-Desember 2025 mencapai Rp7,64 triliun, meningkat 8,4% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 2.6 Realisasi Pendapatan Dalam Satu Periode pada Masing-Masing Triwulan

Tabel 2.3. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Jawa Tengah Hingga Triwulan IV 2025 dan 2024 (Rp miliar)

Uraian	Realisasi		%Realisasi		Pertumbuhan Nominal Realisasi	Pertumbuhan Rasio Realisasi
	IV 2024	IV 2025	IV 2024	IV 2025		
PENDAPATAN						
PAD	17.650,94	14.973,13	94,93%	95,37%	-15,17%	0,47%
- Pajak Daerah	14.210,24	11.438,45	91,85%	91,81%	-19,51%	-0,05%
- Retribusi Daerah	2.318,082	2.673,33	113,01%	123,05%	15,33%	8,82%
- Hasil Pengelolaan Kekay. Daerah Yg Dipisahkan	687,81	546,66	99,89%	79,21%	-20,52%	-20,80%
- Lain-Lain PAD Yang Sah	434,06	314,69	112,88%	83,42%	-27,50%	-26,10%
PENDAPATAN TRANSFER	8.663,44	8.625,36	101,05%	98,10%	-0,87%	-2,92%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	26,34	163,47	138,65%	100,18%	520,54%	-27,75%
JUMLAH PENDAPATAN	26.738,72	23.761,97	96,87%	96,38%	-9,92%	-0,51%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah (data unaudited)

2.1.3.2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

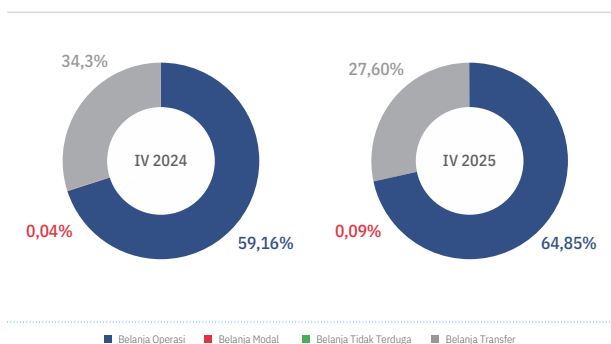
Realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp23,87 triliun atau 94,61% dari total pagu anggaran. Secara lebih rinci, realisasi Belanja Operasi mencapai 95,96%, Belanja Modal sebesar 89,86%, Belanja Tidak Terduga sebesar 28,77%, dan Belanja Transfer sebesar 93,11% dari pagu masing-masing. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi belanja terhadap pagu hingga triwulan IV 2025 tercatat lebih rendah. Penurunan paling signifikan terjadi pada rasio realisasi Belanja Modal yang berkontraksi sebesar 7,85% (yoy).

Kontraksi belanja modal tersebut disebabkan oleh terbitnya PMK Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN yang berdampak pada penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan belanja infrastruktur. Penyesuaian regulasi ini menyebabkan proses lelang baru dapat dilaksanakan pada triwulan III dan IV sehingga menjadi hambatan dalam implementasi program di lapangan. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di paruh kedua mampu mengejar ketertinggalan realisasi belanja modal beserta output fisiknya sehingga terdapat akselerasi realisasi belanja dari yang sebelumnya hanya terealisasi sebesar 58,64% pada triwulan III 2025 menjadi 94,61% pada triwulan IV 2025.

Tabel 2.4. Realisasi Belanja Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025

Komponen Belanja Daerah	Realisasi (Rp miliar)		% Realisasi dari Pagu		Pertumbuhan Nominal Realisasi	Pertumbuhan Rasio Realisasi
	IV 2024	IV 2025	IV 2024	IV 2025		
BELANJA OPERASI	16.083,87	15.480,09	97.17%	95.96%	-3.75%	-1.24%
- Belanja Pegawai	7.023,08	7.060,69	97.33%	94.92%	0.54%	-2.48%
- Belanja Barang dan Jasa	6.234,23	6.306,08	96.12%	96.20%	1.15%	0.08%
- Belanja Subsidi	1,40	12,29	100.00%	99.02%	777.97%	-0.98%
- Belanja Hibah	2.780,14	2.068,44	99.14%	98.82%	-25.60%	-0.32%
- Belanja Bantuan Sosial	45,01	32,58	99.04%	99.95%	-27.61%	0.91%
BELANJA MODAL	1.733,08	1.795,56	97.51%	89.86%	3.60%	-7.85%
- Belanja Modal tanah	12,22	12,46	0.69%	89.44%	1.96%	12906.82%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	855,98	636,75	97.06%	92.31%	-25.61%	-4.89%
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	411,04	205,08	46.61%	68.90%	-50.11%	47.83%
- Belanja Modal Jalan, irigasi, dan Jaringan	366,48	815,43	87.02%	93.95%	122.50%	7.96%
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	87,36	125,85	23.34%	98.79%	44.06%	323.27%
BELANJA TIDAK TERDUGA	10,23	7,19	11.72%	28.77%	-29.66%	145.57%
- Belanja Tidak Terduga	10,23	7,19	41.51%	28.77%	-29.66%	-30.69%
BELANJA TRANSFER	9.359,00	6.588,99	91.65%	93.11%	-29.60%	1.59%
- Belanja Bagi hasil	6.334,54	4.084,03	88.83%	90.86%	-35.53%	2.29%
- Belanja Bantuan keuangan	3.025,00	2.504,96	98.18%	97.01%	-17%	-19%
JUMLAH BELANJA	27.187,00	23.871,84	95.17%	94.61%	-12.19%	-0.59%

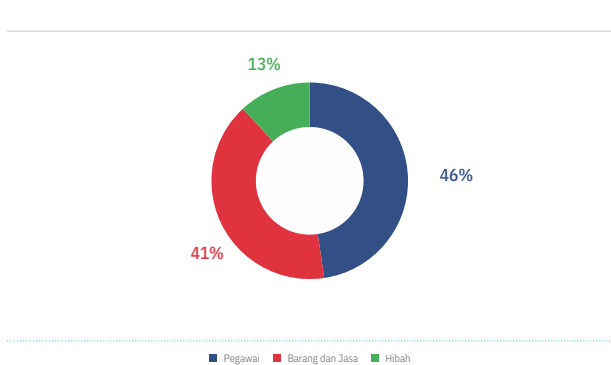
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah (laporan unaudited)

Grafik 2.7 Perbandingan Pos Realisasi Belanja Daerah Triwulan IV 2025 dan Triwulan IV 2024

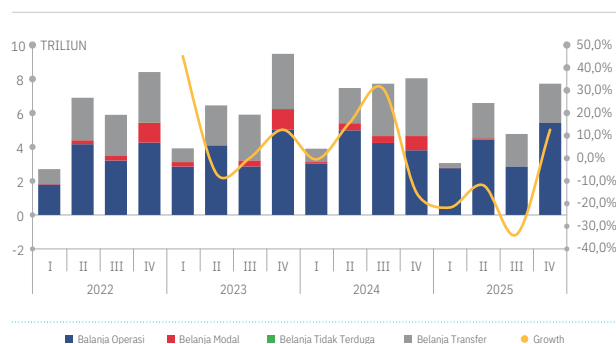
Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan pangsa terhadap total belanja daerah, belanja operasional masih menjadi komponen dominan dalam struktur belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Belanja operasional hingga triwulan IV 2025 menyumbang 64,85% dari total belanja, meningkat dibandingkan triwulan IV 2024 sebesar 59,16%. Secara lebih rinci, sebagian besar belanja operasional tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai yang memiliki pangsa sebesar 29,58%, diikuti oleh belanja barang dan jasa dengan pangsa 26,42% terhadap total Belanja Operasi. Komposisi ini mencerminkan fokus pengeluaran daerah yang masih didominasi oleh belanja rutin untuk mendukung kelangsungan layanan pemerintahan dan operasional perangkat daerah.

Analisis lebih lanjut pada aspek belanja yang direalisasikan pada masing-masing triwulan, menunjukkan total belanja pemerintah pada periode Oktober-Desember 2025 mencapai Rp9,07 triliun, meningkat 12,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh akselerasi penyerapan belanja operasi dan belanja modal setelah proses refocusing dan penyesuaian anggaran pada APBD Perubahan 2025. Beberapa kegiatan fisik yang belum dapat direalisasikan pada triwulan sebelumnya dikejar penyelesaian dan pembayarannya pada triwulan IV 2025.

Grafik 2.8 Pembagian Pos Realisasi Belanja Operasional Triwulan IV 2025

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.9 Realisasi Belanja dalam Satu Periode pada Masing-Masing Triwulan

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, diolah

2.2. APBN di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

2.2.1. Anggaran APBN di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Alokasi anggaran belanja APBN di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp109,57 triliun, yang terdiri dari 35,65% belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan 64,35% belanja Transfer ke Daerah (TKD). Total pagu anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar 8,0% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan IV 2024. Penurunan total pagu anggaran terutama disebabkan oleh kontraksi pada beberapa komponen belanja, yaitu pagu Dana Alokasi Khusus Fisik turun 72,27% (yoy), dan Dana Insentif Daerah turun 37,96% (yoy), dan Belanja Barang turun 38,49% (yoy).

Berdasarkan fungsi, porsi terbesar anggaran tahun 2025 dialokasikan untuk fungsi Pelayanan Umum sebesar 65,53%, disusul oleh Pendidikan sebesar 10,65% dan ekonomi sebesar 7,28%. Komposisi ini relatif tidak berubah dibandingkan dengan triwulan IV 2024, meskipun fungsi pendidikan lebih diprioritaskan dibandingkan fungsi ekonomi. Dari sisi nominal, sebagian besar alokasi anggaran mengalami penurunan. Fungsi Pariwisata yang sebelumnya mendapatkan alokasi pada triwulan IV 2024 tidak mendapatkan alokasi pada triwulan IV 2025. Sementara itu, kenaikan alokasi terjadi pada beberapa fungsi antara lain fungsi Perlindungan Sosial (naik 11,69%), fungsi Agama (naik 45,46%), fungsi Ketertiban dan Keamanan (naik 3,90%), serta fungsi Pertahanan (0,70%).

2.2.2. Realisasi APBN di Provinsi Jawa Tengah

Capaian realisasi belanja APBN di Provinsi Jawa Tengah hingga triwulan IV 2025 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total realisasi belanja mencapai Rp105,60 triliun atau 96,38% dari pagu anggaran. Capaian tersebut lebih rendah dari tingkat penyerapan belanja pada triwulan IV 2024 yang sebesar 97,19% dari pagu.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan Jenis Belanja	TW IV 2024				TW IV 2025				Perubahan Pagu	Perubahan Realisasi
	Pagu (Rp M)	Pangsa	Realisasi (Rp M)	% Realisasi	Pagu (Rp M)	Pangsa	Realisasi (Rp M)	% Realisasi		
Belanja K/L	48.533,98	40,75%	45.803,58	94,37%	39.058,38	35,65%	36.198,34	92,68%	-19,52%	-20,97%
Belanja Barang	21.835,10	18,33%	20.836,53	95,43%	13.431,75	12,26%	12.210,62	90,91%	-38,49%	-41,40%
Belanja Pegawai	16.920,98	14,21%	17.023,03	100,60%	18.447,55	16,84%	18.196,09	98,64%	9,02%	6,89%
Belanja Modal	9.777,90	8,21%	7.944,01	81,24%	7.179,08	6,55%	5.791,63	80,67%	-26,58%	-27,09%
Transfer ke Daerah (TKD)	70.564,42	59,25%	69.952,25	99,13%	70.514,50	64,35%	69.407,99	98,43%	-0,07%	-0,78%
Dana Desa	8.167,83	6,86%	8.164,44	99,96%	7.945,28	7,25%	7.345,91	92,46%	-2,72%	-10,03%
Dana Alokasi Khusus Fisik	3.897,34	3,27%	3.656,01	93,81%	1.080,57	0,99%	1.018,00	94,21%	-72,27%	-72,16%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	15.385,45	12,92%	15.161,00	98,54%	16.713,85	15,25%	16.655,32	99,65%	8,63%	9,86%
Belanja Bantuan Sosial	127,84	0,11%	127,21	99,51%	144,38	0,13%	144,15	99,84%	12,94%	13,32%
Dana Bagi Hasil	2.736,20	2,30%	2.736,20	100,00%	3.556,24	3,25%	3.359,23	94,46%	29,97%	22,77%
Dana Alokasi Umum	39.553,06	33,21%	39.459,46	99,76%	40.641,96	37,09%	40.453,17	99,54%	2,75%	2,52%
Dana Insentif Daerah	696,70	0,58%	647,92	93,00%	432,21	0,39%	432,21	100,00%	-37,96%	-33,29%
TOTAL	119.098,40	100,00%	115.755,82	97,19%	109.572,88	100,00%	105.606,33	96,38%	-8,00%	-8,77%

Sumber: Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan Fungsi	TW IV 24				TW IV 2025				Perubahan Pagu	Perubahan Realisasi
	Pagu (Rp M)	Pangsa	Realisasi (Rp M)	% Realisasi	Pagu (Rp M)	Pangsa	Realisasi (Rp M)	% Realisasi		
Pelayanan Umum	76.893,95	64,56%	75.921,15	98,73%	71.808,02	65,53%	70.495,02	98,17%	-6,61%	-7,15%
Ekonomi	11.589,11	9,73%	9.665,38	83,40%	7.977,68	7,28%	6.814,16	85,42%	-31,16%	-29,50%
Pendidikan	10.682,49	8,97%	10.600,67	99,23%	11.672,33	10,65%	10.988,42	94,14%	9,27%	3,66%
Ketertiban dan Keamanan	6.707,39	5,63%	6.630,56	98,85%	6.969,20	6,36%	6.822,44	97,89%	3,90%	2,89%
Pertahanan	4.653,75	3,91%	4.635,46	99,61%	4.686,31	4,28%	4.649,23	99,21%	0,70%	0,30%
Kesehatan	3.927,35	3,30%	3.706,33	94,37%	3.743,36	3,42%	3.446,60	92,07%	-4,68%	-7,01%
Perumahan dan Fasilitas Umum	2.604,93	2,19%	2.579,60	99,03%	511,86	0,47%	434,51	84,89%	-80,35%	-83,16%
Lingkungan Hidup	910,69	0,76%	881,30	96,77%	672,82	0,61%	599,69	89,13%	-26,12%	-31,95%
Agama	900,78	0,76%	912,01	101,25%	1.310,29	1,20%	1.188,52	90,71%	45,46%	30,32%
Perlindungan Sosial	197,87	0,17%	196,36	99,24%	221,01	0,20%	167,73	75,89%	11,69%	-14,58%
Pariwisata	30,10	0,03%	26,99	89,66%		0,00%			-100,00%	-100,00%
TOTAL	119.098,40	100%	115.755,82	97,19%	109.572,88	100%	105.606,33	96,38%	-8,00%	-8,77%

Sumber: Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan jenis belanja, meskipun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Transfer ke Daerah (TKD) mencatatkan capaian realisasi yang lebih tinggi dibandingkan belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Realisasi TKD tercatat sebesar Rp69,40 triliun atau 98,43% dari pagu anggaran. Sementara itu, realisasi belanja K/L mencapai 92,68% dari pagu.

Analisis lebih lanjut pada masing-masing kelompok belanja dalam TKD menunjukkan bahwa realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun 2024. Hal ini sejalan dengan penyesuaian alokasi yang lebih besar untuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik khususnya pada sektor pendidikan dan tenaga pendidik seperti bantuan

operasional sekolah, tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah, dan tambahan penghasilan guru.

Penyesuaian prioritas ini juga tercermin pada realisasi Belanja Bantuan Sosial yang meningkat signifikan sebesar 13,32% (yoy), terutama didorong oleh penyaluran Bantuan Sosial Pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kementerian Agama. Target penerima KIP pada tahun 2025 diperkirakan lebih banyak dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan penguatan perlindungan sosial yang diarahkan untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di tengah tekanan ekonomi.

Berdasarkan klasifikasi fungsi, realisasi belanja APBN paling rendah terdapat pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum. Realisasi fungsi perumahan dan fasilitas umum yang rendah seiring dengan efisiensi pemerintah sejak awal tahun 2025 dan prioritas yang lebih tinggi pada belanja sosial non fisik. Sementara itu, capaian realisasi paling tinggi terdapat pada fungsi Agama dan Pendidikan. Hal ini masih sejalan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang meningkat untuk dana pendidikan serta realisasi Belanja Bantuan Sosial yang meningkat dalam rangka penyaluran KIP.





Perkembangan Inflasi Daerah

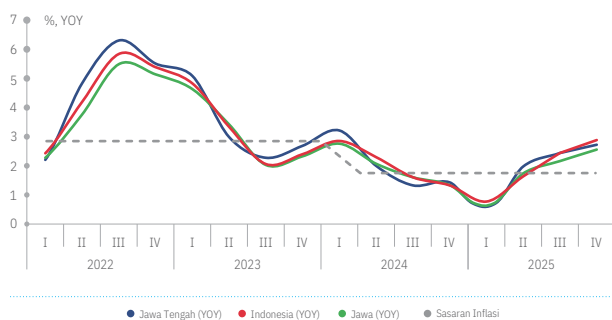
Tekanan inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 meningkat. Inflasi terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring dengan peningkatan harga komoditas cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beras. Peningkatan harga cabai rawit dan cabai merah disebabkan oleh penurunan produksi akibat cuaca ekstrim, sedangkan kenaikan harga daging ayam ras dan beras disebabkan oleh peningkatan permintaan sejalan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih masif. Lebih lanjut, peningkatan harga komoditas terjadi sejalan dengan permintaan yang meningkat selama periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Inflasi juga disumbang oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya seiring dengan ketegangan geopolitik dan pelonggaran kebijakan moneter di sejumlah negara yang meningkatkan harga emas emas global.



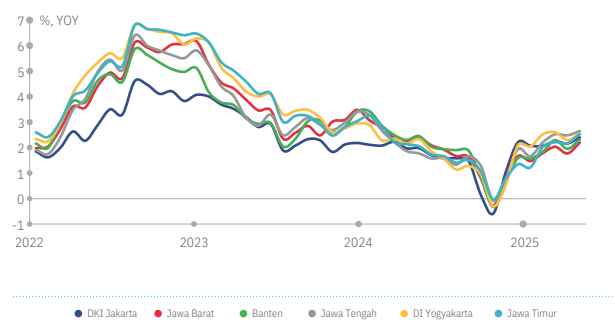
Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,72% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,65% (yoy).



Hampir seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah mencatatkan peningkatan tekanan inflasi pada triwulan laporan, kecuali Cilacap dan Rembang. Inflasi tahunan tertinggi berlangsung di Kota Semarang, sementara terendah terjadi di Kabupaten Rembang.

Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi di Kawasan Jawa

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (2,65%; yoy). Capaian inflasi tersebut sejalan dengan inflasi nasional yang juga meningkat menjadi sebesar 2,92% (yoy) dari sebesar 2,65% (yoy). Inflasi terutama dipengaruhi oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Inflasi lebih lanjut didorong oleh Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran serta Kelompok Transportasi. Perkembangan inflasi yang sama juga berlangsung pada seluruh provinsi di kawasan Jawa.

3.1. Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV 2025

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 sebesar 2,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,65% (yoy). Inflasi terutama disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil 1,14%; yoy)

seiring dengan kenaikan harga komoditas cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beras. Selain itu, peningkatan tekanan inflasi juga didorong oleh peningkatan harga Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (andil 0,76%; yoy) yang disebabkan oleh peningkatan harga emas.

Inflasi lebih lanjut didorong oleh inflasi pada Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (andil 0,24%; yoy) seiring dengan peningkatan harga bahan makanan pokok yang tercermin pada inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kemudian, Kelompok Transportasi juga meningkatkan inflasi (andil 0,18%; yoy), seiring dengan peningkatan harga bensin jenis pertamax dan pertamax turbo pada bulan Desember 2025.

Hampir seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan tekanan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali Cilacap dan Kabupaten Rembang. Inflasi tertinggi pada periode laporan

Tabel 3.1. Tabel Komoditas Utama Penyumbang Inflasi (Andil YoY)

OKTOBER 2025		NOVEMBER 2025		DESEMBER 2025	
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
Emas Perhiasan	0,59%	Emas Perhiasan	0,59%	Emas Perhiasan	0,66%
Cabai Merah	0,21%	Cabai Merah	0,21%	Cabai Rawit	0,15%
Telur Ayam Ras	0,15%	Beras	0,15%	Cabai Merah	0,14%
Bawang Merah	0,12%	Telur Ayam Ras	0,12%	Daging Ayam Ras	0,13%
Beras	0,12%	Mobil	0,12%	Beras	0,12%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 3.2. Tabel Komoditas Utama Penyumbang Deflasi (Andil YoY)

OKTOBER 2025		NOVEMBER 2025		DESEMBER 2025	
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
Bawang Putih	-0,07%	Bawang Putih	-0,09%	Bawang Putih	-0,10%
Telepon Seluler	-0,05%	Telepon Seluler	-0,04%	Telepon Seluler	-0,04%
Cabai Rawit	-0,03%	Tarif Kereta Api	-0,02%	Tarif Kereta Api	-0,04%
Tarif Kereta Api	-0,02%	Tomat	-0,02%	Kacang Panjang	-0,03%
Angkutan Udara	-0,01%	Sabun Detergen Bubuk	-0,01%	Tomat	-0,02%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

berlangsung di Kota Semarang yang mencapai 2,84% (yoy), sementara inflasi terendah terjadi di Kabupaten Rembang (2,47%; yoy).

Tabel 3.3. Tabel Inflasi Tahunan Kota Jawa Tengah

Kota	Inflasi (%.yoy)		
	II 2025	III 2025	IV 2025
Cilacap	2,18	2,81	2,79
Purwokerto	2,00	2,52	2,61
Wonosobo	1,92	2,48	2,64
Wonogiri	2,30	2,59	2,52
Rembang	2,67	2,89	2,47
Kudus	2,36	2,68	2,68
Surakarta	2,04	2,35	2,79
Semarang	2,18	2,72	2,84
Tegal	2,22	2,77	2,83

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

3.1.1. Inflasi Berdasarkan Kelompok

Inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 disebabkan oleh peningkatan harga pada **Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau**. Kenaikan harga terjadi pada komoditas pangan utama seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beras. Kenaikan harga bahan pokok utama turut mendorong peningkatan inflasi Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran.

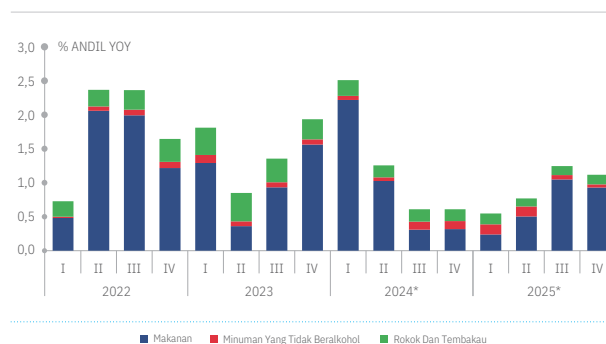
Selain itu, inflasi juga terjadi pada **Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya** seiring dengan kenaikan harga emas yang sejalan dengan meningkatnya ketegangan konflik geopolitik. Faktor lainnya adalah pelanggaran kebijakan moneter di sejumlah negara, antara lain penurunan suku bunga The FED, yang meningkatkan permintaan aset emas global.

Lebih lanjut, peningkatan tekanan inflasi juga disumbang oleh **Kelompok Transportasi**. Peningkatan harga bensin jenis pertamax dan pertamax turbo pada bulan Desember 2025 menjadi faktor utama peningkatan tekanan inflasi pada kelompok tersebut.

3.1.1.1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi sebesar **3,95% (yoy)** pada triwulan **IV 2025**, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,41% (yoy). Meskipun tekanan inflasi menurun, andil inflasinya relatif besar terhadap keseluruhan dengan pangsa hingga 1,14% (yoy). Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memiliki pangsa $\pm 27\%$ dari total Nilai Konsumsi Provinsi Jawa Tengah. Inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pada komoditas pangan utama. Adapun komoditas utama pendorong kenaikan inflasi pada periode laporan antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beras.

Grafik 3.3 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau



*Menggunakan SBH 2022 (2022=100)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 3.4. Perkembangan Inflasi Tahunan Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok

Inflasi Kelompok (%; Yoy)	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Umum	3,40	2,22	1,57	1,67	0,75	2,20	2,65	2,72
Makanan, Minuman dan Tembakau	9,08	4,48	2,18	2,13	1,88	2,68	4,41	1,14
Pakaian Dan Alas Kaki	1,53	1,18	0,94	0,90	1,32	1,25	1,24	0,06
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	0,30	0,17	0,78	1,21	-8,07	1,69	1,17	0,11
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,94	0,80	0,74	0,98	1,05	1,02	0,60	0,01
Kesehatan	1,87	1,61	1,40	1,58	1,82	1,82	1,83	0,07
Transportasi	0,84	1,47	0,96	0,58	1,21	1,13	0,97	0,18
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,58	-0,64	-0,78	-0,73	-0,76	-0,74	-0,68	-0,04
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,34	1,02	0,97	1,43	0,78	1,05	1,04	0,02
Pendidikan	1,92	1,87	1,92	1,74	1,75	1,78	2,72	0,17
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,15	2,09	1,97	2,26	2,36	2,71	2,49	0,24
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,04	4,33	4,81	5,59	7,34	8,14	8,73	0,76

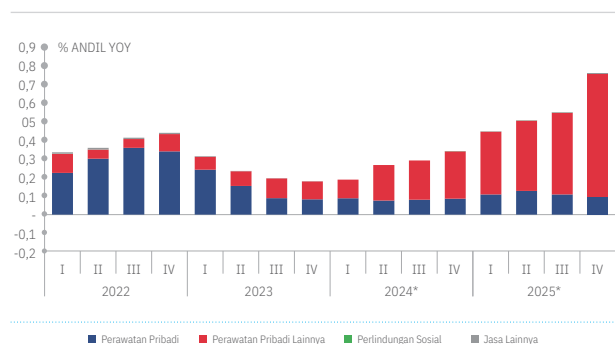
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Kenaikan harga pada komoditas cabai rawit dan cabai merah disebabkan oleh penurunan produksi akibat cuaca ekstrem yang terjadi pada bulan Desember. Kemudian, komoditas lain yang menjadi penyumbang inflasi pada kelompok tersebut adalah daging ayam ras disebabkan oleh peningkatan permintaan sejalan dengan pelaksanaan program MBG yang lebih masif. Selain itu, harga beras juga meningkat seiring memasuki masa tanam pada triwulan IV 2025. Lebih lanjut, peningkatan harga komoditas terjadi sejalan dengan permintaan yang meningkat selama periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga pangan pokok turut mendorong inflasi pada Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 2,24% (yoy).

3.1.1.2. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Peningkatan inflasi di Jawa Tengah juga bersumber dari **Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**. Inflasi pada kelompok tersebut pada triwulan IV 2025 sebesar **12,04% (yoy)**, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar **8,73% (yoy)**. Peningkatan inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan peningkatan harga emas dunia. Peningkatan harga emas dunia dipengaruhi oleh kenaikan permintaan investor terhadap aset safe haven seiring dengan tensi geopolitik yang masih berlanjut seperti konflik di Timur Tengah, Rusia-Ukraina, China-Jepang, dan Kamboja-Thailand. Lebih lanjut, permintaan emas oleh bank sentral terutama yang tergabung dalam BRICS dan ekspektasi pelanggaran kebijakan moneter di sejumlah negara, antara lain penurunan suku bunga oleh The FED turut mendorong peningkatan harga emas global hingga mencapai all time high pada periode laporan.

Grafik 3.4 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya



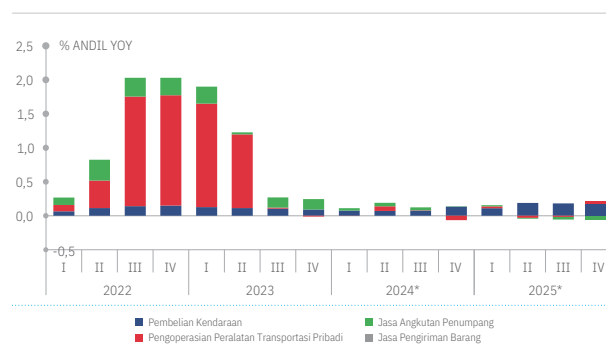
*Menggunakan SBH 2022 (2022=100)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

3.1.1.3. Kelompok Transportasi

Kelompok Transportasi turut mencatatkan peningkatan tekanan inflasi jika dibandingkan periode sebelumnya. Inflasi Kelompok Transportasi pada triwulan IV 2025 sebesar 1,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,97% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga bensin

Grafik 3.5 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Transportasi



*Menggunakan SBH 2022 (2022=100)

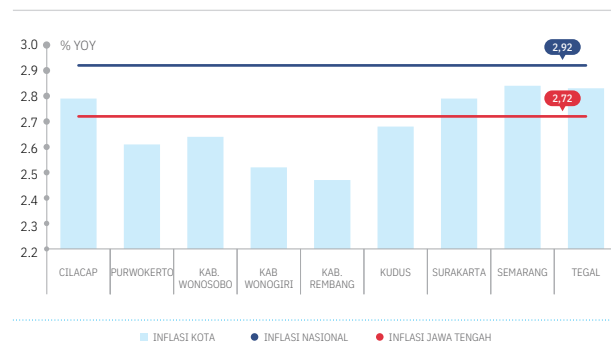
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

pada Desember 2025, yaitu Pertamina (pangsa 60%) dari Rp12.200 menjadi Rp12.750, Pertamina Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp13.750, Pertamina Green dari Rp13.000 menjadi Rp13.500, Dexcelite dari Rp13.900 menjadi Rp14.700, Pertamina Dex Rp14.200 menjadi Rp15.000. Peningkatan inflasi lebih lanjut tertahan oleh pemberian diskon tiket pesawat udara, kereta api, kapal laut, dan kapal penyeberangan pada periode Nataru 2025/2026.

3.2. Inflasi Kota – Kota di Provinsi Jawa Tengah

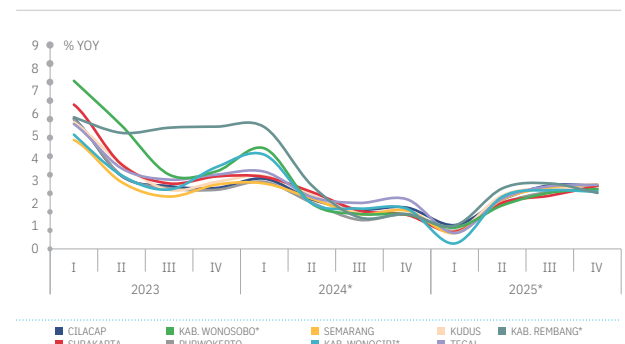
Peningkatan inflasi pada triwulan IV 2025 berlangsung hampir di seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah dengan intensitas yang relatif seragam, kecuali Cilacap dan Rembang. Jika ditinjau berdasarkan kelompoknya, perkembangan inflasi pada kota-kota pantauan inflasi di Jawa Tengah juga relatif seragam. Seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah mengalami peningkatan tekanan inflasi yang didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Inflasi juga di dorong oleh peningkatan harga pangan pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Secara tahunan, inflasi tertinggi pada triwulan IV 2025 berlangsung di Kota Semarang. Berdasarkan pangsa, Kota Semarang memiliki pangsa terbesar ($\pm 33\%$; SBH 2022) terhadap inflasi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Inflasi Kota Semarang pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,72% (yoy). Peningkatan inflasi di Kota Semarang terutama terjadi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (andil 0,99%; yoy). Kenaikan inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan peningkatan harga emas global di tengah ketidakpastian global. Selain itu, inflasi juga terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil 0,95%; yoy). Inflasi disebabkan peningkatan harga komoditas beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, sigaret kretek mesin (SKM), dan daging ayam ras. Lebih lanjut, Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran mengalami inflasi didorong peningkatan harga nasi dengan lauk yang sejalan dengan peningkatan harga bahan baku pangan pokok.

Grafik 3.6 Inflasi Tahunan Triwulan IV 2025 Kota Pantauan di Jawa Tengah

*Menggunakan SBH 2022 (2022=100)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.7 Perkembangan Inflasi Tahunan Triwulan IV 2025 Kota Pantauan di Jawa Tengah

*Menggunakan SBH 2022 (2022=100)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan Kabupaten Rembang Berdasarkan Kelompok

Inflasi Kelompok (%; Yoy)	Jawa Tengah	Kota Semarang	Kota Surakarta	Cilacap	Kudus	Kota Tegal	Purwokerto	Kab. Wonosobo	Kab. Wonogiri	Kab. Rembang
Umum	2,72	2,84	2,79	2,79	2,68	2,83	2,61	2,64	2,52	2,47
Makanan, Minuman dan Tembakau	3,95	3,98	4,61	3,98	4,15	4,21	3,48	3,67	4,16	3,76
Pakaian Dan Alas Kaki	1,09	1,11	0,42	0,82	1,92	0,52	1,62	0,87	0,38	1,69
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	0,96	1,12	0,28	1,61	0,67	0,16	1,84	0,96	0,06	0,42
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	0,24	0,13	-0,75	-0,06	1,35	0,23	0,76	1,07	-0,7	0,5
Kesehatan	1,76	1,04	3,26	1,44	4,36	3,33	1,44	1,69	1,7	0,34
Transportasi	1,40	1,17	1,40	1,58	1,84	1,54	1,17	1,98	1,46	1,39
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,67	-0,63	-0,84	-0,66	-1,35	-0,46	-0,05	-0,8	-0,65	-1,16
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,02	0,83	0,94	0,4	0,8	-0,01	1,23	1,67	0,52	3,85
Pendidikan	2,66	3,16	1,91	3,58	1,31	3,26	1,95	1,57	3,05	3,98
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,24	2,55	3,20	1,99	2,18	2,23	2,12	0,7	1,85	2,06
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	12,04	15,41	12,88	10,33	8,66	12,97	11,53	11,2	9,33	7,27

■ Lebih rendah dari inflasi Jawa Tengah ■ Lebih tinggi dari inflasi Jawa Tengah

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sementara itu, inflasi terendah terjadi di Kabupaten Rembang yang menjadi kabupaten/kota penghitungan inflasi di Jawa Tengah sejak tahun 2024. Berdasarkan data BPS, pangsa Kabupaten Rembang pada inflasi Provinsi Jawa Tengah adalah sekitar 6,24%. Kabupaten Rembang masih mengalami inflasi pada triwulan IV 2025 (2,47% (yoy), namun dengan *magnitude* yang lebih rendah dari triwulan sebelumnya (2,89%; yoy). Inflasi pada periode laporan terutama dipengaruhi oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring dengan peningkatan harga komoditas cabai merah, cabai rawit, beras, daging ayam ras, sigaret kretek tangan (SKT), dan kelapa. Selain itu, inflasi juga terjadi pada komoditas Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya seiring dengan kenaikan harga emas perhiasan, serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran seiring dengan kenaikan harga bahan baku pangan pokok.

Ke depan, pengendalian disparitas inflasi antardaerah akan menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas harga di Jawa Tengah. Sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pelaku usaha akan terus ditingkatkan dengan melalui strategi 4K, yaitu

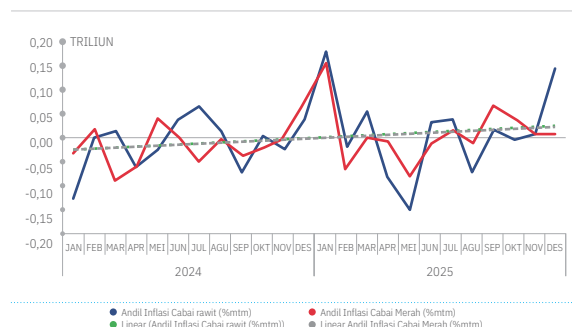
ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, terutama untuk menyalurkan komoditas dari kantong surplus ke wilayah dengan tekanan harga lebih tinggi. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menekankan penguatan sektor pertanian dan hilirisasi pangan untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

BOKS 3

Penguatan Regenerasi Petani Muda sebagai Strategi Transformasi Hortikultura dan Stabilitas Inflasi Pangan

Stabilitas harga pangan merupakan salah satu prasyarat penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. Dinamika inflasi pangan yang relatif sensitif terhadap gangguan produksi dan distribusi menunjukkan peran penguatan sektor pertanian dalam pengendalian tekanan harga di daerah. Salah satu komoditas pangan yang sering menjadi faktor pendorong tekanan inflasi adalah cabai termasuk di Kabupaten Banyumas. Komoditas cabai secara historis menjadi salah satu penyumbang utama inflasi kelompok *volatile food*, terutama pada periode peningkatan permintaan musiman seperti Ramadan dan Idulfitri (Grafik 1).

Grafik 1. Pergerakan Andil Inflasi Komoditas Cabai Rawit dan Cabai Merah di Kota IHK Purwokerto



Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, diolah

Volatilitas harga cabai dipengaruhi oleh hambatan pada sisi produksi seperti gangguan produksi, serangan organisme pengganggu tanaman, maupun faktor cuaca. Di sisi lain, sektor pertanian juga menghadapi tantangan struktural berupa menurunnya regenerasi pelaku usaha tani. Struktur demografi petani yang didominasi kelompok usia lanjut dan berpotensi menurunkan adopsi inovasi teknologi serta peningkatan kapasitas manajemen usaha tani dalam jangka menengah. Kondisi tersebut apabila tidak diantisipasi dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan risiko penurunan produksi hortikultura dan tekanan inflasi pangan daerah.

Dalam merespons tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama mitra strategis mengembangkan pendekatan ekosistem melalui dua program utama, yakni Program Muda Tani Agritransform sebagai inkubator petani muda berbasis kewirausahaan, serta Program TAKARA MERDAYA (Taruna Karya Mandiri Menuju Kecamatan Berdaya) sebagai penguatan produksi cabai rawit berbasis wilayah kecamatan. Sinergi kedua program tersebut diarahkan untuk mencetak generasi petani

muda, memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian sekaligus meningkatkan kontinuitas pasokan hortikultura.

Program Muda Tani Agritransform: Inkubator Agripreneur Hortikultura Berbasis Teknologi

Program Muda Tani Agritransform dilaksanakan sebagai model pembelajaran terintegrasi yang menggabungkan praktik lapangan, *mentoring* intensif, serta penguatan kewirausahaan agribisnis. Program ini dilaksanakan pada periode November 2025 hingga Februari 2026 di lahan *demonstration plot* (demplot) seluas 2.000 meter persegi di Balai Penyuluhan Pertanian Sumbang. Kurikulum pelatihan dirancang mengikuti siklus produksi tanaman cabai secara menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari tahap awal (pengolahan lahan dan penanaman), tahap vegetatif dan generatif hingga pemasaran hasil panen.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Muda Tani

Sumber: Pemkab Banyumas

Pada tahap awal, peserta dibekali pemahaman mengenai pengujian kualitas tanah, pengolahan lahan dan teknik penanaman bibit. Selain itu, peserta memperoleh pelatihan pembuatan pupuk mandiri berbasis bahan lokal berupa pupuk organik cair dan pupuk padat. Secara ekonomi, penggunaan pupuk mandiri bahan lokal berpotensi menekan biaya produksi yang selama ini menjadi salah satu sumber kerentanan usaha tani hortikultura terhadap kenaikan harga input. Pendekatan ini mampu menekan ketergantungan terhadap pupuk komersial yang rentan terhadap fluktuasi harga. Dalam jangka menengah, peningkatan efisiensi tersebut diperkirakan mampu memperkuat daya tahan petani menghadapi fluktuasi harga komoditas.

BOKS 2

Pada tahap vegetatif dan generatif, pelatihan difokuskan pada *monitoring* pertumbuhan tanaman, pemupukan, serta penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Dalam tahap ini, penggunaan agen hayati seperti *trichoderma* dan *beauveria bassiana* diperkenalkan sebagai alternatif pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Selanjutnya, dari sisi hilir, peserta juga memperoleh pembelajaran mengenai standar kualitas panen, teknik sortasi dan *grading*, serta manajemen pascapanen. Sesi bersama *offtaker* juga dilaksanakan untuk memperluas target pasar serta memperkuat kemitraan.

TAKARA MERDAYA: Penguatan Produksi Cabai Rawit Berbasis Kecamatan

Disamping penguatan kapasitas individu melalui Program Muda Tani Agritransform, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengimplementasikan Program TAKARA MERDAYA sebagai strategi penguatan produksi hortikultura berbasis wilayah. Program ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Kecamatan Berdaya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya yang menekankan penguatan peran kecamatan sebagai pusat koordinasi pembangunan berbasis potensi lokal.

Program TAKARA MERDAYA dilaksanakan di empat kecamatan, yaitu Sumbang, Baturraden, Cilongok, dan Sumpiuh, dengan melibatkan 42 petani milenial yang tersebar di 42 desa dengan total luas lahan komoditas cabai rawit sekitar 2,1 hektare. Cabai rawit dipilih sebagai komoditas utama program mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap pembentukan inflasi daerah. Tingginya volatilitas harga cabai rawit memerlukan intervensi pada sisi produksi melalui pengaturan pola tanam, peningkatan produktivitas, serta penguatan kontinuitas pasokan.

Peserta memperoleh dukungan sarana produksi pertanian berupa bibit cabai rawit, mulsa plastik, ajir, pupuk, serta pestisida yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lahan. Sebelum pelaksanaan tanam, seluruh peserta mengikuti bimbingan teknis budidaya yang mencakup persiapan lahan, pemeliharaan tanaman, pengendalian hama penyakit, hingga panen dan pascapanen.

Penanaman simbolis yang dilaksanakan di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Sumbang menjadi titik awal implementasi kegiatan di lapangan sekaligus bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan petani

milenial dalam pengembangan sentra cabai rawit. Tahapan program selanjutnya ditandai dengan pelaksanaan panen perdana cabai rawit di Desa Banteran pada 11 Februari 2026, yang menjadi indikator awal keberhasilan proses budidaya sekaligus momentum penguatan kesiapan pasokan komoditas hortikultura daerah. Berdasarkan laporan realisasi produksi, total akumulasi hasil panen cabai rawit peserta program telah mencapai sekitar 1,12 ton dari lahan seluas 2,1 hektare yang tersebar di berbagai lokasi pertanian di empat kecamatan pelaksana.



Sumber: Bank Indonesia

Secara ekonomi, tambahan suplai cabai rawit dari lokasi pelaksanaan program di wilayah Kabupaten Banyumas menjadi faktor penting dalam memperkuat ketersediaan pasokan lokal, khususnya menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri, ketika permintaan masyarakat cenderung meningkat. Keberlanjutan panen bertahap yang dihasilkan peserta program diperkirakan turut membantu meredam potensi lonjakan harga melalui mekanisme penguatan sisi pasokan.

Dampak terhadap Stabilitas Inflasi dan Ketahanan Pangan

Integrasi Program Muda Tani Agritransform dan TAKARA MERDAYA menunjukkan pendekatan transformasi hortikultura pada aspek produksi dan pasca panen. Program Muda Tani berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan kewirausahaan petani muda, sementara TAKARA MERDAYA memperkuat skala produksi berbasis wilayah serta kontinuitas pasokan. Pendekatan tersebut sejalan dengan strategi pengendalian inflasi pangan yang menitikberatkan pada penguatan sisi pasokan. Peningkatan produksi cabai

BOKS 3

rawit lokal diperkirakan mampu mengurangi ketergantungan pasokan antarwilayah yang selama ini menjadi salah satu sumber volatilitas harga.

Selain itu, keterlibatan petani milenial mendorong adopsi teknologi budidaya yang lebih baik serta pengelolaan usaha tani yang lebih modern. Dalam jangka menengah, peningkatan profesionalisme pelaku usaha tani diharapkan mampu terus meningkatkan produktivitas, memperbaiki efisiensi rantai pasok, dan menurunkan risiko *mismatch* pasokan pada periode permintaan tinggi.

Meskipun memiliki prospek positif, sejumlah risiko tetap perlu diantisipasi. Variabilitas iklim yang meningkat berpotensi memperbesar risiko gangguan produksi hortikultura. Selain itu, keberlanjutan usaha tani peserta setelah fase program memerlukan dukungan akses pembiayaan, kelembagaan pemasaran, serta kesinambungan pendampingan teknis.

Ke depan, model sinergi antara inkubasi petani muda melalui Program Muda Tani dan penguatan produksi wilayah melalui TAKARA MERDAYA berpotensi direplikasi pada komoditas pangan lainnya. Pengembangan klaster hortikultura berbasis generasi muda yang terintegrasi dengan teknologi pertanian presisi diperkirakan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat stabilitas inflasi pangan di Kabupaten Banyumas.

Secara keseluruhan, kedua program tersebut menunjukkan pendekatan transformasi struktural sektor pertanian yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia dan kelembagaan agribisnis.





Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kinerja perbankan di Jawa Tengah pada IV 2025 relatif melambat, tercermin dari penyaluran kredit yang melambat.



Penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah mengalami kontraksi lebih dalam. Kredit perbankan pada triwulan IV 2025 sebesar Rp384,01 triliun, atau terkontraksi 0,95% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 0,05% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, kontraksi pertumbuhan kredit bersumber oleh kontraksi kredit modal kerja.



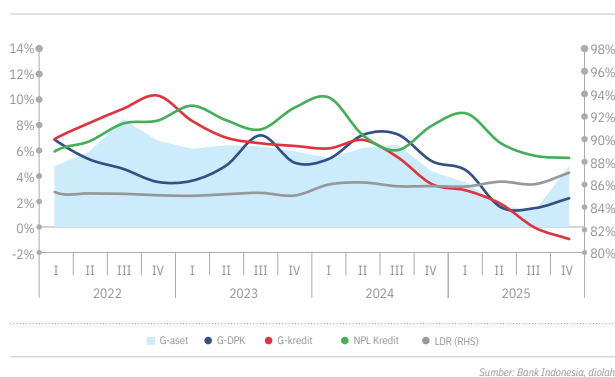
Penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi masih terkontraksi. Kredit perbankan Jawa Tengah untuk korporasi pada triwulan IV 2025 mencapai Rp79,45 triliun atau terkontraksi 4,87% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 2,30% (yoy). Secara sektoral, kontraksi kredit korporasi berasal dari kontraksi LU Industri Pengolahan dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.



Kredit konsumsi rumah tangga (RT) menyumbang 30,46% dari total kredit perbankan di Jawa Tengah. Kredit konsumsi RT tumbuh sebesar 4,74% (yoy) pada triwulan IV 2025, melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2025 sebesar 5,42% (yoy). Meskipun kredit konsumsi RT secara keseluruhan melambat, Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor tumbuh lebih cepat.



Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2025 terkontraksi. Kredit UMKM pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi sebesar 2,68% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,28% (yoy). Hal ini terutama disebabkan oleh kontraksi Kredit Modal Kerja UMKM.

Grafik 4.1 Perkembangan Kinerja Perbankan Jawa Tengah

4.1 Perkembangan Kinerja Perbankan Jawa Tengah

Berdasarkan lokasi bank⁸, kinerja perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 relatif menurun. Intermediasi perbankan yang tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada triwulan IV 2025 sebesar 88,34%, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 88,54%. Sementara itu, *Non-Performing Loan* (NPL) meningkat dari 3,35% pada triwulan III 2025 menjadi 4,26% pada triwulan laporan.

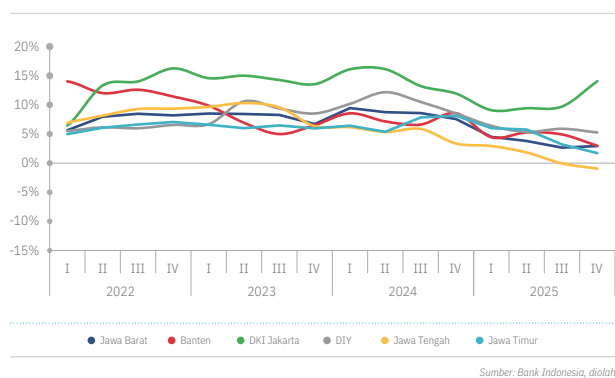
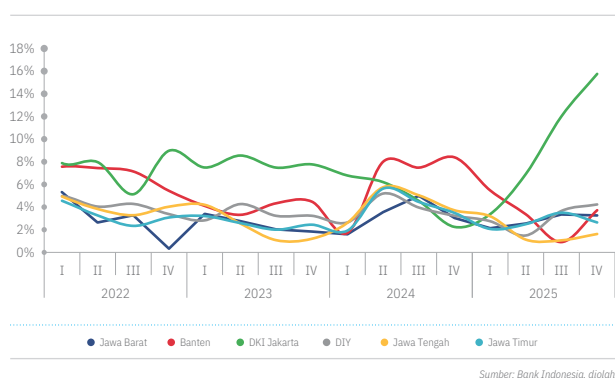
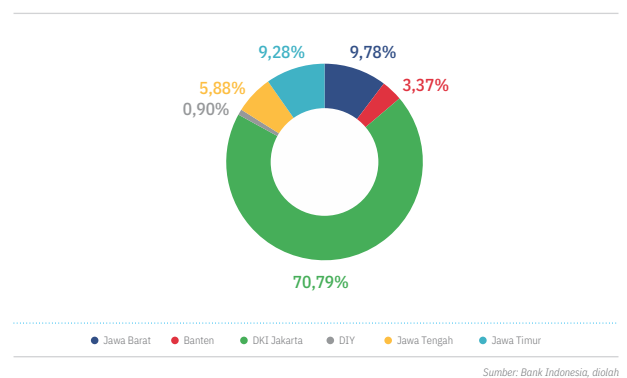
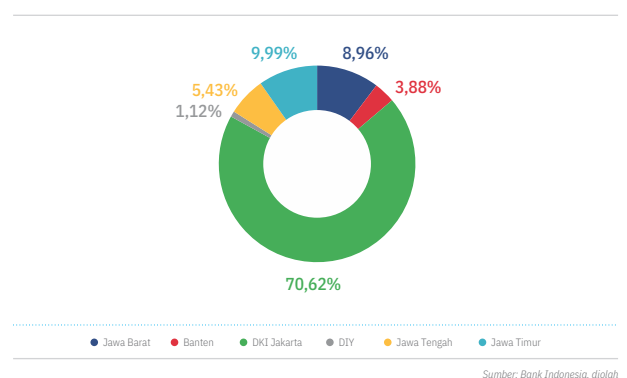
Penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah mengalami kontraksi lebih dalam. Kredit perbankan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 sebesar Rp384,01 triliun atau terkontraksi

0,95% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan III 2025 yang sebesar 0,05% (yoy) atau mencapai Rp384,98 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, kontraksi kredit disebabkan oleh kontraksi kredit modal kerja dan perlambatan kredit konsumsi. Secara sektoral, kredit LU utama seperti LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE), Industri Pengolahan juga mengalami kontraksi. Sementara itu, kredit sektor Konstruksi tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan III 2025.

Kredit Jawa Tengah menyumbang 5,88% dari total kredit di Pulau Jawa atau terbesar ke-empat setelah provinsi DKI Jakarta (pangsa 70,79%), Jawa Barat (pangsa 9,78%), dan Jawa Timur (pangsa 9,28%). Pertumbuhan kredit di Jawa Tengah terendah se-Jawa yaitu terkontraksi sebesar 0,95% (yoy), sedangkan di provinsi lain masih tumbuh positif yaitu DKI Jakarta tumbuh sebesar 14,07% (yoy), DIY sebesar 5,25% (yoy), Jawa Barat sebesar 2,93% (yoy), Banten 2,96% (yoy), dan Jawa Timur 1,71% (yoy).

4.1.1 Perkembangan Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai Rp384,01 triliun atau kontraksi 0,95% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 0,05% (yoy) atau mencapai Rp384,98 triliun.

Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan Pulau Jawa**Grafik 4.4** Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Pulau Jawa**Grafik 4.3** Pangsa Penyaluran Kredit Perbankan Pulau Jawa**Grafik 4.5** Pangsa Penyaluran DPK Perbankan Pulau Jawa

8. Lokasi bank adalah pengukuran indikator perbankan berdasarkan bank yang berlokasi di Jawa Tengah.

Perlambatan kredit disebabkan oleh kontraksi yang lebih dalam pada kredit modal kerja, yaitu dari kontraksi 4,82% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi kontraksi 7,59% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, kredit konsumsi masih tumbuh positif namun melambat dari 4,74% (yoy) menjadi 5,42% (yoy). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat dari 4,82% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 4,44% (yoy) pada triwulan laporan. Di sisi lain, kredit Investasi meningkat dari 5,62% (yoy) menjadi 9,60% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah masih didominasi empat LU utama, yaitu LU perdagangan (29,89%), industri pengolahan (14,16%), pertanian (6,79%), dan konstruksi (5,14%).

Kontraksi pertumbuhan kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 terutama disebabkan oleh kontraksi pada kredit LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) dan LU Industri Pengolahan serta perlambatan pertumbuhan kredit LU Konstruksi. Kredit pada LU PBE berkontraksi lebih dalam dari kontraksi 2,20% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi kontraksi 2,85% (yoy) pada triwulan laporan, sedangkan kredit LU Industri Pengolahan berkontraksi lebih dalam dari kontraksi 3,25% (yoy) menjadi kontraksi 4,97% (yoy). Kredit LU Konstruksi tumbuh

Tabel 4.1. Pengelompokan Kredit Berdasarkan Nilai, Triwulan IV 2025

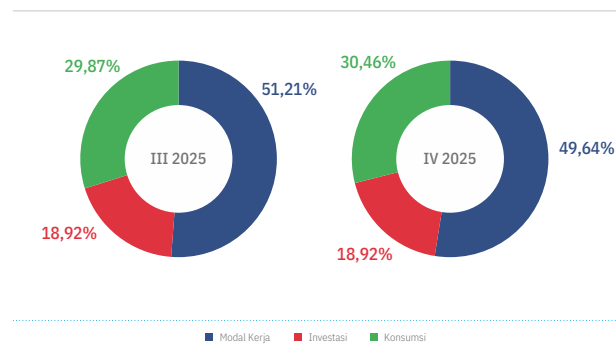
Kredit	Nominal (Rp Miliar)	Jumlah Rekening	Presentase Nominal	Presentase Rekening
0-100 juta	92.838	3.487.617	24,12%	82,16%
100-500 juta	122.457	689.019	31,82%	16,23%
500 juta-1 Miliar	21.536	35.905	5,60%	0,85%
1-10 M	62.551	29.453	16,25%	0,69%
10-20 M	85.488	2.697	22,21%	0,06%
Total	384.870	4.244.691	100,00%	100,00%

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

positif meskipun melambat dari 14,81% (yoy) menjadi 13,23% (yoy). Di sisi lain, kontraksi kredit yang lebih dalam tertahan oleh percepatan pertumbuhan kredit LU Pertanian dari 3,82% (yoy) menjadi 8,60% (yoy).

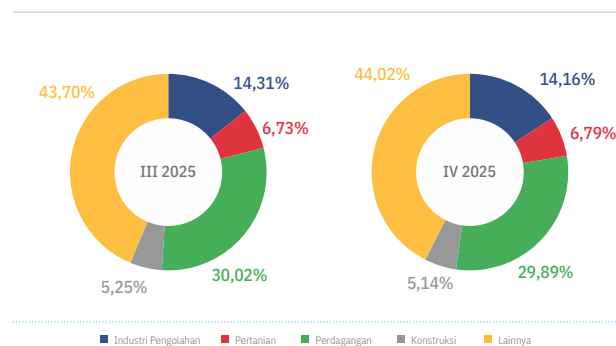
Berdasarkan kategori nilai nominal, sebagian besar penyaluran kredit di Jawa Tengah terkonsentrasi pada kredit dengan nilai di bawah Rp500 juta, dengan pangsa 55,94% dari total kredit. Dari sisi jumlah debitur, sebanyak 99,24% debitur (dengan catatan satu debitur dapat memegang lebih dari satu kredit) memiliki kredit bernilai kurang dari Rp1 miliar. Kondisi ini

Grafik 4.6 Pangsa Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Penggunaan

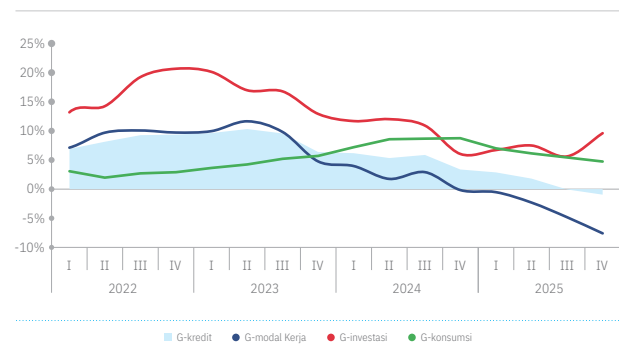


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8 Pangsa Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor Ekonomi

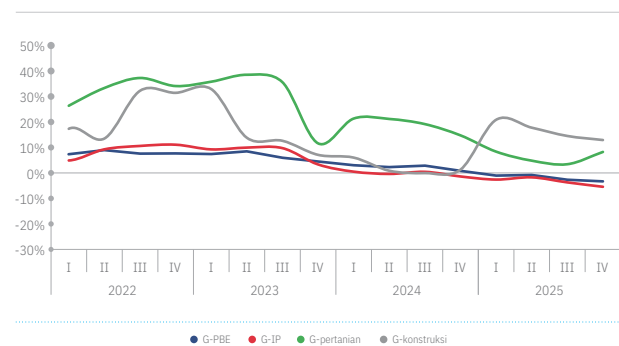


Grafik 4.7 Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Penggunaan (yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.9 Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy)

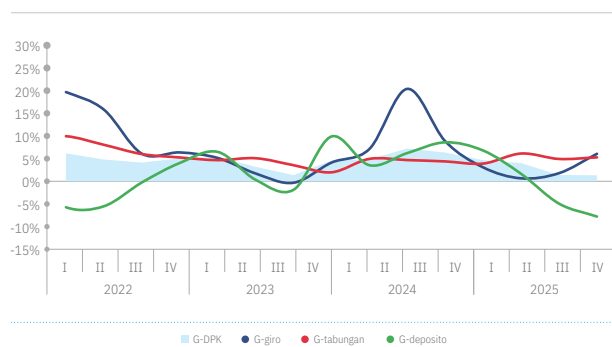


menunjukkan bahwa penyaluran kredit di Jawa Tengah didominasi oleh segmen nominal kecil hingga menengah. Dengan demikian, struktur pembiayaan perekonomian Jawa Tengah lebih terdiversifikasi dan relatif lebih tahan terhadap guncangan. Namun demikian, masih terdapat risiko kredit mengingat kredit dengan nilai di atas Rp10 miliar menyumbang 22,21% dari total kredit dan dimiliki hanya oleh 0,06% debitur.

4.1.2 Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

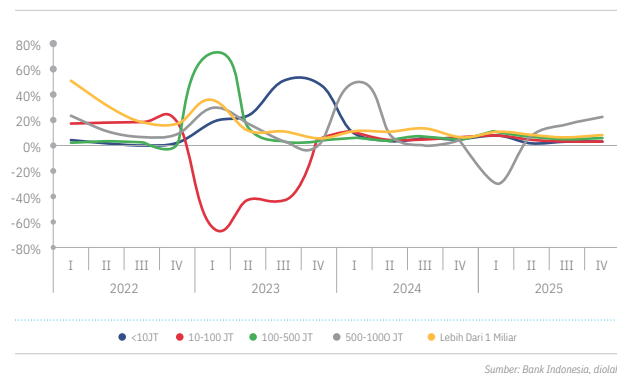
DPK perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai Rp434,70 triliun atau tumbuh 2,26% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,48% (yoy). Berdasarkan golongan nasabah, peningkatan DPK didorong oleh pertumbuhan DPK Perseorangan dan perbaikan DPK Korporasi.

Grafik 4.10 Perkembangan DPK Perbankan Umum Jawa Tengah (yoy)

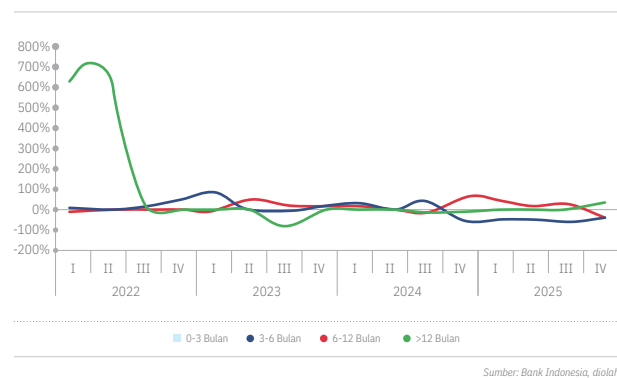


DPK Perseorangan tumbuh positif meskipun melambat dari 3,10% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 2,71% (yoy) pada triwulan laporan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan pertumbuhan Giro, Tabungan dan Deposito. Giro mengalami peningkatan pertumbuhan dari 0,22% (yoy) menjadi 36,74% (yoy). Tabungan juga mengalami peningkatan pertumbuhan dari 3,42% (yoy) menjadi 5,13% (yoy). Demikian juga dengan Deposito yang mengalami peningkatan pertumbuhan dari 1,89% (yoy) menjadi 2,35% (yoy). Sementara itu, DPK korporasi masih berkontraksi meskipun mulai menurun dari kontraksi 1,85% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi berkontraksi sebesar 0,74% (yoy) pada triwulan IV 2025. Perbaikan kontraksi tersebut didorong oleh peningkatan pertumbuhan Giro Korporasi dari 9,79% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 16,15% (yoy) pada triwulan laporan.

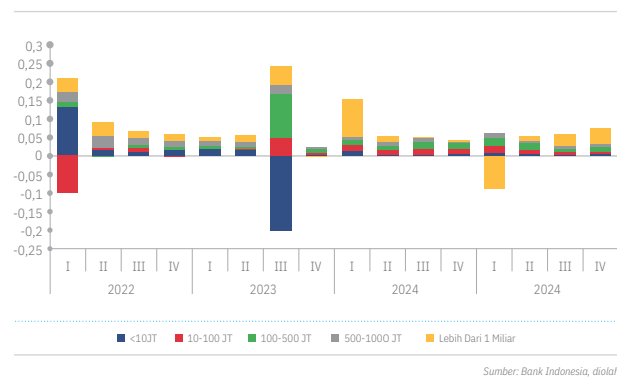
Grafik 4.11 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai (yoy)



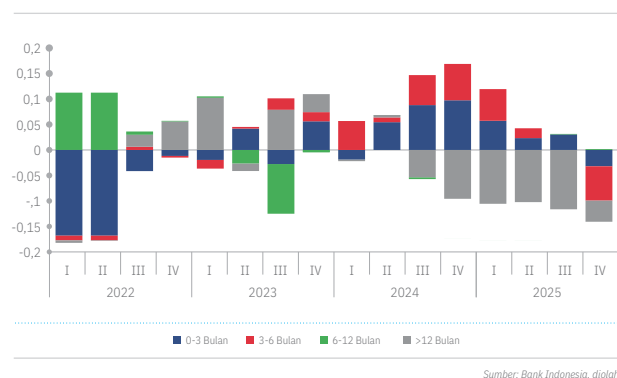
Grafik 4.13 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Jangka Waktu (yoy)

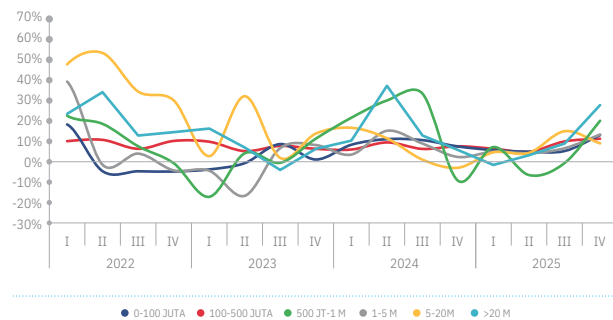


Grafik 4.12 Andil Pertumbuhan Giro Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai

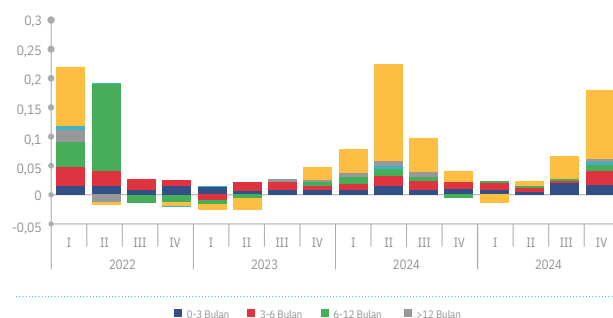


Grafik 4.14 Andil Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



Grafik 4.15 Perkembangan Pertumbuhan Giro Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai (yoy)

Sumber: Bank Indonesia, diolah

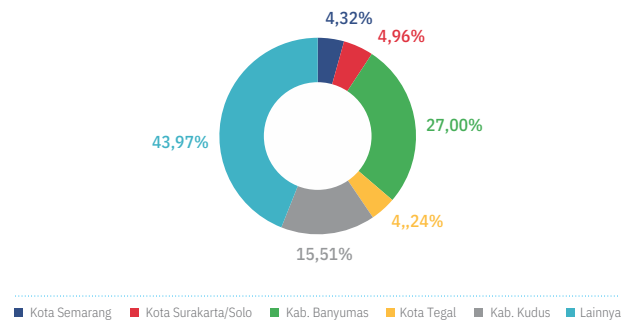
Grafik 4.16 Andil Pertumbuhan Giro Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Jangka Waktu

Sumber: Bank Indonesia, diolah

4.2 Perkembangan Kinerja Perbankan secara Spasial

4.2.1 Perkembangan Penyaluran Kredit Spasial

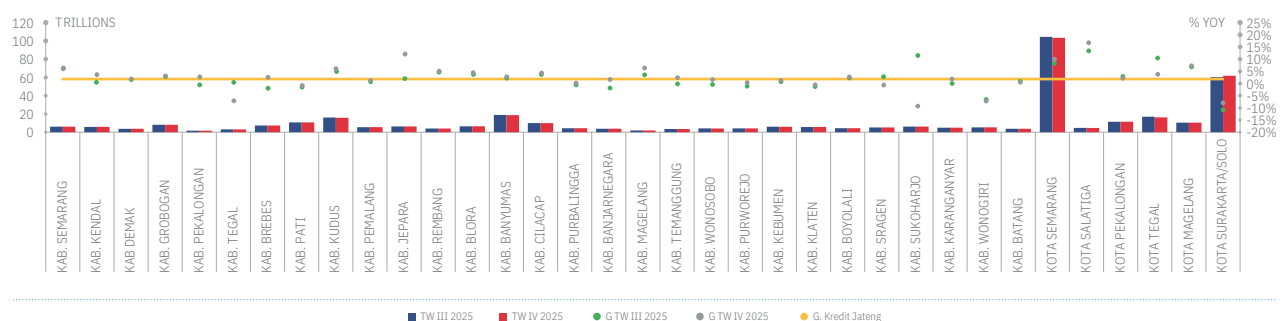
Penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah terkonsentrasi pada lima daerah utama, yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus dan Kota Tegal. Kelima wilayah ini menyumbang 56,03% dari total penyaluran kredit. Sebagian besar kredit disalurkan ke daerah-daerah yang

Grafik 4.17 Pangsa Penyaluran Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tw IV 2025

Sumber: Bank Indonesia, diolah

menjadi motor penggerak perekonomian Jawa Tengah, terutama pada kredit LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Pertanian, serta LU Industri Pengolahan.

Secara spasial, pertumbuhan kredit di lima kota dengan pangsa terbesar tersebut cenderung mengalami penurunan yaitu kredit yang disalurkan di Kota Semarang, Kota Tegal dan Kabupaten Kudus. Sementara, Kota Surakarta dan Kabupaten Banyumas yang mengalami perbaikan pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit di Kota Semarang melambat dari 5,59% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 4,14% (yoy) pada triwulan laporan. Pertumbuhan kredit di Kota Tegal juga menurun dari 6,24% (yoy) menjadi 0,82% (yoy). Sementara, pertumbuhan kredit di Kabupaten Kudus mengalami kontraksi yang lebih dalam dari kontraksi 8,48% (yoy) menjadi kontraksi 14,68% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan kredit di Kota Surakarta masih melanjutkan kontraksi meskipun sedikit mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya yaitu kontraksi 6,98% (yoy) menjadi kontraksi 5,47% (yoy). Pertumbuhan Kredit di Kabupaten Banyumas juga menunjukkan perbaikan dari kontraksi 0,07% (yoy) menjadi 0,86% (yoy).

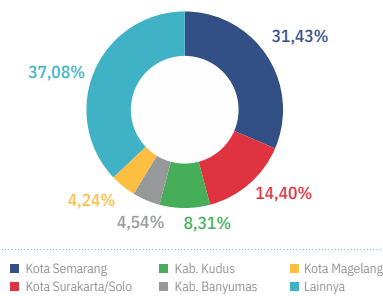
Grafik 4.18 Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

4.2.2 Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Spasial

Sejalan dengan perkembangan penyaluran kredit, penghimpunan DPK secara spasial pada triwulan IV 2025 terpusat di Kota Semarang (pangsa 31,43%), Kota Surakarta (pangsa 14,40%), Kabupaten Kudus (pangsa 8,31%), Kabupaten Banyumas (pangsa 4,54%) dan Kota Tegal (pangsa 4,24%). Skala aktivitas ekonomi di lima kabupaten/kota utama tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap jumlah keseluruhan penghimpunan DPK di wilayah Jawa Tengah.

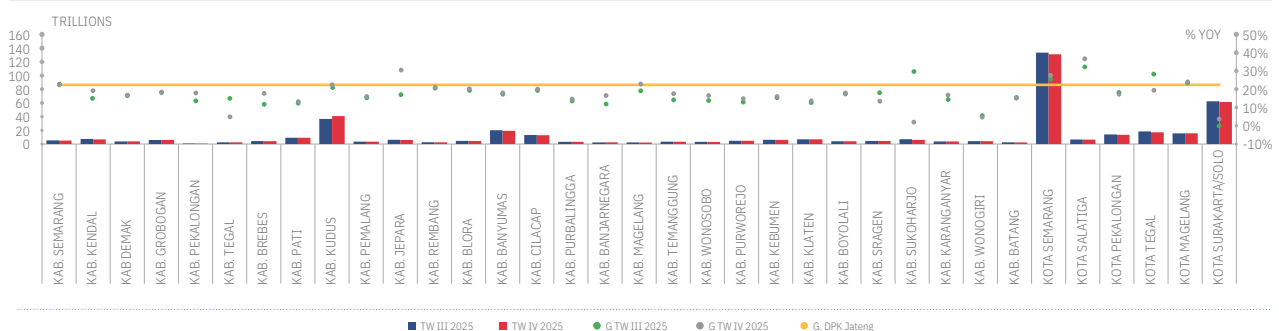
Grafik 4.19 Pangsa Penghimpunan DPK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tw IV 2025



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan DPK pada triwulan IV 2025 di kota-kota utama di Jawa Tengah cenderung meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya terutama Kota Surakarta, Kabupaten Kudus dan Kota Semarang. Sementara Kabupaten Banyumas dan Kota Tegal mengalami perlambatan pertumbuhan DPK. Pertumbuhan DPK di Kota Surakarta mengalami peningkatan dari 3,43% (yoy) triwulan III 2025 menjadi 3,70% (yoy) pada triwulan laporan. Pertumbuhan DPK di Kabupaten Kudus juga mengalami peningkatan yang signifikan dari kontraksi 4,93% (yoy) menjadi tumbuh positif 5,62% (yoy). Sementara, Kota Semarang mengalami perbaikan kontraksi dari kontraksi 5,40% (yoy) menjadi kontraksi 4,44% (yoy). Di sisi lain, Kabupaten Banyumas mengalami perlambatan pertumbuhan DPK dari 7,22% (yoy) menjadi 5,68% (yoy). Pertumbuhan DPK di Kota Tegal juga mencatatkan perlambatan pertumbuhan dari 13,52% (yoy) menjadi 8,76% (yoy).

Grafik 4.20 Pertumbuhan Penghimpunan DPK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

4.3 Perkembangan Sektor Korporasi Jawa Tengah

4.3.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Korporasi

Kerentanan finansial sektor korporasi di Jawa Tengah masih dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. Dari sisi domestik, pelemahan daya beli masyarakat berpotensi menurunkan permintaan terhadap produk perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan volume penjualan dan pendapatan. Selain itu, penyesuaian kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan dan ketenagakerjaan turut memengaruhi struktur biaya dan strategi operasional dunia usaha.

Sementara itu, dari sisi global, tekanan harga komoditas dan fluktuasi nilai tukar masih menjadi faktor risiko khususnya bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan biaya input mendorong peningkatan biaya produksi dan berpotensi menekan margin keuntungan. Hasil liaison dengan sejumlah perusahaan besar di Jawa Tengah mengindikasikan bahwa biaya bahan baku tetap menjadi komponen dominan dalam struktur biaya operasional. Tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku menjadikan korporasi lebih rentan terhadap gejolak eksternal dan volatilitas pasar global.

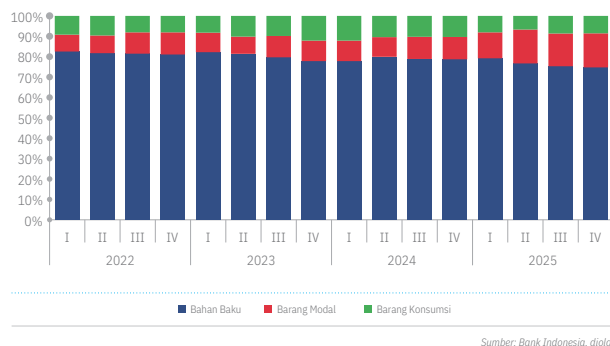
Proporsi impor bahan baku terhadap total biaya produksi di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 sebesar 74,75%, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 75,29%. Pangsa impor bahan baku terhadap total biaya korporasi yang cukup tinggi mencerminkan ketergantungan industri di Jawa Tengah terhadap pasokan dari negara lain.

Dengan demikian, eksposur perusahaan terhadap risiko gangguan pasokan, volatilitas harga global, dan fluktuasi nilai tukar meningkat. Tekanan eksternal seperti kenaikan harga komoditas dunia maupun depresiasi Rupiah berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya menekan margin keuntungan dan memperbesar kerentanan keuangan korporasi. Oleh karena itu, diversifikasi sumber bahan

baku serta peningkatan substitusi dengan bahan baku lokal menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sektor industri di Jawa Tengah.

Kinerja korporasi di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mengalami perlambatan sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit korporasi. Hal ini tercermin pada perlambatan pertumbuhan output lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan IV 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya. Industri pengolahan yang memiliki pangsa 33,27% terhadap PDRB Jawa Tengah tumbuh 6,57% (yoy) pada triwulan IV 2025, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,21% (yoy). Perlambatan tersebut selaras dengan perkembangan *Purchasing Managers Index* (PMI) yang melambat dari 51,1 pada triwulan III 2025 menjadi 50,47 pada triwulan IV 2025.

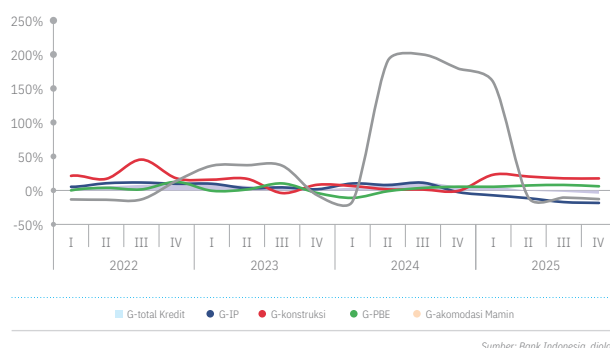
Grafik 4.21 Komposisi Impor Jawa Tengah



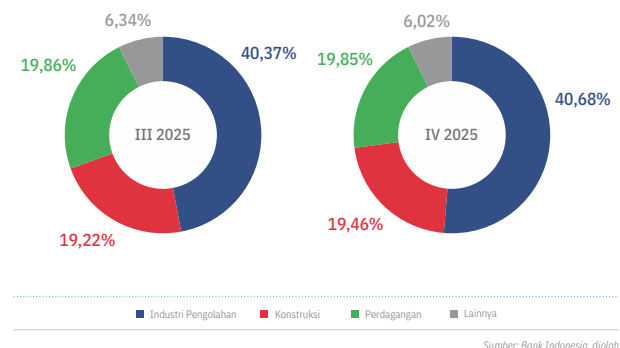
4.3.2 Perkembangan Kredit Korporasi di Jawa Tengah

Penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi mengalami kontraksi. Kredit perbankan Jawa Tengah untuk korporasi pada triwulan IV 2025 mencapai Rp79,46 triliun atau berkontraksi sebesar 4,87% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan III 2025 sebesar 2,30% (yoy). Secara sektoral, kontraksi pada kredit korporasi disebabkan oleh melambatnya penyaluran kredit korporasi di seluruh LU utama

Grafik 4.22 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor (yoy)



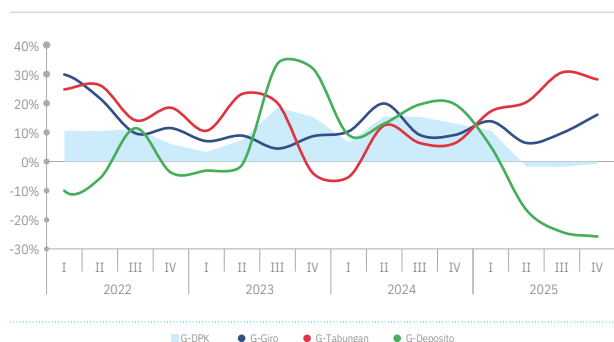
Grafik 4.23 Perkembangan Pangsa Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor



Jawa Tengah terutama LU Industri Pengolahan, LU Akmamin, LU PBE dan LU konstruksi. Pertumbuhan kredit LU Industri Pengolahan berkontraksi sebesar 18,42% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 17,17%. Penyaluran kredit pada LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi sebesar 12,77% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 10,49% (yoy). Sedangkan penyaluran kredit korporasi pada LU PBE masih tumbuh positif meskipun melambat dari 8,11% (yoy) menjadi 6,14% (yoy). Sementara kredit pada LU konstruksi juga mengalami perlambatan dari 17,81% (yoy) menjadi 17,72% (yoy).

4.3.3 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Korporasi di Jawa Tengah

DPK Korporasi di Jawa Tengah didominasi oleh DPK Bukan Lembaga Keuangan (pangsa 75,13%), Lembaga Keuangan Non Bank (pangsa 13,06%), dan BUMN (pangsa 10,32%). DPK Korporasi di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 berkontraksi sebesar 0,74% (yoy), mengalami penurunan dibandingkan kontraksi pada triwulan III 2025 sebesar 1,85% (yoy). Kontraksi DPK Korporasi disebabkan oleh kontraksi lebih dalam deposito korporasi dari kontraksi sebesar 24,29% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi kontraksi 25,86% (yoy) pada triwulan laporan. Kontraksi deposito korporasi terutama disebabkan kontraksi deposito dengan jangka waktu 3-6 bulan hingga 42,21% (yoy). Selain itu, tabungan korporasi juga tumbuh melambat dari 30,68% (yoy) menjadi 28,29% (yoy). Pada sisi lain, giro korporasi tumbuh meningkat dari 9,79% (yoy) menjadi 16,15% (yoy). Hal tersebut didorong oleh peningkatan giro pada kelompok ≤Rp100 juta dan >Rp 20 miliar. Percepatan pertumbuhan giro korporasi dan tabungan korporasi yang masih tinggi mengindikasikan bahwa korporasi cenderung menahan dana pada instrumen yang lebih likuid sebagai pembiayaan mandiri dibandingkan menempatkan dana pada instrumen berjangka.

Grafik 4.24 Perkembangan Pertumbuhan DPK Korporasi Berdasarkan Jenis Simpanan (yoy)

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan kelompok deposit, perbaikan kontraksi DPK korporasi didorong oleh peningkatan pertumbuhan DPK korporasi pada kelompok Bukan Lembaga keuangan, BUMD dan BUMN. DPK Kelompok Bukan Lembaga Keuangan tumbuh dari 6,37% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 8,74% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, pertumbuhan DPK BUMN masih terkontraksi 45,55% (yoy) pada triwulan laporan lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan III 2025 sebesar 51,94 % (yoy). Di sisi lain pertumbuhan DPK Lembaga Keuangan masih tumbuh positif meskipun melambat dari 29,94% (yoy) menjadi 15,56% (yoy).

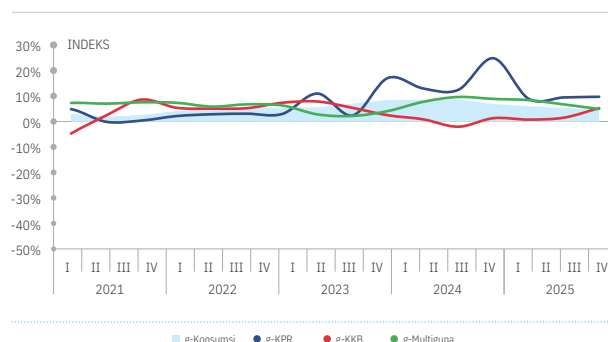
4.4 Perkembangan Sektor Rumah Tangga Jawa Tengah

4.4.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Stabilitas sektor Rumah Tangga (RT) pada triwulan IV 2025 terjaga. Hal ini didukung oleh beberapa faktor seperti tingkat pendapatan yang stabil. Ketahanan tingkat pendapatan RT tercermin dari peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen pada triwulan laporan yang masih berada di level optimis (>100), serta inflasi yang rendah dan stabil.

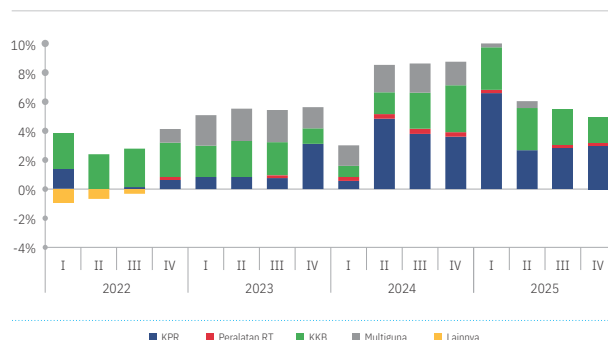
4.4.2 Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Jawa Tengah

Kredit konsumsi RT menyumbang 30,46% dari total kredit perbankan di Jawa Tengah. Pertumbuhan kredit konsumsi RT sebesar 4,74% (yoy) pada triwulan IV 2025, melambat dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 5,42% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari 118,25 pada bulan November menjadi 117,77 pada bulan Desember 2025. Perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi disebabkan oleh penurunan penyaluran kredit multiguna dari 6,80% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 5,01% (yoy) pada triwulan IV 2025. Sementara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) mengalami peningkatan. Penyaluran KPR

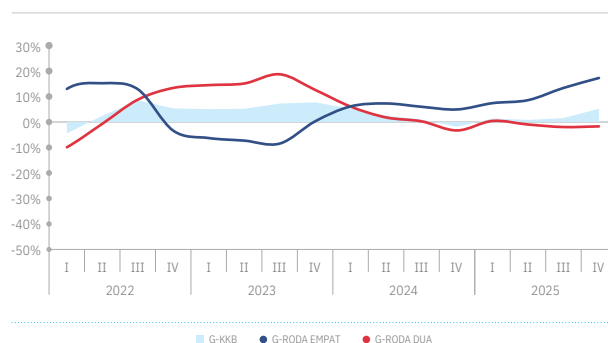
Grafik 4.25 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah (yoy)

Sumber: Bank Indonesia, diolah

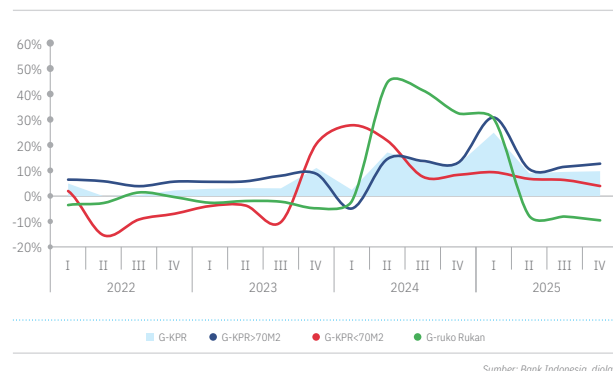
mengalami peningkatan dari 9,56% (yoy) menjadi 9,82% (yoy) didorong oleh peningkatan pertumbuhan KPR <70 m2 dari 11,55% pada triwulan III 2025 menjadi 12,76% (yoy) pada triwulan laporan. Penyaluran KKB juga menunjukkan peningkatan dari 1,61% (yoy) menjadi 5,36% (yoy) didorong oleh peningkatan penyaluran kredit kendaraan roda dua dari 12,97% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 17,01% (yoy) pada triwulan laporan. Di tengah perkembangan tersebut, *Non-Performing Loan* (NPL), kredit sektor rumah tangga sedikit meningkat dari 1,42% pada triwulan III 2025 menjadi 1,55% pada triwulan IV 2025. Namun demikian, rasio tersebut masih berada pada level yang relatif terjaga dan di bawah ambang batas risiko.

Grafik 4.26 Perkembangan Andil Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

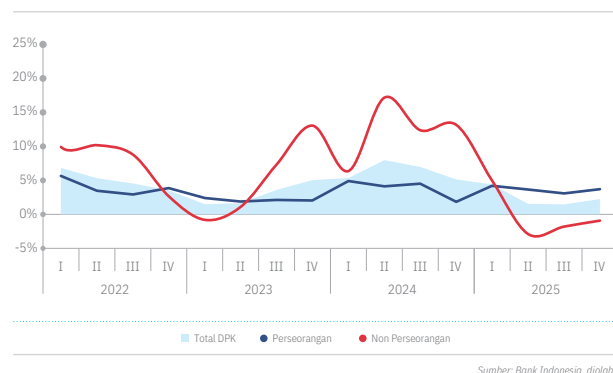
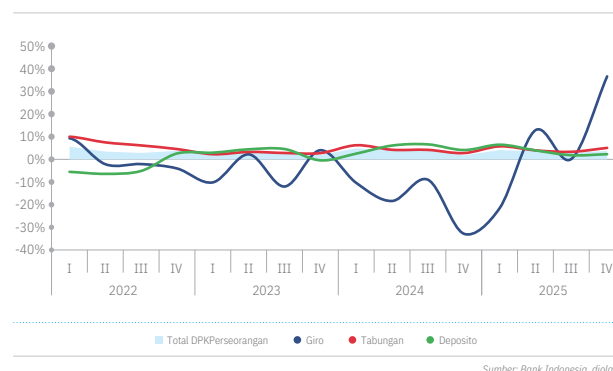
Grafik 4.27 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah (yoy)

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.28 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah (yoy)

4.4.3 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga di Jawa Tengah

Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga (RT) di perbankan Jawa Tengah selama triwulan IV 2025 mencapai Rp302,38 triliun atau 69,59% dari total DPK. Pertumbuhan DPK RT pada triwulan IV 2025 mencapai 3,71% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,10% (yoy). Komposisi DPK rumah tangga pada triwulan IV 2025 didominasi oleh tabungan dengan pangsa 74,09%, sedangkan deposito dan giro masing-masing memiliki pangsa sebesar 23,55% dan 2,36%.

Grafik 4.29 Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah (yoy)**Grafik 4.30** Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perseorangan Jawa Tengah Berdasarkan Komponennya (yoy)

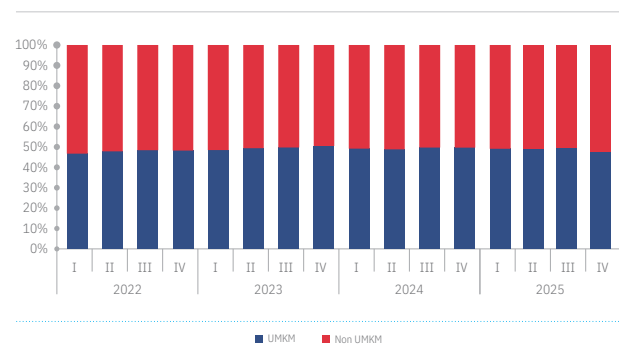
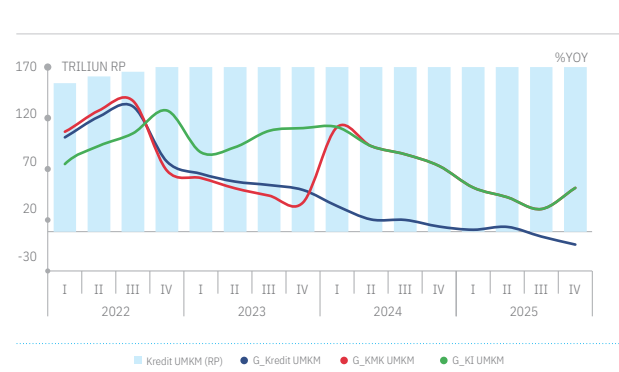
Peningkatan pertumbuhan DPK RT didorong oleh peningkatan pertumbuhan tabungan dan giro. Tabungan RT pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 5,13% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,42% (yoy). Giro pada triwulan laporan tumbuh sebesar 36,74% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,22% (yoy). Di sisi lain, kinerja deposito RT berkontraksi sebesar 2,78% (yoy) pada triwulan IV 2025 setelah tumbuh positif sebesar 2,46% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan DPK RT pada triwulan IV 2025 sejalan dengan dengan perkembangan Indeks Penghasilan Konsumen saat ini yang meningkat dibandingkan triwulan III 2025, yaitu dari 108,87 menjadi 109,46.

4.5 Perkembangan Pembiayaan UMKM di Jawa Tengah

4.5.1. Penyaluran Kredit UMKM di Jawa Tengah

Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi yang lebih dalam. Kredit UMKM pada triwulan IV 2025 berkontraksi sebesar 2,68% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 2,28% (yoy). Kontraksi tersebut disebabkan oleh lebih dalamnya kontraksi Kredit Modal Kerja UMKM dari -3,76% (yoy) menjadi -5,83% (yoy). Hal ini menunjukkan belum ada tanda pemulihan

Grafik 4.31 Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM dan Non UMKM Perbankan di Jawa Tengah (yoy)**Grafik 4.32** Share Kredit UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan

permintaan kredit UMKM. Di sisi lain, kredit investasi UMKM tumbuh positif, yaitu dari 3,34% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 8,80% (yoy) pada triwulan laporan. Dari sisi risiko kredit, rasio NPL UMKM pada triwulan IV 2025 terjaga, dan masih berada pada *threshold* aman yaitu 4,53% (di bawah 5%).

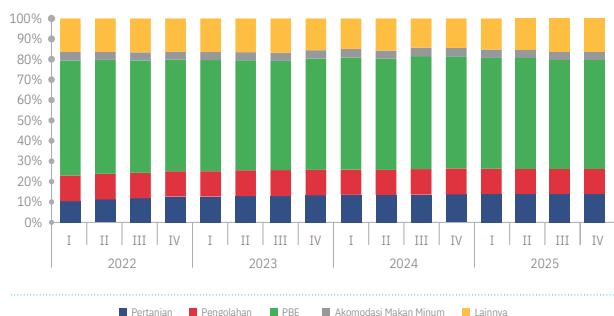
Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Jawa Tengah mencerminkan komitmen perbankan dalam mendorong perluasan akses keuangan. Pangsa penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai 47,15%, atau secara nominal mencapai Rp182,46 triliun.

Berdasarkan sektor ekonomi, mayoritas kredit UMKM disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran (pangsa 52,38% dari total kredit UMKM), sektor pertanian (pangsa 14,10%), serta sektor industri pengolahan (pangsa 11,95%). Kredit UMKM di LU pertanian tumbuh lebih cepat dari 3,42% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 3,93% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, kredit UMKM di LU perdagangan besar dan eceran pada triwulan IB 2025 berkontraksi sebesar 4,03% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 3,77%. Selain itu, kredit UMKM pada LU industri pengolahan juga mengalami kontraksi lebih dalam dari 3,78% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 5,41% (yoy) pada triwulan laporan.

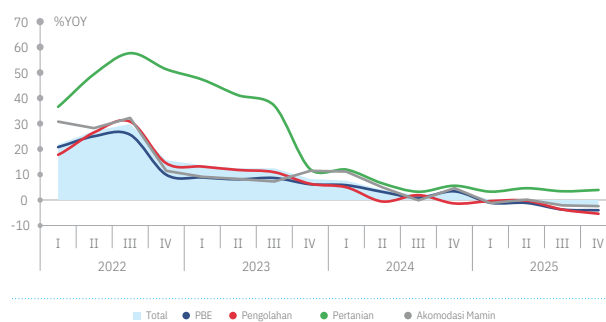
Kualitas penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah masih berada pada *threshold* aman. Rasio NPL kredit UMKM di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 tercatat stabil dan masih dalam batas aman yaitu 4,21% (di bawah 5%).

Suku bunga kredit untuk sektor UMKM di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 sebesar 10,70%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10,85%. Penurunan suku bunga kredit diharapkan mendorong peningkatan produktivitas UMKM sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta perluasan inklusi keuangan. Untuk mendukung hal tersebut, Bank Indonesia terus memperluas ruang kebijakan akomodatif melalui pendekatan kebijakan makroprudensial yang lebih longgar. Langkah konkret yang ditempuh antara lain

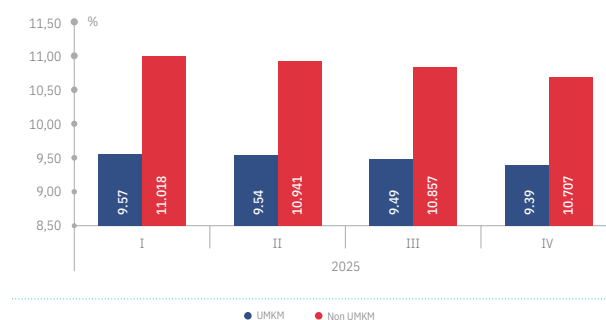
Grafik 4.33 Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral



Grafik 4.34 Pertumbuhan Kredit UMKM secara Sektoral



Grafik 4.35 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan



optimalisasi implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) serta penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), untuk memperbesar kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit, khususnya kepada sektor produktif seperti UMKM.

4.5.2 Program Pengembangan UMKM di Jawa Tengah

Sebagai langkah strategis untuk mendukung pengembangan UMKM, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang mulai berlaku sejak 31 Agustus 2021. Regulasi ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, serta Unit Usaha Syariah. Tujuan utama kebijakan RPIM adalah meningkatkan inklusi ekonomi, memperluas akses keuangan, dan memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional. Perbankan didorong untuk memiliki lebih banyak opsi dalam menyalurkan pembiayaan, baik kepada UMKM, individu berpenghasilan rendah (PBR), maupun segmen pembiayaan inklusif lainnya.

Selain kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia juga menjalankan berbagai program pengembangan UMKM. Pada triwulan IV 2025, berbagai upaya pengembangan UMKM dan Ekonomi Syariah antara lain:

- a. Keikutsertaan pada Indonesia Sharia Economic Forum 2025. Dalam forum tersebut, UMKM Jawa Tengah mendapatkan penghargaan antara lain
 - 1) Juara Favorit Indonesia *International Halal Chef Competition* (IN2HCC), Kategori Professional Chef Black Box, Chef Devan Andhika Saputra.
 - 2) Provinsi Jawa Tengah sebagai 5 Besar Provinsi Terbaik Kajian *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) 2025.
 - 3) Provinsi Jawa Tengah menerima *Special Recognition Award of Muslim-Friendly Destination* dari *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) 2025”
- b. Keikutsertaan pada Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Jawa 2025, yang menghasilkan capaian sebagai berikut:
 - 1) Juara 1 Lomba Dakwah Ekonomi Syariah
 - 2) Juara 2 Kompetisi Kemandirian Ekonomi Pesantren
 - 3) Juara 2 *Halal Chef Competition* kategori Ponpes
 - 4) Juara 2 Lomba Konten Ekonomi Syariah
 - 5) Juara Harapan 2 Dakwah Ekonomi Syariah
- c. Penyelenggaraan Rupiah Tresno Budoyo, dengan tema “Rayakan Digitalisasi, Berbudaya untuk Negeri” sebagai kolaborasi ekonomi, budaya, dan digitalisasi, serta menghadirkan *talkshow*, pentas budaya, dan apresiasi kepada pelaku seni serta UMKM *merchant* QRIS.

QR

INBOX

SCAN QR

TANJUNG BIRA
SEDAYU CITY KELAPA GADING
JAMARTA

NID: 000000158678798
TIME: 13:17:14.525

01
PR 2022

REF ID: 000256
MYID: 10101128306419

MIKAN SCAN QR CODE BERIKUT

IRIS



Rp 159,400

IRIS READY

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kinerja sistem pembayaran Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 menunjukkan perbaikan di beberapa kanal ritel, meskipun sejumlah instrumen masih tumbuh melambat.



SKNBI mengalami perbaikan ditunjukkan oleh kontraksi yang semakin membaik, sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Sementara itu, transaksi RTGS mengalami peningkatan, mencerminkan peningkatan aktivitas pembayaran bernilai besar.



Instrumen APMK menunjukkan kinerja solid, ditunjukkan oleh pertumbuhan transaksi kartu kredit yang lebih tinggi dibanding triwulan lalu, didorong oleh peningkatan transaksi belanja dan online, serta pembayaran tagihan. Penggunaan kartu debit juga terakselerasi terutama pada transaksi tunai yang merefleksikan tingginya kebutuhan transaksi masyarakat.



Dari sisi uang kartal, setoran dan tarikan bank menunjukkan net outflow yang dipengaruhi peningkatan kebutuhan likuiditas rumah tangga pada periode liburan HBKN Natal dan Tahun baru.



Digitalisasi terus menguat melalui perluasan merchant dan ekosistem QRIS yang mencapai lebih dari 2,2 juta merchant. Pertumbuhan volume transaksi juga meningkat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi pada HBKN Natal dan Tahun Baru.

5.1 Perkembangan Sistem Pembayaran di Jawa Tengah

5.1.1 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan BI-Fast

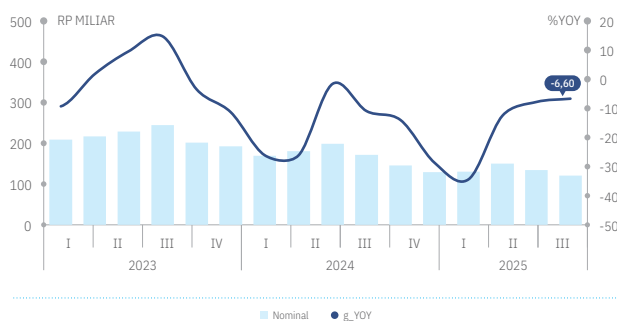
Transaksi ritel di Jawa Tengah yang diproses melalui SKNBI pada triwulan IV 2025 menunjukkan perbaikan, sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025. Nominal transaksi mencapai Rp27,81 triliun atau berkontraksi 6,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan III 2025 sebesar 9,46% (yoy). Dari sisi volume, transaksi tercatat 674,77 juta atau berkontraksi 2,98% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 604,79 jut atau berkontraksi 6,28% (yoy). Perbaikan kinerja transaksi ritel

Grafik 5.1. Perkembangan Nominal Kliring di Jawa Tengah



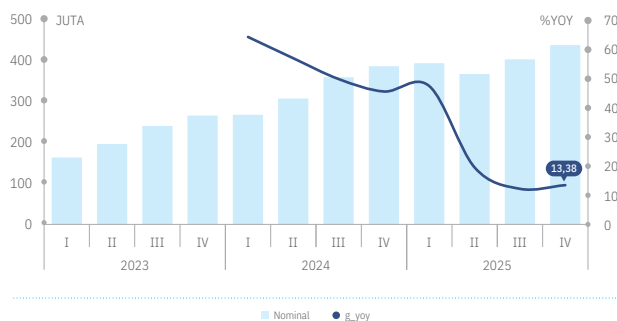
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3 Rata-Rata Nominal Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5 Perkembangan Transaksi BI-Fast di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi di Jawa Tengah yang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

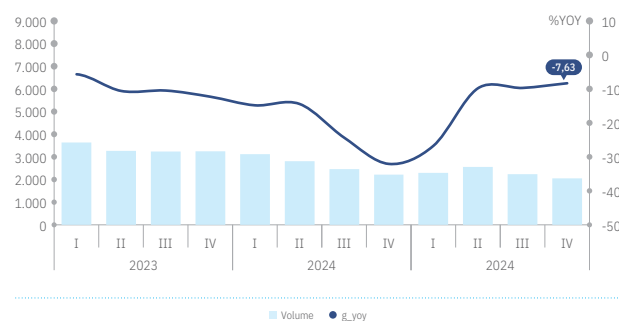
Transaksi kliring debit pengembalian dengan instrumen pembayaran berupa cek dan bilyet giro (BG) menurun pada triwulan IV 2025. Total nominal penarikan cek dan BG kosong berkontraksi 6,60% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang berkontraksi sebesar 7,73% (yoy). Nilai penarikan pada triwulan IV 2025 mencapai Rp121 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp135 miliar. Penurunan volume cek dan BG kosong juga melandai, dari kontraksi 9,04% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi kontraksi sebesar 7,63% (yoy) pada triwulan laporan.

Grafik 5.2. Perkembangan Volume Kliring di Jawa Tengah



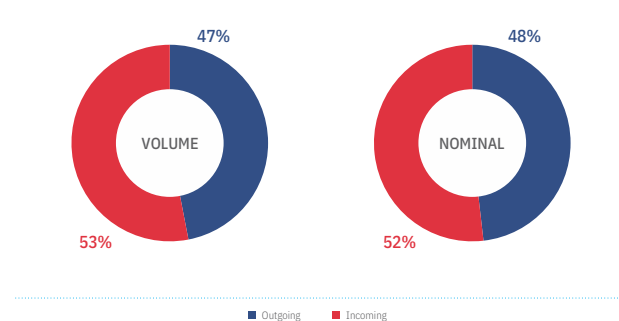
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.4 Rata-Rata Volume Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.6 Struktur Transaksi BI-Fast di Jawa Tengah



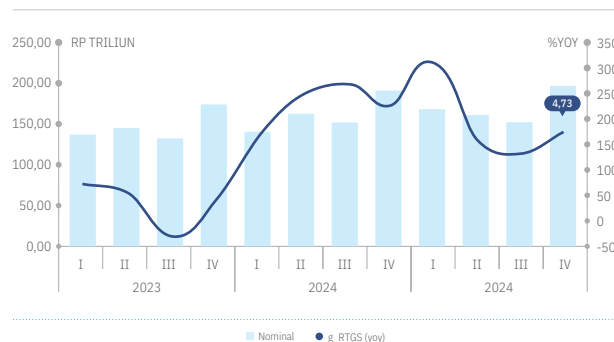
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, pertumbuhan transaksi BI-Fast mulai meningkat. Nominal transaksi BI-Fast pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 13,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 12,13%. Total volume transaksi meningkat dari 196,09 juta menjadi 201,57 juta. Dari sisi struktur, transaksi BI-Fast didominasi oleh transaksi *incoming*, yakni sebesar 53,12% dari total volume dan 51,96% dari total nominal transaksi.

5.1.2 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

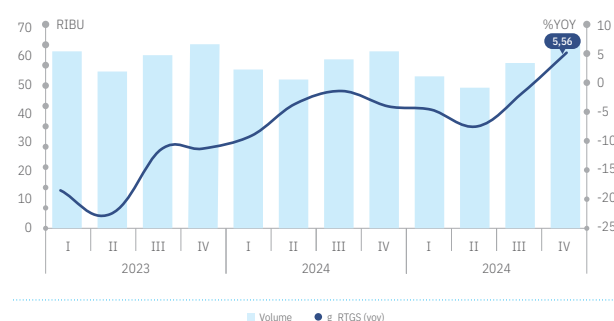
Transaksi pembayaran melalui Sistem BI-RTGS pada triwulan IV 2025 menunjukkan peningkatan, baik dari sisi nominal maupun volume. Peningkatan tersebut mencerminkan peningkatan aktivitas transaksi ekonomi bernilai besar di Jawa Tengah. Dari sisi nominal, transaksi melalui sistem BI-RTGS tercatat sebesar Rp202,1 triliun atau tumbuh 4,73% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp152,3 triliun atau kontraksi 0,83% (yoy). Sementara dari sisi volume juga mengalami peningkatan dari kontraksi 2,50% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi tumbuh positif 5,56% (yoy) pada triwulan IV 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa transaksi bernilai besar meningkat sejalan dengan peningkatan permintaan sehingga mendorong aktivitas kegiatan usaha menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru.

Grafik 5.7 Perkembangan Nominal Transaksi Melalui RTGS di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.8 Perkembangan Volume Transaksi Melalui RTGS di Jawa Tengah



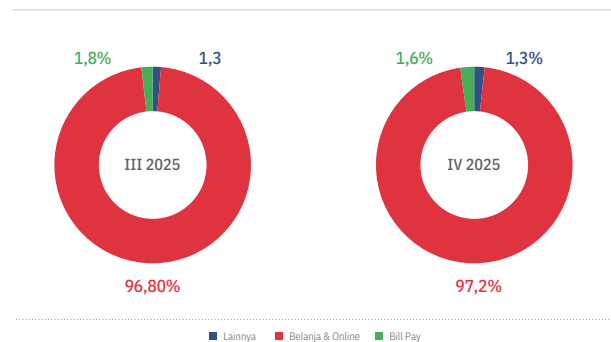
Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.1.3 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

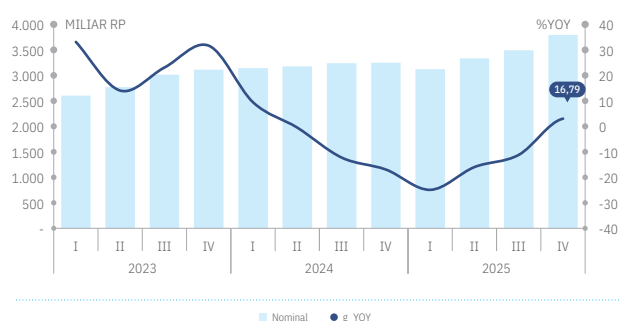
Transaksi kartu kredit (APMK) yang meningkat mencerminkan aktivitas transaksi ritel rumah tangga yang terjaga di Jawa Tengah. Nilai transaksi kartu kredit pada triwulan IV 2025 mencapai Rp3,77 triliun atau tumbuh 16,79% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp3,48 triliun atau tumbuh 7,95% (yoy). Kenaikan pertumbuhan terutama didorong oleh pertumbuhan transaksi belanja dan online yang naik dari 7,89% (yoy) menjadi 16,73% (yoy) dan sejalan dengan transaksi bill pay yang masih tumbuh solid. Hal ini mengindikasikan pola belanja masyarakat yang tetap aktif pada barang kebutuhan tertentu meskipun konsumsi rumah tangga secara keseluruhan masih melambat.

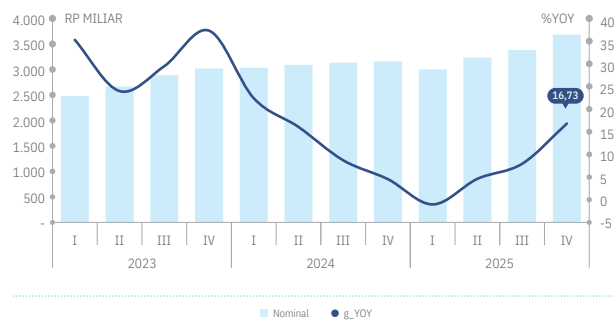
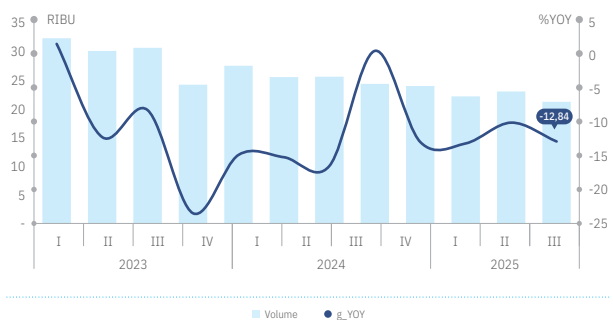
Transaksi *Bill Pay* di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 menunjukkan dinamika yang beragam. Nominal transaksi Bill Pay menunjukkan peningkatan namun volume pembayaran masih melambat. Peningkatan nominal sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga pada periode Natal dan Tahun baru dengan nilai pembayaran per transaksi yang cenderung besar. Transaksi *Bill Pay* didominasi kewajiban rutin seperti listrik, air, internet, dan cicilan yang tidak dapat ditunda.

Grafik 5.9. Penggunaan Kartu Kredit Berdasarkan Jenis Transaksi di Jawa Tengah

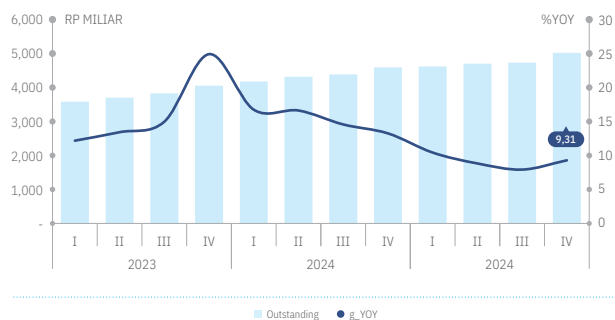


Grafik 5.10. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Jawa Tengah

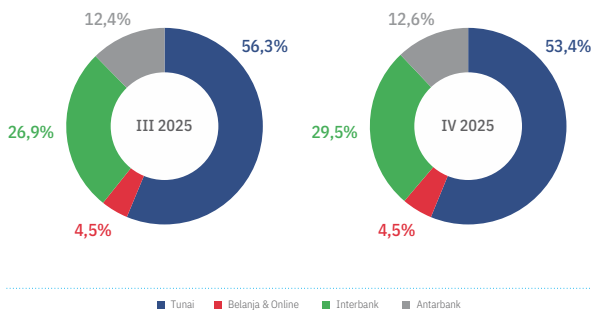


Grafik 5.11. Perkembangan Nominal Transaksi Bill Pay Menggunakan Kartu Kredit di Jawa Tengah**Grafik 5.12.** Perkembangan Nominal Transaksi Belanja dan Online Menggunakan Kartu Kredit di Jawa Tengah**Grafik 5.13.** Perkembangan Volume Transaksi Bill Pay Menggunakan Kartu Kredit di Jawa Tengah

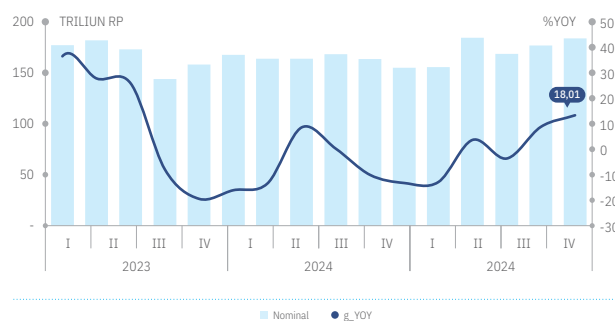
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.14. Perkembangan Outstanding Kartu Kredit di Jawa Tengah

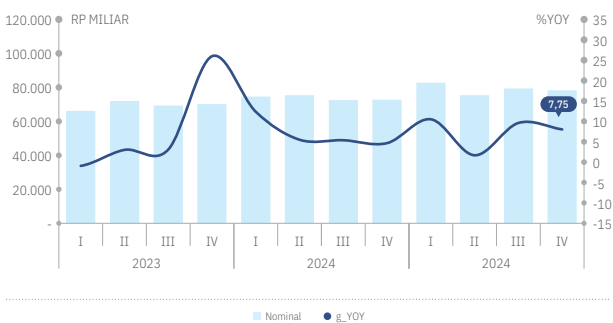
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.15. Pangsa Penggunaan Transaksi Kartu Debit di Jawa Tengah

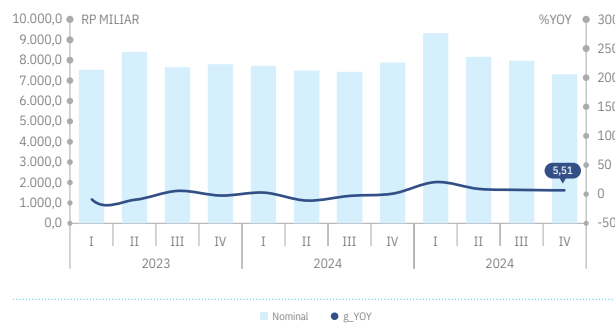
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.16. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Debit di Jawa Tengah

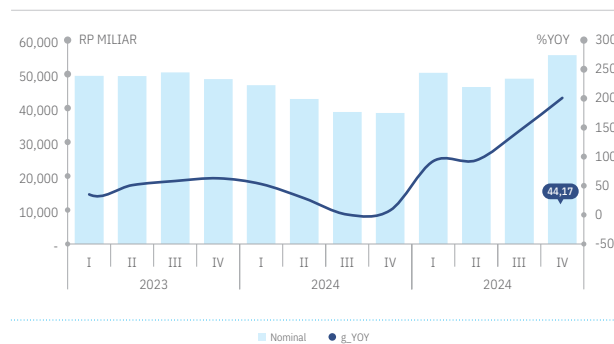
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.17. Perkembangan Nominal Transaksi Tunai Menggunakan Kartu Debit di Jawa Tengah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.18. Perkembangan Nominal Transaksi Belanja dan Online Menggunakan Kartu Debit di Jawa Tengah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

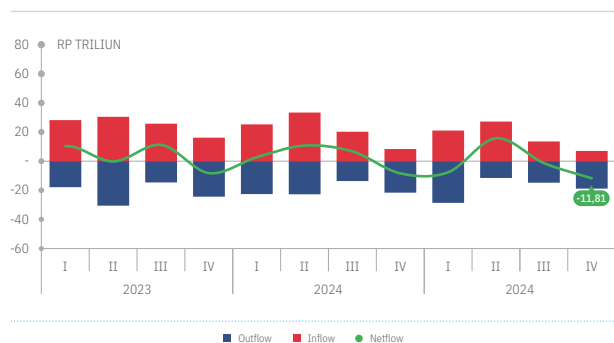
Grafik 5.19. Perkembangan Noninal Transaksi Interbank Menggunakan Kartu Debit di Jawa Tengah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Transaksi kartu debit di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai Rp184 triliun, didominasi transaksi tunai yang mencapai 53,4%. Secara keseluruhan, nominal transaksi menggunakan kartu debit masih tumbuh positif sebesar 18,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 14,03% (yoy). Akselerasi transaksi kartu debit terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan transaksi interbank dari 25,14% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 44,17% (yoy) pada triwulan laporan. Di sisi lain transaksi tunai kartu debit melambat dari 9,66% (yoy) menjadi 7,75% (yoy). Sejalan dengan transaksi online kartu debit yang melambat dari 7,31% (yoy) menjadi 5,51% (yoy). Perkembangan tersebut mengindikasikan meningkatnya aktivitas transaksi antar rekening dan antar bank.

5.1.4 Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

Setoran dan tarikan bank pada triwulan IV 2025 mengalami *net outflow* sebesar Rp11,81 triliun, sedangkan triwulan sebelumnya menunjukkan *net inflow* Rp1,28 triliun. Nilai *inflow* pada triwulan laporan sebesar Rp7,02 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp13,60 triliun. Di sisi lain, *outflow* mengalami kenaikan dari Rp14,88 triliun pada triwulan III 2025 menjadi Rp18,83 triliun pada periode laporan.

Grafik 5.20. Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah

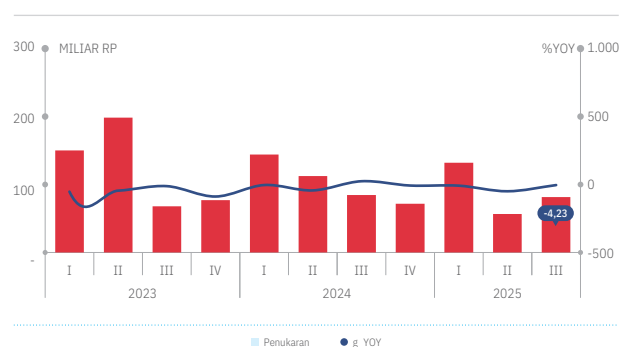
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan ini mencerminkan penurunan setoran pasca penurunan BI Rate dan kebutuhan likuiditas rumah tangga dan pelaku usaha pada masa HBKN Natal dan Tahun baru.

5.2 Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

5.2.1 Penyediaan Uang Rupiah

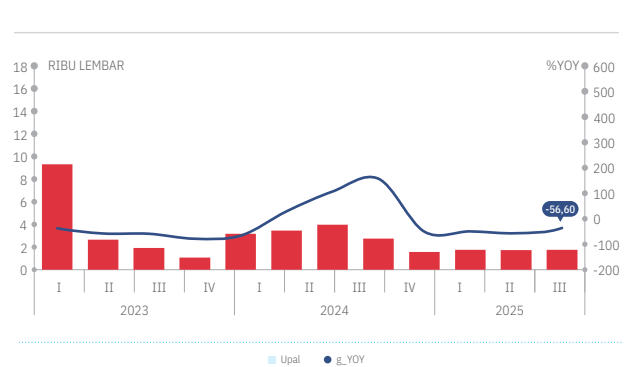
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan *clean money policy*, Bank Indonesia rutin menarik uang tidak layak edar dan menggantinya dengan uang Rupiah yang layak edar. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan dan peningkatan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat. Kegiatan penukaran uang pada periode laporan hanya sebanyak Rp67,5 miliar atau berkontraksi sebesar 5,48% (yoy) lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan III 2025 sebesar 4,23% (yoy).

Grafik 5.21 Perkembangan Penukaran Uang

Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.2.2 Penanganan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya

Temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya pada triwulan IV 2025 tercatat sebanyak 1.962 lembar atau berkontraksi 35,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan kontraksi triwulan III 2025 sebesar 56,60% (yoy) meskipun secara lembar lebih sedikit yaitu hanya 1.923 lembar. Kontraksi temuan ini mencerminkan

Grafik 5.22 Perkembangan Temuan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya

Sumber: Bank Indonesia, diolah

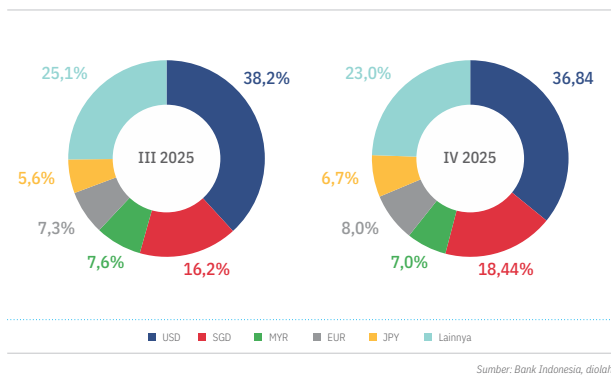
kesadaran masyarakat akan keaslian uang Rupiah. Namun demikian, pengawasan dalam menjaga kualitas uang yang beredar terus ditingkatkan terutama menjelang HBKN. Beberapa langkah strategis antara lain melalui penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan edukasi ciri keaslian Rupiah kepada masyarakat.

5.3 Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing

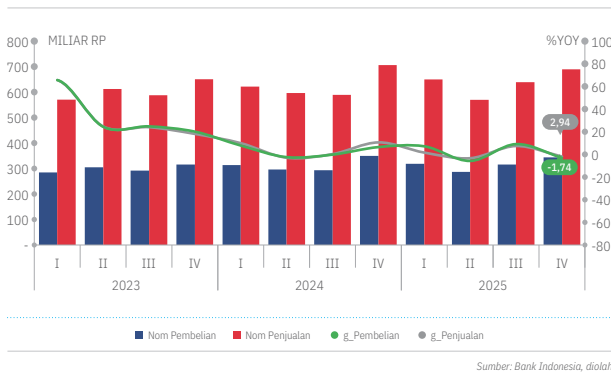
Transaksi jual beli Uang Kertas Asing (UKA) di KUPVA BB pada triwulan IV 2025 menunjukkan perlambatan. Penjualan terkonsentrasi sebesar 2,94% (yoy), setelah tumbuh positif sebesar 9,24% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, pembelian tumbuh terkonsentrasi 1,74% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 7,56% (yoy). Kondisi ini mencerminkan penyesuaian permintaan valas di tengah dinamika eksternal dan pergerakan nilai tukar yang fluktuatif.

Dari sisi mata uang yang diperdagangkan, Dollar Amerika Serikat (USD) masih mendominasi aktivitas penukaran uang di Jawa Tengah pada triwulan IV 2025. Pangsa transaksi USD mencapai 36,84% dari total transaksi valas, diikuti oleh Dolar Singapura (SGD) sebesar 18,44%, Euro (EUR) sebesar 8,03%, Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 7,01%, dan Yen Jepang (JPY) sebesar 6,70%.

Grafik 5.23 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA BB di Jateng



Grafik 5.24 Perkembangan Pembelian dan Penjualan Valuta Asing melalui KUPVA BB di Jateng



Penyelenggaraan KUPVA BB berizin diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pasar keuangan, terutama pasar valuta asing domestik. KUPVA BB yang memiliki izin dari Bank Indonesia di Jawa Tengah sampai dengan triwulan IV 2025 mencapai 36 penyelenggara. Berdasarkan jumlah tersebut, 20 KUPVA (55,56%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah, 8 KUPVA BB (22,22%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Solo, 6 KUPVA BB (16,67%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Purwokerto, dan 2 KUPVA BB (5,56%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Tegal. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) Perusahaan Transfer Dana (PTD) yang berlokasi di Jawa Tengah, dimana 2 PTD terletak di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah dan 1 PTD di wilayah kerja KPwBI Tegal.

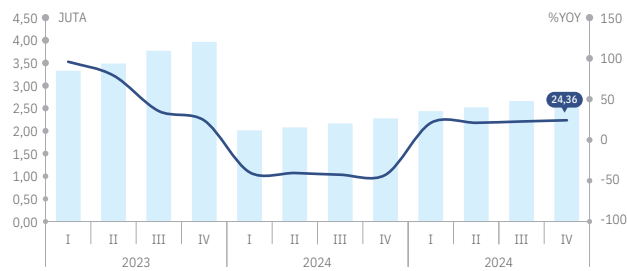
5.4 Perkembangan Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif

Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia terus mendorong akselerasi penggunaan transaksi nontunai, termasuk melalui kanal pembayaran QRIS. Jumlah *merchant* yang telah memiliki QRIS di Jawa Tengah hingga triwulan IV 2025 mencapai 2,2 juta *merchant* atau tumbuh 24,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,16 juta atau tumbuh sebesar 22,86% (yoy). Peningkatan jumlah *merchant* sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam mendorong elektronifikasi di masyarakat. Dari sisi volume transaksi, volume transaksi QRIS pada triwulan IV 2025 terus tumbuh positif hingga mencapai 444 juta atau tumbuh 140% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2025 sebesar 189% (yoy).

Secara spasial, jumlah *merchant* QRIS terbanyak pada triwulan IV 2025 terdapat di Kota Semarang, Surakarta, dan Banyumas⁹. Aktivitas ekonomi yang tinggi di ketiga daerah tersebut mendorong penggunaan QRIS oleh *merchant* guna mempermudah pembayaran transaksi ritel. Lebih lanjut, pertumbuhan *merchant* QRIS tertinggi terjadi di Kabupaten Grobogan; Kabupaten Pemalang; dan Kabupaten Purbalingga yang masing-masing tumbuh sebesar 45,66% (yoy); 37,86% (yoy); dan 35,73% (yoy). Bank Indonesia terus mendorong pemanfaatan QRIS dalam transaksi sehari-hari dengan memperluas jangkauan *merchant* yang memfasilitasi penggunaan QRIS. Upaya yang telah dilakukan meliputi kerja sama dengan perbankan dalam akuisisi QRIS UMKM, penggunaan QRIS oleh pemerintah daerah dalam penerimaan pendapatan daerah, kolaborasi dengan sektor pariwisata untuk pembayaran tiket masuk menggunakan QRIS, serta pemanfaatan QRIS sebagai sarana donasi di tempat ibadah.

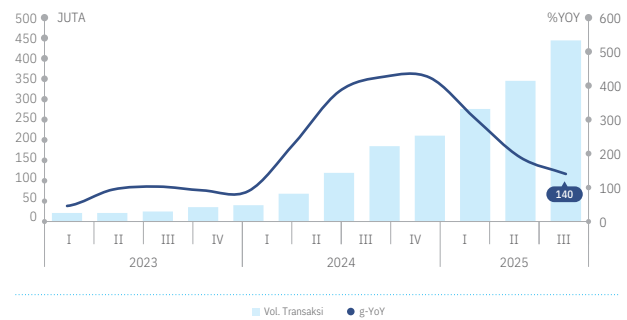
9. Pada triwulan III 2025, jumlah *merchant* QRIS Kota Semarang sebanyak 879 ribu *merchant*, Solo 438 ribu *merchant*, dan Banyumas 302 ribu *merchant*.

Grafik 5.25 Perkembangan Jumlah Merchant QRIS di Jawa Tengah



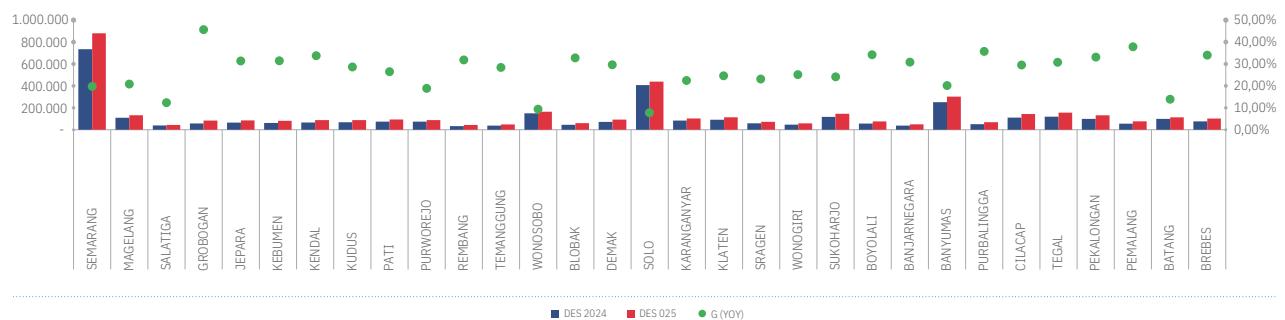
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.26 Perkembangan Transaksi QRIS di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.27 Perkembangan QRIS di Jawa Tengah Secara Spasial



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sebagai upaya mendorong digitalisasi di daerah, KPwBI Prov. Jawa Tengah bersama *stakeholders* terkait telah melakukan beberapa kegiatan selama triwulan IV 2025, antara lain:

1. QRIS Jelajah Budaya Indonesia- Regional Jawa

Merupakan Kolaborasi penyelenggaraan QRIS Jelajah Budaya Indonesia dengan KPwDN di Jawa bertepatan "QRIS JOGLOSEMAR". Total peserta sebanyak 14 tim atau 42 orang terdiri dari perwakilan dari seluruh KPw se-Jawa. Tema edukasi terdiri dari QRIS, BI-Fast, PeKa, Elektronifikasi, Kebudayaan dan Cinta Bangsa Paham Rupiah yang diselenggarakan di Candi Borobudur, Kampung Wisata Dusun Semilir, Kota Lama Semarang, Lawang Sewu Semarang, Kampung Batik Lawenan Solo dan Kasunanan Surakarta

2. QRIS LPG Society

Merupakan *site visit* Agen Pangkalan LPG Kota Semarang berkolaborasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Bank Mandiri. Kegiatan berupa pemasangan materi komunikasi poster dan banner tata cara pembayaran LPG dengan QRIS serta uji coba pembayaran LPG menggunakan QRIS di Agen Pangkalan LPG, yaitu Pangkalan LPG Bp Mudijono dan Ibu Budiningsih di Jl. Pekunden Kota Semarang.

3. Rupiah Tresno Budoyo

Edukasi QRIS, Pelindungan Konsumen dan Pelindungan Konsumen yang dikemas dalam bentuk pertunjukan seni dengan tema "Rayakan Digitalisasi Berbudaya untuk Negeri". Kegiatan diikuti oleh sekitar 800 peserta yang hadir secara luring (termasuk unsur Kepala Daerah dan mitra strategis BI di daerah) serta +/-1.500 orang yang hadir secara daring. Selama event tersebut terdapat 3.734 kali transaksi QRIS dengan nominal donasi terkumpul Rp14.604.710 sebagai *user experience*. Sebagai kegiatan pendukung, dilakukan seremoni peluncuran Nota Kesepakatan Progam Edukasi CBP, Program Perluasan QRIS pada Agen Pangkalan LPG dan pemberian PI KEKDA pada Desa Wisata di Rembang

4. Forum Jateng Digital

Studi Banding TP2DD di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah diikuti oleh 18 TP2DD. Topik pembahasan Evaluasi Championship P2DD 2025 disampaikan oleh Kemenko Perekonomian dan Strategi Pembaharuan Peta Jalan P2DD disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta implementasi P2DD di DKI Jakarta dan Kota Bogor. Selain itu, dilakukan Studi Banding ke objek retribusi pasar (Perumda Pasar Jaya), transportasi terintegrasi (MRT Jakarta), dan pemanfaatan teknologi untuk pemutakhiran data (Jakarta Smart City)

5. **High Level Meeting (HLM) TP2DD Kota Semarang**

HLM membahas mengenai peningkatan retribusi daerah agar lebih difokuskan pada optimalisasi data dan mendorong kepatuhan/ compliance, bukan pada kenaikan tarif. Penguatan monitoring ETPD Tahun 2026 dilakukan untuk meningkatkan level monitoring dari "Availability" menjadi "Maturity", a.l. melalui penyusunan kriteria baru penilaian Championship ETPD 2026.

6. **High Level Meeting TP2DD Kab. Purworejo**

HLM membahas mengenai penerapan QRIS pada e-Retribusi Pariwisata dan Olah Raga, e-Retribusi Parkir, serta e-Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Puskesmas. Sebagai *pilot project*, QRIS Retribusi akan diterapkan pada Retribusi Museum Tosan Aji, 2 (dua) Puskesmas dan 2 (dua) lokasi parkir tepi jalan umum. Selanjutnya, QRIS retribusi ditargetkan akan diberlakukan pada 14 puskesmas di seluruh wilayah Purworejo dan lokasi pariwisata, serta parkir tepi jalan umum.

7. **Rapat Koordinasi Strategi Perluasan ETPD 2026**

Dalam rangka menentukan arah ETPD Jawa Tengah 2026, mendorong komitmen pembuatan Peta Jalan TP2DD 2026.





Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kinerja ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada Agustus 2025 membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah menurun dari 4,78% pada Agustus 2024 menjadi 4,66% pada Agustus 2025 seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian, industri, dan perdagangan.



Indeks penghasilan sedikit meningkat dari 108,48 pada triwulan III 2025 menjadi 109,46 pada triwulan IV 2025 dan masih berada pada level optimis (>100). Sedangkan, indeks ketersediaan lapangan kerja pada triwulan IV 2025 berada pada level 95,78 meningkat 14,01% dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di level 81,77.



Nilai Tukar Petani (NTP)¹⁰ pada Desember 2025 meningkat dibandingkan September 2025, tercermin dari kenaikan Indeks yang diterima petani (It) dan indeks yang dibayar petani (Ib), masing-masing mengalami peningkatan sebesar 2,01% dan 1,37%.

10. Nilai Tukar Petani (NTP) periode data tahun Desember 2019 dan seterusnya menggunakan NTP Tahun Dasar 2019 sedangkan NTP periode data sebelum periode Desember 2019 menggunakan data NTP Tahun Dasar 2012

6.1. Ketenagakerjaan

6.1.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Jawa Tengah

Kinerja ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada Agustus 2025 meningkat. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 mencapai 22,34 juta orang atau meningkat 1,96% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angkatan kerja di Jawa Tengah memiliki porsi 14,51% dari total angkatan kerja nasional. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga tumbuh positif hingga 74,36% (yoy) pada Agustus 2025. Peningkatan angkatan kerja diikuti penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 4,78% pada Agustus 2024 menjadi 4,66% pada Agustus 2025 (Tabel 6.1). Peningkatan TPAK dan penurunan tingkat pengangguran menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Jumlah total orang yang bekerja pada Agustus 2025 mencapai 21,30 juta orang.

Struktur tenaga kerja pada lapangan usaha di Jawa Tengah relatif tidak berubah. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah

pada Agustus 2025. Sektor pertanian menyerap 5,54 juta orang tenaga kerja atau setara 26,48% dari total penduduk yang bekerja. Angka ini meningkat dibandingkan Agustus 2024 yang menyerap 5,33 juta orang atau 25,55% dari total penduduk yang bekerja. Kenaikan tenaga kerja di sektor pertanian didorong oleh peningkatan aktivitas tanam seiring dengan normalisasi lahan terdampak banjir, perluasan program pertanian daerah serta peningkatan kebutuhan produksi komoditas pangan strategis.

Struktur status pekerjaan utama menunjukkan penurunan pekerja informal. Pekerja informal di Jawa Tengah pada Agustus 2025 sebesar 12,52 juta pekerja atau 58,78% total penduduk yang bekerja. Pangsa pekerja informal lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 59,64%. Penurunan pekerja informal menunjukkan adanya peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih teratur.

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)

Indikator	2023		2024		2025	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
Angkatan Kerja	21,06	21,07	21,35	21,91	21,87	22,34
Bekerja	19,96	19,99	20,41	20,86	20,92	21,30
Pengangguran	1,10	1,08	0,94	1,05	0,95	1,04
Bukan Angkatan Kerja	8,06	8,31	8,21	7,80	8,02	7,70
Penduduk Usia Kerja	29,12	29,38	29,56	29,71	29,89	30,04
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	72,33	71,72	72,22	73,74	73,17	74,36
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)%	5,24	5,13	4,39	4,78	4,33	4,66
Pekerja Tidak Penuh	6,00	5,90	6,44	6,10	6,34	6,64
Setengah Penganggur	1,28	1,28	1,70	1,56	1,41	1,49
Paruh Waktu	4,72	4,62	4,74	4,54	4,93	5,15

Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (juta orang)

Sektor Ekonomi	2023		2024		2025	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
Pertanian	5,94	4,88	5,78	5,33	5,59	5,54
Industri	3,81	4,18	3,84	4,36	4,38	4,47
Konstruksi	1,55	1,74	1,55	1,76	1,56	1,80
Perdagangan	3,69	3,66	3,67	3,77	3,88	3,83
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	0,51	0,6	0,57	0,65	0,64	0,60
Keuangan	0,17	0,22	0,26	0,25	0,24	0,22
Lainnya*	0,84	0,97	0,95	0,95	0,90	0,93
Total	19,96	19,99	20,41	20,86	20,92	21,3

Sumber : BPS Jawa Tengah

Berdasarkan jumlah jam kerja, terdapat peningkatan pekerja waktu penuh dan pekerja waktu tidak penuh di Jawa Tengah pada Agustus 2025. Menurut jumlah jam kerja, kelompok pekerja penuh masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah yaitu 68,78% dari total penduduk yang bekerja atau 14,65 juta orang. Peningkatan pekerja waktu penuh sejalan dengan peningkatan pekerja formal di Jawa Tengah pada periode laporan. Peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi pada beberapa sektor utama seperti industri, konstruksi, dan perdagangan. Hasil *liaison* pada triwulan III 2025 ke perusahaan *lead* pada beberapa sektor utama menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Beberapa kontak melakukan penambahan tenaga kerja untuk mendukung proses produksi disaat permintaan meningkat.

Kualitas tenaga kerja terus mengalami peningkatan. Jumlah tenaga kerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Umum, Sekolah Menengah Atas (SMA) Kejuruan, DI/DII/DIII dan Universitas meningkat 4,43% (yoy) dibandingkan Agustus 2024. Pertumbuhan terbesar tercatat pada tenaga kerja dengan pendidikan Universitas dengan peningkatan sebesar 10% (yoy). Peningkatan tenaga kerja ini sejalan dengan pertumbuhan industri pengolahan terutama adanya ekspansi kawasan industri di Jawa Tengah yang membutuhkan tenaga kerja yang lebih terdidik.

Sementara itu, berdasarkan survei Bank Indonesia, indikator ketenagakerjaan triwulan IV 2025 masih terjaga. Indeks

Tabel 6.3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama (juta orang)

Status Pekerjaan Utama	2023		2024		2025	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
Berusaha sendiri	4,12	4,64	4,20	4,54	4,45	4,61
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	3,44	2,98	3,50	3,03	3,45	3,07
Berusaha dibantu buruh tetap	0,62	0,59	0,62	0,62	0,66	0,74
Buruh/karyawan/pegawai	6,91	7,33	7,40	7,80	7,62	8,04
Pekerja bebas di pertanian	0,81	0,69	0,93	0,83	0,75	0,85
Pekerja bebas di non pertanian	1,20	1,48	1,26	1,37	1,45	1,33
Pekerja tak dibayar	2,86	2,28	2,50	2,67	2,55	2,67
Total	19,96	19,99	20,41	20,86	20,92	21,30

Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel 6.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)

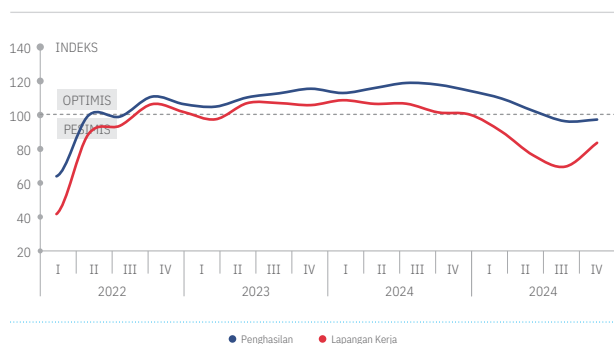
Penduduk yang Bekerja	2023		2024		2025	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
Pekerja tidak penuh	6,00	5,9	6,44	6,55	6,34	6,64
Setengah penganggur	1,28	1,28	1,70	1,56	1,41	1,49
Pekerja paruh waktu	4,72	4,62	4,74	4,99	4,93	5,15
Pekerja penuh	13,96	14,09	13,97	14,31	14,58	14,65
Total	19,96	19,99	20,41	20,86	20,92	21,30

Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel 6.5. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)

Pendidikan	2023		2024		2025	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
SD ke Bawah	9,20	8,52	8,56	8,66	8,43	8,55
SMP	4,42	4,12	4,33	4,23	4,5	4,30
SMA UMUM	2,56	2,73	2,93	2,88	2,88	3,00
SMA KEJURUAN	2,24	2,81	2,76	3,15	3,19	3,41
DI/II/III dan Universitas	0,32	0,4	0,41	0,44	0,41	0,38
Universitas	1,22	1,41	1,42	1,5	1,5	1,65
Total	19,96	19,99	20,41	20,86	20,91	21,30

Sumber : BPS Jawa Tengah

Grafik 6.1. Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat Ini

Sumber: Bank Indonesia

penghasilan sedikit meningkat dari 108,48 pada triwulan III 2025 menjadi 109,46 pada triwulan IV 2025 dan masih berada pada level optimis (>100). Sedangkan, indeks ketersediaan lapangan kerja pada triwulan IV 2025 berada pada level 95,78 meningkat 14,01% dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di level 81,77. Sejalan dengan hal tersebut, indeks tenaga kerja dan indeks penghasilan 6 bulan mendatang diperkirakan masih berada di level optimis. Optimisme kondisi ketenagakerjaan juga terkonfirmasi oleh *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Jawa Tengah yang masih berada pada level optimis 50,47 di triwulan IV 2025.

Kinerja ketenagakerjaan ke depan menghadapi tantangan dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja di tengah tuntutan efisiensi biaya operasional akibat kenaikan UMK dan biaya tenaga kerja. Hasil liaison pada triwulan IV 2025 ke perusahaan lead pada beberapa sektor utama menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja, meskipun sejumlah perusahaan juga melakukan pergeseran komposisi tenaga kerja dengan mengurangi pekerja tetap dan meningkatkan tenaga kontrak atau outsourcing guna menjaga fleksibilitas biaya. Penyerapan tenaga kerja diperkirakan akan membaik pada periode mendatang sejalan dengan optimisme kondisi ketenagakerjaan di sejumlah sektor utama.

6.2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

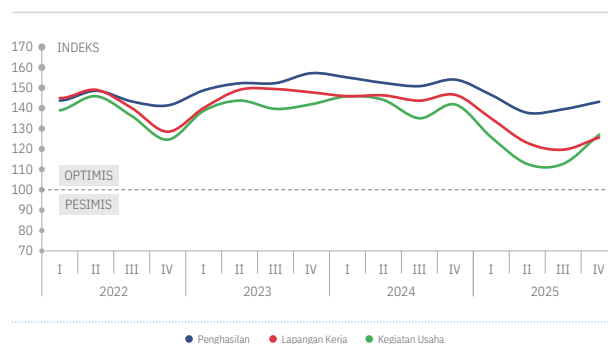
Nilai Tukar Petani (NTP)¹¹ pada Desember 2025 meningkat dibandingkan September 2025. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan pada indeks yang diterima petani maupun indeks yang dibayar petani. Pada Desember 2025, NTP tercatat sebesar

Tabel 6.6. NTP Jawa Tengah

Nilai Tukar Petani	2024			2025			
	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP	DES
Indeks Yang Diterima Petani (it)	139,70	139,71	140,39	142,40	143,56	147,99	150,96
Indeks Yang Dibayar Petani (ib)	123,61	122,78	124,25	125,21	126,25	126,67	128,40
Nilai Tukar Petani	113,02	113,79	112,98	113,73	113,72	116,84	117,57

Sumber : BPS Jawa Tengah

10. Nilai Tukar Petani (NTP) periode data tahun Desember 2019 dan seterusnya menggunakan NTP Tahun Dasar 2018 sedangkan NTP periode data sebelum periode Desember 2019 menggunakan data NTP Tahun Dasar 2012

Grafik 6.2. Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha 6 bulan yang Akan Datang

Sumber: Bank Indonesia

117,57, meningkat sebesar 0,62% dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat di level 116,84. Indeks yang diterima petani (It) dan indeks yang dibayar petani (Ib) mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 2,01% dan 1,37%.

Kenaikan indeks yang diterima petani meningkat seiring dengan peningkatan pada produktivitas dan harga jual hasil pertanian pada musim panen akhir tahun serta meningkatnya permintaan pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Di sisi lain, indeks yang dibayar petani mengalami kenaikan didorong oleh meningkatnya biaya proses produksi seperti biaya tenaga kerja, pupuk, konsumsi rumah tangga petani, serta transportasi dan distribusi.

NTP Jawa Tengah per Subsektor mengalami kenaikan. NTP pada subsektor hortikultura, peternakan dan perikanan meningkat masing-masing sebesar 10,5% (ptp), 0,41% (ptp) dan 0,86% (ptp). Sementara itu, NTP untuk sub sektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat menurun masing-masing sebesar 0,81% dan 6,11%.

Peningkatan NTP pada subsektor hortikultura sebesar 10,5% (ptp) terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas sayuran dan buah-buahan akibat meningkatnya permintaan pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru di tengah pasokan yang relatif terbatas karena faktor cuaca.

Pada subsektor peternakan, kenaikan NTP sebesar 0,41% (ptp) dipengaruhi oleh membaiknya harga jual komoditas seperti telur dan daging ayam ras serta tambahan permintaan institusional guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun di sisi lain kenaikan harga pakan masih menahan peningkatan

yang lebih tinggi. Sementara itu, pada subsektor perikanan, peningkatan NTP sebesar 0,86% (ptp) sejalan dengan kenaikan harga ikan konsumsi di tengah stabilnya biaya operasional nelayan serta pemenuhan kebutuhan protein pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, penurunan NTP pada subsektor tanaman pangan sebesar 0,81% dan tanaman perkebunan rakyat sebesar 6,11% diperkirakan dipengaruhi oleh kejadian banjir di wilayah sentra produksi seperti Demak, Grobogan, dan sekitarnya yang menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas hasil panen sehingga menekan harga jual di tingkat petani. Sementara itu, petani juga menghadapi peningkatan biaya produksi untuk pemulihan lahan pascabanjir seperti kebutuhan benih ulang, pupuk, pestisida, serta tenaga kerja, sehingga berdampak pada penurunan NTP di kedua subsektor tersebut.

Secara keseluruhan, Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor mengalami kenaikan sebesar 2,01% (ptp). Indeks

harga yang diterima (It) untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan pada akhir triwulan IV 2025 masing-masing tumbuh sebesar 0,62%; 11,66%; 2,2% dan 2,15% dibandingkan akhir triwulan sebelumnya. Peningkatan ini diperkirakan disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas seiring tingginya permintaan pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru.

Sedangkan pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, Indeks harga yang diterima (It) mengalami penurunan sebesar 5,33%. Hal ini antara lain didorong biaya pemeliharaan dan distribusi yang mengalami peningkatan.

Seluruh subsektor mengalami kenaikan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) pada Desember 2025. Kenaikan ini antara lain dipengaruhi oleh dampak banjir di sejumlah wilayah sentra produksi sehingga terdapat kenaikan biaya produksi serta biaya distribusi pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru.

Tabel 6.7. NTP Jawa Tengah per Subsektor

Nilai Tukar Petani	2024			2025			
	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP	DES
Total	113,02	113,79	112,98	113,73	113,72	116,84	117,57
Tanaman Pangan	112,22	119,12	115,29	116,03	116,53	122,28	121,29
Hortikultura	128,87	110,11	117,28	118,68	115,61	114,70	126,80
Tanaman Perkebunan Rakyat	114,10	116,65	118,07	121,16	124,07	121,12	113,72
Peternakan	101,79	98,39	98,93	98,06	97,90	99,34	99,75
Perikanan	101,20	103,41	104,83	103,47	101,76	103,24	104,13

Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel 6.8. Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor

Indeks Yang Diterima Petani	2024			2025			
	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP	DES
Total	139,70	139,71	140,39	142,40	143,56	147,99	150,96
Tanaman Pangan	139,66	147,01	144,29	146,43	148,07	155,47	156,44
Hortikultura	158,80	134,77	145,60	148,81	145,85	145,67	162,65
Tanaman Perkebunan Rakyat	141,06	143,99	147,12	151,96	156,56	153,16	145,00
Peternakan	123,47	118,80	120,05	119,35	121,30	124,34	127,08
Perikanan	123,27	125,62	128,15	127,69	125,88	128,36	131,12

Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel 6.9. Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor

Indeks Yang Dibayar Petani	2024			2025			
	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP	DES
Total	123,61	122,78	124,25	125,21	126,25	126,67	128,40
Tanaman Pangan	124,45	123,41	125,15	126,20	127,07	127,14	128,98
Hortikultura	123,22	122,40	124,14	125,39	126,16	126,99	128,27
Tanaman Perkebunan Rakyat	123,63	123,44	124,60	125,42	126,19	126,45	127,51
Peternakan	121,29	120,74	121,34	121,71	123,90	125,16	127,40
Perikanan	121,82	121,48	122,24	123,42	121,95	124,34	125,92

Sumber : BPS Jawa Tengah

6.3. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Jawa Tengah menurun, baik dari sisi jumlah maupun rasio penduduk miskin. Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2025 sebesar 3,34 juta orang, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 sebesar 3,36 juta orang. Rasio penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2025 mencapai 9,39%, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 9,48%.

Penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan. Tingkat kemiskinan di perdesaan pada September 2025 sebesar 9,87%, turun 0,5 poin dibandingkan Maret 2025 sebesar 9,92%. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,21 poin, yaitu dari 9,10% pada Maret 2025 menjadi 8,99% pada September 2025. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada September 2025 mencapai 1,6 juta orang, lebih rendah dibandingkan penduduk miskin di perkotaan sebesar 1,74 juta orang.

Penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah belum diikuti dengan penurunan garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2025 mencapai Rp570.870 per kapita per bulan meningkat 6,15% dibandingkan Maret 2025 sebesar Rp537.812 per kapita per bulan. Garis kemiskinan di Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan nasional sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Berdasarkan kota dan desa di Jawa Tengah, garis kemiskinan di perdesaan lebih rendah yaitu Rp560.252 per

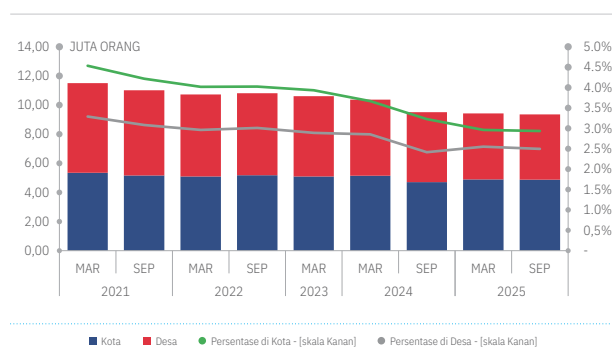
kapita per bulan, berbanding wilayah perkotaan yang sebesar Rp580.119 per kapita per bulan. Hal ini sejalan dengan peningkatan garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yaitu 6,14% berbanding 6,12%. Hal ini menunjukkan indikasi kenaikan harga komoditas pokok di perkotaan yang lebih tinggi.

6.4. Pemerataan Kesejahteraan Penduduk

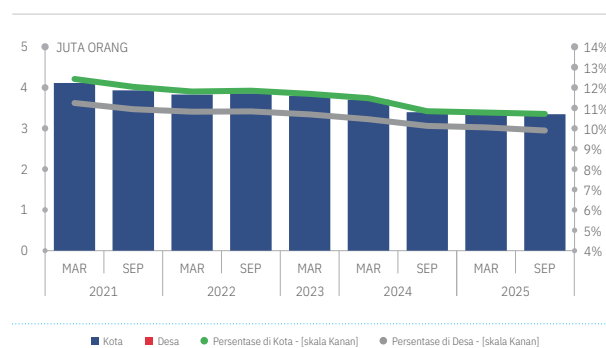
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah pada September 2025 yang diukur melalui koefisien Gini¹² menurun. Koefisien Gini Jawa Tengah pada September 2025 sebesar 0,350 lebih rendah dibandingkan Maret 2025 sebesar 0,359, dan lebih rendah dari Nasional sebesar 0,363. Dengan demikian, tingkat pemerataan pendapatan di Jawa Tengah membaik dan lebih merata dibandingkan dengan nasional.

Berdasarkan wilayah, tingkat ketimpangan di kawasan perkotaan lebih tinggi dibandingkan kawasan pedesaan. Koefisien Gini perkotaan Jawa Tengah pada September 2025 sebesar 0,381; lebih tinggi dibandingkan perdesaan sebesar 0,296. Meskipun ketimpangan di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan perdesaan, distribusi pengeluaran menurut kelompok penduduk menunjukkan ketimpangan rendah. Presentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di perkotaan masih sebesar 18,58% sedikit lebih rendah dibandingkan di perdesaan sebesar 22,30%.

Grafik 6.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah



Grafik 6.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota dan Desa Jawa Tengah



Sumber: BPS Jatim (diolah)

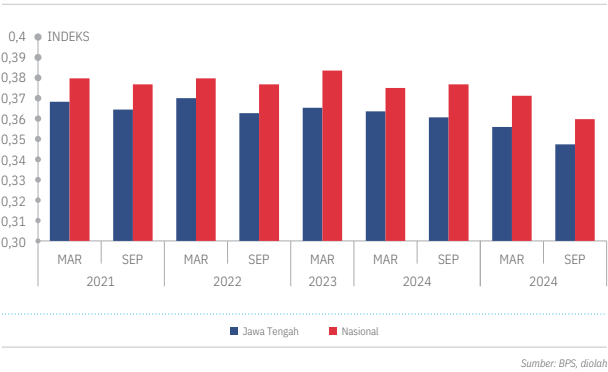
Tabel 6.10. Garis Kemiskinan Jawa Tengah

Garis Kemiskinan	2022		2023	2024		2024	
	MAR	SEP	MAR	MAR	SEP	MAR	SEP
Kota	Rp442.479	Rp469.623	Rp485.511	Rp517.415	Rp532.913	Rp546.576	Rp580.119
Desa	Rp434.785	Rp459.714	Rp469.003	Rp495.627	Rp509.298	Rp527.934	Rp560.252
Kota & Desa	Rp438.833	Rp464.879	Rp477.580	Rp507.001	Rp521.093	Rp537.812	Rp570.870

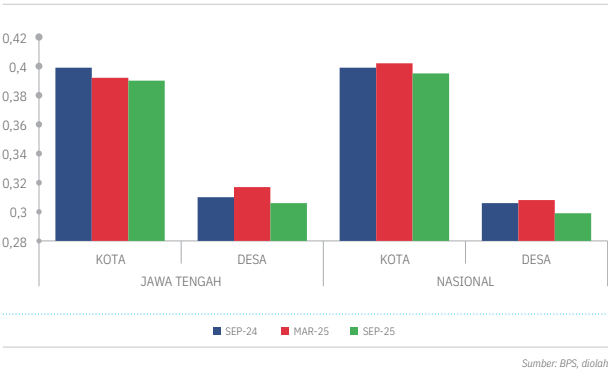
Sumber: BPS Jawa Tengah

11. Koefisien Gini mengukur ketimpangan distribusi pendapatan melalui pengukuran yang berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna di dalam suatu daerah, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Grafik 6.5. Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional



Grafik 6.6 Perbandingan Ketimpangan Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Daerah





Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2026 yang tumbuh positif dan kuat diperkirakan terus berlanjut, didorong oleh permintaan domestik yang masih kuat dan permintaan global yang terus menunjukkan perbaikan.



Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor, dan PMTB atau Investasi diperkirakan dapat menjadi komponen penopang pendorong ekonomi tahun 2026 seiring dengan berbagai insentif dan program pemerintah.



Dari sisi lapangan usaha, LU industri pengolahan, perdagangan dan pertanian diperkirakan menjadi pendorong utama ekonomi selama tahun 2026, sejalan dengan peningkatan produksi padi, pemberlakuan berbagai insentif pemerintah, dan permintaan masyarakat yang tetap kuat.

7.1. Kondisi Perekonomian Global dan Domestik

Perekonomian global tetap menunjukkan ketahanan yang kuat meskipun masih dibayangi berbagai gangguan perdagangan global dan ketegangan geopolitik. Ekonomi global pada tahun 2026 diproyeksikan tumbuh sebesar 3,3% (yoy) namun proyeksi ini di bawah rata-rata historis pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2000 – 2019 sebesar 3,7% (yoy). Dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi Januari 2026, Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund* / IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan global tahun 2026 dari 3,1% pada edisi Oktober 2025 menjadi 3,3% pada edisi Januari 2026. IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sejalan dengan berkurangnya hambatan kebijakan perdagangan global. Penurunan tantangan perdagangan global didukung oleh kemampuan adaptasi pelaku dalam menghadapi tarif AS yang lebih tinggi melalui pengalihan rantai pasok. Selain itu, kinerja pertumbuhan ekonomi global juga didorong oleh peningkatan investasi di sektor teknologi seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* / AI) yang dapat mendorong kenaikan nilai aset dan ekspektasi peningkatan produktivitas. Selain itu, dukungan kebijakan fiskal dan moneter, kondisi keuangan yang akomodatif secara luas, dan kemampuan adaptasi sektor swasta juga turut mendukung prospek ekonomi global pada tahun 2026. Meskipun tarif dan ketidakpastian diproyeksikan akan terus membebani aktivitas perekonomian global, dampaknya terhadap pertumbuhan diperkirakan akan menurun selama tahun 2026 dan 2027.

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju diproyeksikan sebesar 1,8% (yoy) pada tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diproyeksikan tumbuh sebesar 2,4% (yoy) pada tahun 2026, didukung oleh kebijakan fiskal dan suku bunga kebijakan yang lebih rendah. Sementara itu, dampak gejala perdagangan global juga secara bertahap berkurang. Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa pada 2026 diproyeksikan sebesar 1,3% (yoy), didorong oleh peningkatan belanja publik di Jerman serta kinerja ekonomi yang lebih kuat di Irlandia dan Spanyol. Sementara itu dibandingkan dengan wilayah lain, Kawasan Eropa kurang mendapat keuntungan dari

tren peningkatan investasi berbasis teknologi yang terjadi saat ini. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan sebesar 4,2% (yoy) pada tahun 2026, melambat dari tahun 2025 meskipun tetap berada di atas angka 4,0% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi negara berkembang ini disebabkan oleh perkembangan ekonomi Tiongkok yang masih lemah. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,5% (yoy), melambat dibanding tahun 2025. Namun demikian, IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok sejalan dengan penurunan tarif AS terhadap barang-barang China, serta berlanjutnya pengalihan ekspor ke pasar lain seperti Asia Tenggara dan Eropa, dan langkah-langkah stimulus yang diasumsikan akan diimplementasikan selama dua tahun.

Perdagangan global diperkirakan melambat pada tahun 2026 dan kembali meningkat pada tahun 2027. Meskipun demikian, sistem perdagangan global masih menunjukkan ketahanan. Mekanisme perdagangan multilateral berbasis aturan (*rules-based system*) diperkirakan tetap menjadi penopang stabilitas di tengah gejolak kebijakan proteksionis global. Dinamika ini mencerminkan pola *front-loading* dan penyesuaian arus perdagangan terhadap kebijakan baru. Dalam jangka menengah, kebijakan fiskal ekspansif di negara-negara dengan surplus neraca transaksi berjalan diperkirakan akan berkontribusi pada penurunan ketidakseimbangan global. Lebih lanjut, lonjakan investasi pada bisnis berbasis teknologi diperkirakan akan terus menarik arus modal ke Amerika Serikat meskipun mengalami moderasi. Selain itu, terdapat potensi risiko perang Israel dan Amerika Serikat dengan Iran yang menyeret negara-negara di Kawasan Teluk dan mengancam pasokan energi global.

Penurunan inflasi global diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2026. Dalam WEO edisi Januari 2026, IMF memperkirakan penurunan tekanan inflasi global sejalan dengan tren penurunan permintaan dan harga energi yang lebih rendah. Inflasi inti Amerika Serikat diproyeksikan akan kembali ke target sebesar 2% pada tahun 2027. Inflasi umum di Kawasan Eropa diperkirakan akan berada di kisaran 2% dengan inflasi inti diperkirakan akan turun ke level 2% pada tahun 2027. Australia dan Norwegia juga diperkirakan akan mengalami persistensi inflasi di atas angka target yang cukup lama. Inflasi di Inggris Raya diperkirakan akan kembali ke target pada akhir tahun 2026 seiring dengan melemahnya pasar tenaga kerja yang terus memberikan tekanan pada pertumbuhan upah. Inflasi di Jepang diperkirakan akan moderat pada tahun 2026 dan mendekati target pada tahun 2027 seiring dengan penurunan harga pangan dan komoditas. Sementara itu, inflasi di Tiongkok diperkirakan akan mulai meningkat dari level rendahnya. Meskipun demikian, perang di Kawasan Teluk meningkatkan kekhawatiran risiko kenaikan harga energi secara global.

Tabel 7.1. Indikator Perekonomian Global

Negara	2024	2025*	2026*
PDB Global	3,3	3,3	3,3
PDB Advanced Economies	1,8	1,7	1,8
PDB Amerika Serikat	2,8	2,1	2,4
PDB Uni Eropa	0,8	1,4	1,3
PDB Jepang	-0,2	1,1	0,7
PDB Emerging Market and Developing Countries	4,3	4,4	4,2
PDB Tiongkok	5,0	5,0	4,5

Sumber: IMF WEO, *Proyeksi

Tabel 7.2. Pertumbuhan Harga Komoditas Perdagangan Dunia

Komoditas Utama (%yoy)	2023	2024	2025*
Tembaga	-3,96	7,92	8,52
CPO	-28,37	10,40	8,07
Karet	-13,50	35,38	-6,07
Emas	7,80	22,98	44,18
Gula	23,50	-13,56	-16,41

Sumber: Bloomberg (diolah)

Inflasi IHK Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%. Hal ini sejalan dengan prakiraan inflasi inti yang tetap terjaga didukung dengan ekspektasi inflasi terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar yang dapat merespon permintaan domestik. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta perkembangan digitalisasi yang memberikan dampak positif diharapkan memitigasi risiko *imported inflation*. Inflasi VF diproyeksikan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi yang kuat antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Menyikapi hal tersebut, pada 18-19 Februari 2026, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%. Penetapan tersebut sejalan dengan upaya untuk menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasaran, stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia terus memperhatikan pergerakan nilai tukar Rupiah dan prospek inflasi serta perkembangan data dan dinamika kondisi yang berkembang, dalam mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan pada periode mendatang sejalan dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1% dan upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang disertai prinsip kehati-hatian tetap diarahkan untuk mendorong kredit atau pembiayaan perbankan kepada sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk menopang pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat sinergi dalam perluasan akseptasi pembayaran digital, struktur industri sistem pembayaran, serta meningkatkan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

7.2. Tracking dan Proyeksi PDRB Jawa Tengah

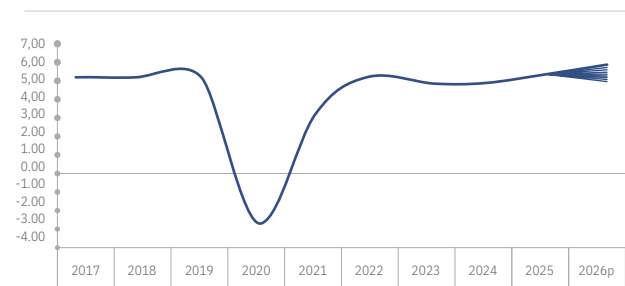
7.2.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2026

Secara keseluruhan tahun, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran 5,1 - 5,9% (yoy) terutama didukung oleh kinerja LU Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan. Kinerja LU Pertanian diperkirakan meningkat sejalan dengan target produksi padi GKG yang meningkat sekitar 11,7% dari tahun 2025 dan pemenuhan target swasembada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026. Kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan potensi peluasan pasar ekspor Jawa Tengah ke Kanada sebagai dampak perjanjian ICA-CEPA yang mulai diimplementasikan pada 2026.

Beberapa komoditas ekspor potensial antara lain komoditas tekstil, alas kaki, dan furniture. Selain itu, kinerja LU Perdagangan diperkirakan tetap kuat sejalan dengan daya beli masyarakat yang tetap kuat didorong oleh kenaikan UMP dan UMK, serta keberlanjutan sejumlah stimulus fiskal pemerintah pada tahun 2026.

Kinerja ekspor Jawa Tengah diharapkan terus meningkat pada periode mendatang. Perluasan pasar ekspor perlu diperluas pada pasar non tradisional seperti pasar Afrika maupun negara-negara di kawasan pasifik. Beberapa komoditas andalan antaran lain produk furniture maupun produk kerajinan lainnya.

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan ekspor Jawa Tengah berdampak pada kesejahteraan masyarakat miskin. Hasil simulasi pada peningkatan ekspor komoditas di sektor industri makanan dan minuman, sektor di industri furniture, dan sektor kimia memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat paling besar pada masyarakat miskin di pedesaan maupun di perkotaan.

Grafik 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

Sumber: BPS, Bank Indonesia (diolah)

Selain itu, simulasi pada peningkatan investasi di kawasan industri terpadu yang berorientasi ekspor juga menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Hasil simulasi menunjukkan dampak yang lebih besar pada peningkatan masyarakat miskin di perdesaan.

7.2.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Sisi Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2026 pada sisi pengeluaran diperkirakan bersumber dari permintaan domestik yang tetap kuat, terutama pada sisi konsumsi domestik yang turut mendorong sektor perdagangan dan didukung dengan investasi yang lebih baik. Pertumbuhan konsumsi domestik didukung oleh keberlanjutan stimulus yang diberikan oleh Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta didukung oleh kenaikan upah dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.

Permintaan domestik Jawa Tengah tetap kuat ditopang oleh berbagai stimulus fiskal yang diberikan oleh Pemerintah.

Pemerintah resmi melanjutkan sejumlah paket stimulus ekonomi dan bantuan sosial (bansos) pada tahun 2026. Paket stimulus 2026 menekankan pada penguatan dunia usaha, perlindungan tenaga kerja, dan keberlanjutan bansos regular. Beberapa diantaranya adalah pembebasan PPh 21 bagi pekerja dengan penghasilan ≤ Rp10 juta/bulan di sektor padat karya dan pariwisata, PPN 0% untuk pembelian rumah baru/rusun tertentu, insentif PPh final 0,5% untuk UMKM, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian hingga 90% bagi petani, nelayan, pengemudi ojek daring, penyerapan tenaga kerja di sektor infrastruktur dan kehutanan. Selain itu, stimulus ini juga didukung oleh kenaikan gaji ASN dan UMP Jawa Tengah pada tahun 2026 yang dapat menjaga daya beli masyarakat tetap kuat. Penguatan kebijakan *Loan to Value* (LTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah sebesar 0%, yang berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026 juga diperkirakan dapat menjadi salah satu pendorong konsumsi RT ke depan.

Kinerja investasi Jawa Tengah diperkirakan tetap tumbuh kuat selama tahun 2026. Realisasi investasi Jawa Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp88,50 Triliun, atau 112,98% dari target sebesar Rp78,33 Triliun dan target investasi Jawa Tengah meningkat sekitar 26,5% pada tahun 2026. Selain itu, beberapa proyek Pembangunan pabrik di KEK Kendal dan KIT Batang akan berlanjut pada tahun 2026 sehingga diperkirakan dapat mendorong realisasi investasi yang lebih tinggi. Program penguatan swasembada pangan yang ditujukan untuk meningkatkan indeks pertanaman Provinsi Jawa Tengah juga

diperkirakan turut mendorong keberlanjutan investasi non-bangunan seperti penggunaan alat berat untuk kegiatan olah tanam.

Peningkatan kinerja ekspor antarprovinsi menjadi faktor pendorong ekspor tetap tumbuh kuat di tengah risiko pelemahan ekspor luar negeri. Kinerja ekspor antarprovinsi yang lebih baik didukung dengan peningkatan produksi komoditas pertanian pada tahun 2026 sehingga menjaga kinerja ekspor secara keseluruhan. Pelaksanaan program MBG secara masif berpotensi meningkatkan permintaan pangan nasional. Penguatan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional berperan penting dalam mengakomodasi peningkatan permintaan tersebut. Pemenuhan kebutuhan pasokan luar daerah dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama antar daerah (KAD) yang dapat mendorong realisasi ekspor antarprovinsi. Hal ini dapat menyeimbangkan kinerja ekspor mengingat ekspor luar negeri berpotensi menurun seiring dengan prakiraan perlambatan perekonomian negara mitra dagang ekspor Jawa Tengah, yaitu Tiongkok.

7.2.3. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Sisi Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada sisi Lapangan Usaha (LU) diperkirakan didorong oleh LU Pertanian sejalan dengan peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional dan peningkatan target produksi padi pada tahun 2026. Di sisi lain, LU Industri Pengolahan dan Perdagangan juga diperkirakan meningkat.

LU Pertanian diperkirakan meningkat pada tahun 2026 sejalan dengan peningkatan target produksi padi GKG.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan swasembada pangan pada tahun 2026 dan menargetkan peningkatan produksi padi GKG sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat sekitar 11,7% dari tahun 2025 yang hanya 9,4 juta ton. Rencana peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, perikanan untuk memperkuat ketahanan pangan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional dituangkan dalam (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) RKPD 2026 yang diarahkan dalam rangka “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional”. Selain itu, Dinas Pertanian dan Peternakan berencana untuk meningkatkan program pengembangan komoditas hortikultura sehingga diperkirakan dapat meningkatkan produktivitas hortikultura terutama komoditas cabai dan bawang merah pada tahun 2026.

Kinerja LU Perdagangan diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Hal ini didukung oleh keberlanjutan stimulus yang diberikan oleh Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat tetap kuat pada tahun 2026. Selain itu, terdapat penguatan

kebijakan *Loan to Value* (LTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah sebesar 0%, yang berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026 yang diperkirakan dapat mendorong penjualan kendaraan bermotor. Faktor pendorong kinerja LU Perdagangan juga bersumber dari potensi perluasan pasar ekspor produk unggulan Jawa Tengah ke Kanada sebagai dampak positif perjanjian ICA-CEPA yang mulai diimplementasikan pada 2026.

Kinerja LU Industri Pengolahan juga diperkirakan menjadi salah satu sumber pertumbuhan pada tahun 2026. Meskipun masih dibayangi oleh ketidakpastian global yang masih tinggi, sub-LU industri furnitur dan industri makanan minuman diperkirakan dapat mendorong peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan seiring dengan permintaan domestik dan permintaan ekspor yang tetap kuat. Berdasarkan hasil *liaison* Bank Indonesia, kebijakan bea masuk impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang diberlakukan untuk menahan derasnya impor pakaian dan tekstil jadi ke pasar domestik juga turut mendukung kinerja industri pengolahan. Selain itu, perjanjian ICA-CEPA yang mulai diimplementasikan pada 2026 dapat memperluas promosi ekspor produk unggulan Jawa Tengah ke Kanada, sehingga mendorong kinerja industri pengolahan yang menghasilkan komoditas tekstil, alas kaki, dan furniture.

7.3. Tracking dan Proyeksi Inflasi

7.3.1. Inflasi Januari 2026

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada Januari 2026 menurun. Provinsi Jawa Tengah mengalami deflasi 0,35% (mtm) pada Januari 2026 setelah mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm) pada Desember 2025. Deflasi Jawa Tengah lebih dalam dibandingkan deflasi nasional sebesar 0,15% (mtm). Deflasi Jawa Tengah pada Januari 2026 terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, cabai rawit, dan telur ayam ras. Deflasi lebih dalam, tertahan oleh peningkatan harga komoditas emas perhiasan, bawang putih, sepeda motor, mobil, dan beras. Sementara secara tahunan, inflasi Provinsi Jawa Tengah pada Januari 2026 sebesar 2,83% (yoy), masih terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1% (yoy) dan juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,55% (yoy).

Deflasi pada periode laporan terutama dipengaruhi oleh penurunan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil: -0,51%; mtm). Komoditas penyumbang deflasi pada kelompok tersebut terutama berasal dari penurunan harga cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, cabai rawit, dan telur ayam ras, sejalan dengan masuknya periode panen dan normalisasi permintaan pasca Natal dan Tahun Baru 2026.

Deflasi yang lebih dalam tertahan oleh inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil sebesar 0,16% (mtm). Inflasi pada Kelompok tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas emas perhiasan (andil: 0,16%; mtm) seiring dengan harga emas dunia yang berada pada tren meningkat hingga mencapai *all time high* pada Januari 2026. Peningkatan harga emas terjadi seiring dengan peningkatan permintaan investor terhadap aset *safe haven* akibat ketegangan geopolitik global, serta ekspektasi pemangkasan kembali suku bunga The FED pada awal 2026.

Secara spasial, seluruh kota IHK di Jawa Tengah mengalami deflasi. Deflasi terdalam berlangsung di Kab. Wonogiri yang pada periode laporan mencapai 0,52% (mtm), diikuti oleh Wonosobo (0,51%; mtm), Cilacap (0,42%; mtm), Surakarta (0,38%; mtm), Purwokerto (0,36%; mtm), Rembang (0,29%; mtm), Kudus (0,26%; mtm), Semarang (0,25%; mtm), dan Tegal (0,24%; mtm). Sejalan dengan di tingkat provinsi, penurunan tekanan inflasi di sembilan kota pantauan IHK terutama dipengaruhi oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring dengan normalisasi permintaan pasca Natal dan Tahun Baru 2026.

7.3.2. Tracking Inflasi Triwulan I 2026

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025. Tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari Kelompok Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah Tangga seiring dengan normalisasi diskon tarif listrik pasca diskon tarif listrik sebesar 50% pada bulan Februari – April 2025.

Selain itu, tekanan inflasi diperkirakan juga bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Peningkatan potensi tekanan inflasi terutama disebabkan oleh perkiraan kenaikan harga emas dunia yang turut berdampak pada kenaikan harga emas di dalam negeri. Berdasarkan data Trading Economics, harga emas telah menunjukkan tren peningkatan sejak Oktober 2023. Kenaikan harga emas dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan Rusia-Ukraina, serta pembelian emas oleh bank sentral yang berlanjut di 2026 yang berpotensi meningkatkan permintaan emas sebagai aset *safe haven*, dan berdampak kepada peningkatan tekanan inflasi komoditas emas perhiasan.

Tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi juga berpotensi meningkat seiring dengan gejolak geopolitik global di Timur Tengah yang terjadi pada akhir Februari 2026. Secara umum, harga minyak *West Texas Intermediate* (WTI) sejak Agustus hingga awal November 2025 bergerak pada kisaran USD 67- 56 per barel. Level harga ini merupakan pergerakan terendah dalam lima tahun terakhir. Namun, pasca ketegangan antara Iran dan USA – Israel meningkat sejak 28 Februari 2026, kekhawatiran akan gangguan pasokan energi global terjadi seiring dengan penutupan Selat Hormuz oleh Iran.

Di sisi lain, risiko peningkatan inflasi Kelompok Transportasi tertahan oleh pemberian diskon tiket angkutan oleh Pemerintah pada momentum ramadan dan idulfitri 1447 H. Selain itu, harga Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diproyeksikan masih terkendali meskipun pada momentum Ramadan dan Idulfitri, seiring dengan masa panen raya untuk komoditas beras yang akan berlangsung pada periode tersebut.

7.3.3. Program Pengendalian Inflasi Daerah

Dalam rangka pengendalian inflasi barang dan jasa, Bank Indonesia selalu berkoordinasi secara aktif dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan beberapa program kegiatan yang telah dijalankan selama triwulan laporan, di antaranya:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimda dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan ditindaklanjuti oleh pimpinan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta dihadiri oleh seluruh pimpinan forkopimda.
2. *Capacity building* peningkatan kapasitas petani dalam upaya hilirisasi cabai di Temanggung.
3. *Capacity building* pembuatan dan pemanfaatan pupuk organik untuk poktan padi di Demak.
4. *Capacity building* Lelang Cabai Digital untuk Champion Cabai Nasional yang berada di Jawa Tengah
5. Panen hasil alih teknologi peningkatan produksi padi melalui pemanfaatan bioteknologi (varietas unggul Gamagora 7 dan Galur MD 75).
6. Rapat Koordinasi TPID Jawa Tengah dalam rangka penguatan sinergi antar stakeholder dalam menerapkan upaya pengendalian intervensi beras secara *end to end* di Jawa Tengah.
7. Rapat penyusunan dan evaluasi peta jalan pengendalian inflasi di Jawa Tengah (Provinsi dan Kab/Kota).
8. Gerakan pengendalian inflasi berupa *Central Java Fish Market* dengan tema “Pangan Akuatik sebagai Alternatif Sumber Pangan Jawa Tengah”.
9. Sinkronisasi rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun anggaran 2026 bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Pertanian Kab/Kota se-Jawa Tengah.
10. Operasi pasar, khusus komoditas cabai, melalui subsidi harga pangan melalui APBD sebanyak 9 ton selama minggu kedua sampai dengan minggu ketiga Desember 2025 di 9 Kota/Kabupaten perhitungan IHK.
11. Sidak pasar dan distributor komoditas strategis secara berkala.
12. Koordinasi terkait upaya pengendalian inflasi menjelang natal dan tahun baru (nataru) 2026 dan rencana operasional posko terpadu nataru 2026.
13. Sinkronisasi rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun anggaran 2026 bersama Dinas Pertanian

dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

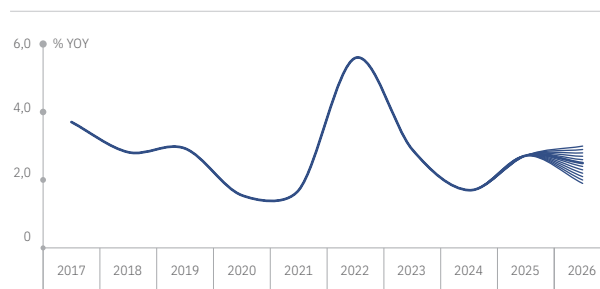
14. Rapat Koordinasi dengan perbankan perihal pembiayaan BUMP Lumpang Semar Sejahtera untuk penguatan modal BUMP LSS yang berperan sebagai *offtaker* dan mitra pemerintah daerah Kota Semarang dalam melakukan Operasi Pasar.
15. Memfasilitasi kunjungan studi banding TPID Daerah Istimewa Yogyakarta, Mamuju, Palu, Sibolga, Papua, dan Kediri ke TPID Provinsi Jawa Tengah, TPID Kota Semarang, dan TPID Kabupaten Kebumen.

7.3.4. Prospek Inflasi Jawa Tengah Tahun 2026

Inflasi di tahun 2026 diperkirakan masih terjadi namun dengan magnitude yang lebih rendah dibandingkan tahun 2025 dan tetap akan berada pada sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Potensi peningkatan risiko inflasi bersumber dari komoditas emas perhiasan seiring dengan peningkatan harga emas global. Peningkatan permintaan aset safe haven oleh investor seiring dengan ketidakpastian global mendorong peningkatan harga emas dunia. Kemudian, konflik geopolitik global yang berpotensi memanaskan di tahun 2026 juga meningkatkan risiko gangguan pasokan energi global akibat jalur distribusi yang terkendala.

Selain itu, beberapa harga komoditas pangan diperkirakan mencapai tingkat harga keseimbangan yang baru seiring dengan kenaikan harga produksi (harga pupuk dan harga pakan) dan harga pembelian gabah kering giling di tingkat petani. Lebih lanjut, realisasi program MBG yang lebih masif juga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi ke depan. **Namun demikian, inflasi lebih tinggi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diproyeksikan tertahan oleh upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Pusat (TPIP).** Efektivitas program swasembada pangan melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan Luas Tambah Tanam (LTT) di Jawa Tengah diharapkan mampu mengendalikan angka inflasi.

Grafik 7.2. Proyeksi Inflasi



Sumber: BPS, Bank Indonesia (dialah)

Berdasarkan berbagai risiko tersebut, inflasi Jawa Tengah pada tahun 2026 diperkirakan berada pada sasaran inflasi **2,5±1% (yoy)**. Untuk menjaga inflasi berada pada rentang sasaran, Bank Indonesia bersama dengan para pemangku kepentingan di daerah yang tergabung dalam Forum TPID Provinsi Jawa Tengah terus berkoordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi. Program pengendalian inflasi tersebut diarahkan pada pengelolaan ekspektasi masyarakat yang disertai dengan upaya menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis di Jawa Tengah.

Tim Penyusun

PENGARAH

M. Noor Nugroho

PENANGGUNG JAWAB

Andi Reina Sari H.

KOORDINATOR PENYUSUN

Oki Hermawan

EDITOR

Agni Alam Awirya

TIM PENULIS

**Ayasha Nabila Priatno, Jihan Firka Mahirah, Imam Wahyudi, Octavira Mareta,
Rinda Alaska Suyanto, Prasustyawatiningsih, Davin Sebastian (Bank Indonesia Purwokerto),
Hanita Fitriyani (Bank Indonesia Solo), Prasojo (Bank Indonesia Tegal)**

KONTRIBUTOR

Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi

Jl. Imam Bardjo SH No. 4 Semarang 50241

Telp. +62 24 8310246

Fax. +62 24 8310339

e-mail : KPwJateng-KPKP@bi.go.id

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Imam Bardjo SH. No. 4 Semarang
Telp. +62 24 831 0246, Fax. +62 24 831 0339
www.bi.go.id

